

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN  
MASYARAKAT DALAM PERWUJUDAN MAMASA SEBAGAI  
DESTINASI PARIWISATA DI SULAWESI BARAT**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh  
Beatrix Masturi  
E12113329**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**LEMBARAN PENGESAHAN****SKRIPSI****POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN  
MASYARAKAT DALAM PERWUJUDAN MAMASA SEBAGAI  
DESTINASI PARIWISATA DI SULAWESI BARAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Beatrix Masturi**

**E 12113329**

yang telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi  
pada tanggal 19 Mei 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si  
NIP. 19570707 198403 1 003

Pembimbing II



Dr. A. M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 199103 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik  
dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas



Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si  
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan FISIP Unhas



Dr. Nurlinah, M.Si  
NIP. 196309 121987 02 2 001

## LEMBARAN PENERIMAAN

## SKRIPSI

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN  
MASYARAKAT DALAM PERWUJUDAN MAMASA SEBAGAI  
DESTINASI PARIWISATA DI SULAWESI BARAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**BEATRIX MASTURI****E12113509**

Telah diperbaiki

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017

Menyetujui,

## PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(.....)
Sekretaris	: A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. A. M. Rusli, M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Indar Arifin, M.Si	(.....)
Anggota	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. A. M. Rusli, M.Si	(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ***“Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Perwujudan Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat”***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan Kepariwisata di Kabupaten Mamasa serta bagaimana pola kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dengan Pihak swasta dan Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai daerah destinasi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-



dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Agustinus Tangnga dan Ibunda Marlina Pualillin, SE yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga sampai seperti ini. Yang tidak pernah luput menyebutkan nama Penulis dalam setiap doanya agar Penulis dapat diberi kemudahan dan keberhasilan dalam melakukan segala hal, selalu memberikan semangat dan motivasi untuk Penulis, yang berusaha dan bekerja keras dalam menyekolahkan Penulis hingga dapat menyelesaikan studi di bangku kuliah. Kiranya kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi Ayah dan Ibu, sehingga selalu sehat, bahagia dan penuh damai sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi Penulis.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat Penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf.

4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas.
5. Bapak Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si selaku Pembimbing I penulis yang telah mengorbankan waktu serta memberi arahan, kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si selaku Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, motivasi, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi, yaitu Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, Bapak Lukman Irwan, S.Ip, M.Si, dan Bapak Rahmatullah, S.Ip, M.Si terima kasih atas masukan dan arahnya.
8. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, terima kasih atas didikan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
9. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh informan penulis di Kabupaten Mamasa, yakni Bupati, Ketua Komisi III DPRD, penyelenggara pemerintahan di Kantor Dinas Pariwisata, pelaku-pelaku usaha Pariwisata, Pengelola Objek

wisata, masyarakat setempat serta yang berkunjung ke tempat wisata yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.

11. Kepada Kedua saudara tersayang Penulis, Kakak Seftyandi Mayghel dan Adik Reynaldi yang telah mengizinkan penulis menjadi saudara tercantik di antara mereka. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, dan doa untuk penulis dalam melakukan segala hal.

12. Kepada Tante Penulis, Tante Dina Tangnga yang Penulis anggap sebagai Ibunda kedua yang senantiasa mendukung, membimbing, memotivasi, dan yang terpenting senantiasa mengalungkan doa dan harapan untuk penulis agar penulis dapat berhasil dalam segala hal. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai Tante Dina dan diberikan kesehatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

13. Kepada sepupu-sepupu penulis yaitu Kakak Ventus, Kakak Ruth, Ibeth, Evhy, Selvi yang selalu membantu, memberi semangat, dan mendoakan penulis dalam mengerjakan skripsi.

14. Kepada tante, om dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberi dukungan dalam doa dan motivasi untuk penulis.

15. Kepada sahabat-sahabat penulis di Kampus yaitu Cana, Dina, Ivha, Kakak Uni, Mega, Salpia, Suci, Sundari, Tami yang selalu ada

setiap penulis butuhkan, menjadi saudara disaat susah maupun senang, yang setia mendengar keluh kesah, dan tidak tanggung-tanggung untuk menegur penulis jika melakukan kekeliruan. Panggilan untuk sahabat-sahabat ini adalah *Ummalite*. Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara untuk penulis dari masa “maba” dan masih tetap ada dan kompak hingga saat ini.

16. Kepada sahabat-sahabat Penulis yang tak pernah lekang oleh waktu mulai dari penulis kecil hingga saat ini yaitu Kiki, Tiwi, Kakak Inggy', Eccca, Odhy, Vina, Angel, yang senantiasa menyemangati penulis, mendengar keluh kesah, mengajar dan mendoakan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah ada sampai saat ini untuk penulis.

17. Kepada Saudara-saudara tak sekandung penulis, *Lebensraum (L13R)*, yaitu Alif, Anti, Azura, Dirga, Jusna, Dewi, Suna, Ulfi, Uceng, Karina, Immang, Hanif, Dias, Zul, Yun, Febi, Irez, Yeyen, Erik, Ekki, Lala, Icha, Arya, Ayyun, Afni, Oskar, Kaswandi, Fahril, Ekka, Yani, Fitri, Syarif, Babba, Juwita, Dede, Aqil, Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Fitra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hasyim, Hillary, Mustika, Ike, Ina, Irma, Jay, Maryam, Herul, Aksan, Najib, Reza, Rosandi, Rum, Sani, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Yusra, Amel dan Almh. Iis yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga.

Kenangan bersama kalian mulai dari “*zaman botak lugu*”, “*zaman gondrong*” sampai rapi dan cantik seperti sekarang karena telah menjadi mahasiswa tingkat akhir akan tetap dalam ingatan.

18. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.

19. Keluarga Besar D'B3 Voice Unhas. Terima kasih atas kebersamaan, ilmu, pengalaman, kesempatan untuk berkarya dalam seni dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan.

20. Kepada teman-teman TK dan SD Kristen Bala Keselamatan Makassar, SMP Frater Thamrin Makassar, serta SMAN 1 Mamasa yang sampai sekarang masih bersama. Terima kasih telah menjadi warna tersendiri dalam kehidupan penulis.

21. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Soppeng Kecamatan Marioriawa, khususnya teman serumah selama kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Kakak Acuus, Yusti, Cika, Umri, Tisa, Tiwi, dan Pak Desa sekaligus Bapak Posko Pak Alimuddin, S.Ag., beserta keluarga dan seluruh masyarakat Desa Patampanua.

22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kiranya Tuhan YME senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin

Makassar, Mei 2017.

## DAFTAR ISI

Sampul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Penerimaan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xix
Daftar Lampiran	Xx
Intisari	xxi
Abstract	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1. Landasan Teori	10

2.1.1. Pembangunan dan Pembangunan Daerah	10
	14
2.1.2. Kemitraan dan Pola Kemitraan	
2.1.3. Pariwisata, Kepariwisata dan Destinasi	18
Pariwisata	28
2.1.4. Aktor yang berperan dalam Kepariwisata	29
2.1.4.1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah	34
2.1.4.2. Swasta	36
2.1.4.3. Masyarakat	37
2.2. Kerangka Pikir Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Lokasi Penelitian	41
3.2. Tipe Penelitian	41
3.3. Teknik Pengumpulan Data	42
3.4. Informan Penelitian	43
3.5. Sumber Data	43
3.6. Definisi Konsep	45
3.7. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa	46



4.1.1.	Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mamasa	51
4.1.2.	Kondisi Geografis dan Batas Administrasi	54
4.1.3.	Topografi	56
4.1.4.	Klimatologi	57
4.1.5.	Hidrologi	58
4.1.6.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	61
4.1.7.	Ketenagakerjaan	63
4.1.8.	Sosial Budaya	67
4.2.	Visi Misi Kabupaten Mamasa	67
4.2.1.	Visi	69
4.2.2.	Misi	
4.3.	Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa	73
4.3.1.	Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa	73
4.3.2.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa	75
4.3.3.	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa	76
4.4.	Potensi Pariwisata Kabupaten Mamasa	99
4.4.1.	Daya Tarik Wisata Alam	
4.4.2.	Daya Tarik Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah	103

4.5.	Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Mamasa	107
4.5.1.	Pembangunan Atraksi Wisata Kabupaten Mamasa (Attraction)	109
4.5.2.	Pembangunan Akseibilitas Wisata Kabupaten Mamasa (Acessibility)	143
4.5.3.	Pembangunan Amenitas Wisata Kabupaten Mamasa (Amenities)	152
4.6	Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Sulawesi Barat	157 169
BAB V PENUTUP		169
5.1.	Kesimpulan	171
5.2.	Saran	172
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Mamasa tahun 2011-2015	4
Tabel 2.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2015	5
Tabel 3.	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Mamasa tahun 2016	52
Tabel 4.	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Mamasa	53
Tabel 5.	Posisi dan Tinggi Wilayah di atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa	55
Tabel 6.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2010, 2014 dan 2015	59
Tabel 7.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2015	60
Tabel 8.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di	61

Kabupaten Mamasa tahun 2015

Tabel 9.	Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamasa tahun 2015	62
Tabel 10.	Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamasa	63
Tabel 11.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Mamasa	113
Tabel 12.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Tawalian	115
Tabel 13.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Sesenapadang	117
Tabel 14.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Balla	1178
Tabel 15.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Tanduk Kalua'	120

Tabel 16.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Sumarorong	121
Tabel 17.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Messawa	123
Tabel 18.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Rantebulahan Timur	124
Tabel 19.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Mehalaan	125
Tabel 20.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Mambi	126
Tabel 21.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Bambang	126
Tabel 22.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Aralle	128
Tabel 23.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Buntumalangka	129

Tabel 24.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Tabulahan	130
Tabel 25.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Tabang	132
Tabel 26.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Pana'	133
Tabel 27.	Skor Evaluasi Potensi Daya Tarik Wisata di Kecamatan Nosu	134
Tabel 28.	Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa tahun 2017	148
Tabel 29.	Register PAD di sektor Pariwisata Kabupaten Mamasa dari tahun 2013-2016.	149

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Skema Kerangka Pikir Peneltitian	40
Gambar 2.	Peta Administrasi Kabupaten Mamasa	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Peraturan Perundang-Undangan

Lampiran 3. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

Lampiran 4. Rencana Kerja SKPD tahun 2017 Dinas Pariwisata

Kabupaten Mamasa tahun 2016

Lampiran 5. Register Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lampiran 6. Hasil Identifikasi Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamasa tahun

2015

Lampiran 7. Peta Wisata Kabupaten Mamasa

Lampiran 8. Dokumentasi



## INTISARI

Beatrix Masturi, Nomor Induk Mahasiswa E12113329, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun Skripsi dengan judul Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Perwujudan Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat, di bimbing oleh Bapak Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan Kepariwisata di Kabupaten Mamasa serta bagaimana pola kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta dan Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai daerah destinasi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Kepariwisata di Kabupaten Mamasa dilihat melalui Pembangunan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas wisata. Upaya tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal karena masih ada beberapa kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurang memadainya infrastruktur, dan minimnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Mamasa. *Kedua*, Pola Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat belum berjalan dengan baik. Pada dasarnya baik itu Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun Masyarakat belum memahami dengan benar esensi kemitraan dan tujuan dari kemitraan itu bagi proses pembangunan Kepariwisata. Penyebabnya antara lain, yakni masih terdapat ego sektoral, rendahnya pemahaman, dan tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini mempengaruhi proses pembangunan dan perwujudan Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Sulawesi Barat.

Kata Kunci : Pola Kemitraan, Pembangunan, Destinasi Pariwisata.

## ABSTRACT

Beatrix Masturi. E12113329. The Study Program Of Government Science. Faculty Of Social Science and Political Science Hasanuddin University Essay with the title Partnership Pattern of Local Government, Privat Sector, and Society in Realization of Mamasa as a Tourism Destination in West Sulawesi. First Supervisor Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si and Second Supervisor Dr. A. M. Rusli, M.Si.

The objectives of this research are knowing the effort of Local Government in developing tourism in Mamasa Regency, and how the Partnership Pattern of Local Government, Privat Sector, and Society in realization of Mamasa as a Tourism Destination in West Sulawesi. To achieve the objectives, writer used qualitative descriptive analysis. The writer collected the data by observation, interview, reading some document and files which are relevant with this study.

Result of research shows that *First*, the effort of Local Government to develop tourism in Mamasa Regency seen through Development of Tourism Attraction, Tourism Accessibility and Tourism Amenities. Although in the implementation does not work maximally because of budget limitation, Inadequate Infrastructure, and lack of regulation tourism in Mamasa Regency. *Second*, Partnership Pattern between Tourism Stakeholders that are Local Government, Private Sector, and Society in realization Mamasa as a Tourism Destination in West Sulawesi does not optimally either. Basically, even Local Government, Privat Sector, and the Society do not understand correctly the essence of Partnership and the goal of it for tourism development. The cause of the problem are there's ego sectoral, low understanding, and there is no rule of law that regulates about it. This is affects the development process and the realization of Mamasa as a Tourism Destination in West Sulawesi

Keyword : Partnership Pattern, Development, Tourism Destination

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka Pemerintah selaku pelayan publik merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam mewujudkan .

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Ryaas Rasyid<sup>1</sup> membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Pada fungsi pembangunan, Pemerintah diharapkan mampu menyejahterakan rakyatnya melalui pembangunan fisik maupun non-fisik dengan sasaran-sasaran yang jelas di segala aspek kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 34

Salah satu sektor yang potensial dan dipandang memiliki prospek yang cerah dalam pembangunan di Indonesia adalah Sektor Pariwisata. Sektor ini dapat memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah dan diakui sebagai sektor yang menjanjikan oleh UNWTO (*The United Nation World Tourism Organization*). Setiap daerah yang tersebar di wilayah Indonesia memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing yang dapat menjadi nilai jual yang tinggi khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, Pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah<sup>2</sup> bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan tentunya dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut, salah satunya dengan memberikan dukungan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 yang menetapkan

---

<sup>2</sup> Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Sulawesi Barat mengingat Kabupaten Mamasa merupakan wilayah pegunungan yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial dalam pembangunan di sektor kepariwisataannya.

Hal ini pun kemudian menjadi salah satu misi Kabupaten Mamasa yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mamasa tahun 2013-2018 yaitu mewujudkan Mamasa sebagai daerah tujuan wisata atau *tourism destination*. Dengan harapan, bahwa Mamasa dapat menjadi daerah yang unggul di bidang kepariwisataannya, dapat menarik perhatian banyak wisatawan untuk berkunjung dan pada akhirnya akan memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamasa.

Realitas bahwa Kabupaten Mamasa memiliki potensi daya tarik wisata baik itu alam maupun budaya yang terbilang cukup banyak dan tersebar di setiap wilayah kecamatan, tentu dapat menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat apabila dikembangkan secara maksimal dan profesional. Akan tetapi, sampai saat ini potensi-potensi wisata yang ada belum seluruhnya disentuh dan dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. Dari sekian banyak daya tarik wisata yang potensial di Kabupaten Mamasa, hanya tercantum 15 objek

wisata yang telah dikenakan tarif retribusi dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 20 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Hal ini berimplikasi pada jumlah kunjungan wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Mamasa yang disajikan dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut ini.

**Tabel 1. Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Mamasa Tahun 2011-2015**

Wisatawan	Tahun					Jumlah
	2011	2012	2013	2014	2015	
Mancanegara	190	-	-	38	23	251
Domestik	6881	7934	8138	2773	5786	31512
Jumlah	7071	7934	8138	2811	5809	31763

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa 2016

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamasa dari tahun 2011-2015 tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan cenderung mengalami pasang-surut (fluktuasi). Kemudian disajikan pula dalam tabel 2, data jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamasa pada tahun 2014-2015 tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kabupaten lainnya dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan yang telah ditetapkan menjadi destinasi Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamasa.



**Tabel 2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik menurut Kabupaten di Provinsi**

KABUPATEN	WISATAWAN			
	2014		2015	
	MANCANEGARA	DOMESTIK	MANCANEGARA	DOMESTIK
MAMASA	<b>38</b>	<b>2773</b>	<b>23</b>	<b>5786</b>
MAJENE	27	12 100	21	34 510
POLMAN	61	152 173	98	184 585
MAMUJU	0	37 144	9	21 919
MATRA	-	-	-	-
MATENG	-	-	-	-

**Sulawesi Barat tahun 2014-2015**

**Keterangan: tanda (-) berarti belum ada data/ Sumber:BPS Kabupaten Mamasa 2016**

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pariwisata di suatu daerah dapat dilihat pada pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Semakin menarik dan indah kepariwisataan suatu daerah, maka semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut, dan semakin meningkat pula pendapatan daerah dan perekonomian masyarakatnya.

Sekalipun kontribusi Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Mamasa mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melebihi target yang diberikan, akan tetapi sektor ini belum mampu menjadi sektor utama yang berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian



masyarakat di Kabupaten Mamasa. Hal tersebut berarti Pembangunan Pariwisata belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Mamasa.

Pariwisata memang merupakan sektor yang multidimensi. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam upaya membangun dan mengembangkan Kepariwisata di suatu daerah, bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah saja tetapi menjadi tanggungjawab seluruh *Stakeholders* yang ada. Dalam konsep manajemen kepariwisataan, ada tiga pilar yang menjadi motor penggerak dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan, yaitu Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat. Kesinergisan peran antara ketiga *Stakeholders* tersebut sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan konsep *Good Governance*, yang mana dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi di dominasi oleh satu pihak (Pemerintah). Tetapi lebih menggambarkan adanya pola kerjasama yang baik antar elemen yang ada, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah bila melaksanakan pembangunan secara sepihak.

Perbandingan sistem pembangunan kepariwisataan di beberapa daerah di Indonesia yang lebih maju di bidang kepariwisataan seperti Bali, Yogyakarta, dan Tana Toraja menerapkan hubungan kerjasama (kemitraan) yang baik antara Pemerintah Daerah, pihak Swasta dan Masyarakat dalam pembangunan kepariwisataannya. Dapat dilihat,

sebagai contoh pada Provinsi Bali, yang merupakan salah satu destinasi Pariwisata terbaik di dunia. Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan akses seluas-luasnya bagi investor-investor untuk mengembangkan objek wisata, fasilitas-fasilitas wisata yang ada di Bali sehingga pembangunan Kepariwisata dapat berjalan dengan baik. Kemudian, masyarakat Bali pun merupakan masyarakat yang sadar wisata, melindungi dan melestarikan aset-aset kebudayaan dan kekayaan alamnya yang berpotensi sebagai daya tarik wisata.

Berdasarkan realitas dan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pembangunan kepariwisataan yang ada Kabupaten Mamasa dan bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh para stakeholders yaitu Pemerintah daerah, Swasta, dan Masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Sulawesi Barat. Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian terkait Pembangunan Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Unggulan perlu diperdalam melalui penelitian yang berjudul **“Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Perwujudan Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat”**.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Sektor Pariwisata dinilai sangat potensial untuk berkembang dan diakui sebagai sektor andalan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Mamasa. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk memberikan batasan dalam proses penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Mamasa?
2. Bagaimana pola kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Daerah dengan Swasta dan Masyarakat dalam mewujudkan Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa.
2. Mengetahui dan menggambarkan pola kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam mewujudkan Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
2. Manfaat praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan sektor Pariwisata dan perekonomian masyarakat.
3. Manfaat metodologis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada.

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Pembangunan dan Pembangunan Daerah

Istilah pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas. Alasan untuk mengatakan demikian dikarenakan pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan, meskipun dengan skala prioritas yang berbeda dari suatu negara dengan negara lain.

Dalam konteks luas tersebut, Menurut Afifuddin pembangunan mengandung pengertian:<sup>3</sup>

“**Pertama**, Pembangunan merupakan suatu proses. Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan. **Kedua**, Pembangunan adalah perubahan. Perubahan

---

<sup>3</sup> WS Padang, diakses dari <https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25944/5/Chapter%20I.pdf>, pada tanggal 21 November 2016

dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan segi kehidupan dan bukan sekedar meningkat taraf hidupnya, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan lainnya, misalnya peningkatan di bidang ekonomi, sosial dan politik, dan sebagainya. **Ketiga**, Pembangunan adalah pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang, cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Karena suatu negara dipandang sebagai suatu organisme, maka logis pulalah apabila pertumbuhan itu diperlakukan sebagai bagian yang mutlak dari pengertian pembangunan. **Keempat**, Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi dan kekuatan. Satu kondisi ideal yang merupakan sasaran pembangunan adalah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. **Kelima**, Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi yang dilakukan secara terencana, baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatankegiatan perencanaan. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan. Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang, mengenai apa yang akan dilakukan, Bilamana akan dilakukan, Dan siapa yang akan melakukan. **Keenam**, Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa. Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negarnegara modern di dunia baik yang sudah maju atau pun yang sedang berkembang adalah : keadilan sosial, kemakmuran yang merata, perlakuan sama di mata hukum, kesejahteraan material dan spiritual, kebahagiaan untuk semua, ketentraman dan keamanan. Semuanya dapat disimpulkan menjadi kebahagiaan lahir batin, Akan tetapi kenyataan menunjukkan

bahwa keadaan kebahagiaan lahir batin tersebut tidak akan pernah tercapai, berarti bahwa selama satu negara atau bangsa ada, selama itu pulalah ia terus melakukan kegiatan pembangunan.

Mengenai definisi pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.<sup>4</sup> Menurut Effendi (2002:2), pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”.

Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan, dan diversifikasi.<sup>5</sup> Selanjutnya, Todaro mengutip pendapat Goulet (1971) dan tokoh-tokoh lainnya yang mengatakan bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 87

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 88

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 94-97

(1) *Kecukupan (sustenance)*, yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan dasar (makanan), melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. (2) *Jati diri (self-esteem)*, yaitu adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan dan mengerjakan sesuatu. (3) *Kebebasan (freedom)*, yaitu kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri (otonom) dan demokratis.

Pembangunan daerah yang dikemukakan oleh Lincoln Arsyad<sup>7</sup>, adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan ekonomi daerah tersebut.

Lebih lanjut, Lincoln Arsyad<sup>8</sup> mengemukakan bahwa manajemen pembangunan daerah bisa dianggap sebagai pengelolaan untuk memperbaiki sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya – sumber daya secara bertanggung jawab.

Paradigma baru pembangunan daerah sangat mengandalkan adanya potensi penduduk setempat sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya perusahaan yang berdiri, tetapi seberapa besar angkatan kerja di lingkungan sekitar yang berhasil diserap oleh kegiatan pembangunan. Selain itu, pertimbangan keberhasilan bukan terletak pada seberapa besar banyak aset fisik yang

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 176

<sup>8</sup> Ibid.



dimiliki melainkan pada kualitas lingkungan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan konsep Pembangunan tersebut dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pembangunan merupakan proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Esensi dari pembangunan adalah adanya perubahan dari kondisi yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi (adanya peningkatan kualitas hidup). Selanjutnya, Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. *Outcomenya* hanya satu yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## **2.1.2. Kemitraan dan Pola Kemitraan**

### **2.1.2.1. Kemitraan**

Secara Harafiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kemitraan berasal dari kata Mitra yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, dan atau rekan. Jika diberi imbuhan “ke-an”, maka menjadi kata Kemitraan yang artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 177

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak terdapat seseorang yang bisa hidup sendiri, dan terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu<sup>10</sup>. Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama, tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai.

Menurut Sulistyani, kemitraan dalam perspektif etimologis diadaptasi dari kata *Partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, yang berarti “pasangan, jodoh, sekutu, atau komponen”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 29

belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>11</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sumarto bahwa *partnership* adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.<sup>12</sup>

Sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama
- c. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
- d. Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

---

<sup>11</sup> Marsiatanti, Dyah Yusi, *Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah* Universitas Brawijaya, (Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan, 2011)

<sup>12</sup> Sumarto, Hetifah Sj, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm.116

<sup>13</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Adapun dasar pertimbangan diperlukannya kerjasama kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta menurut Utomo (2004) mencakup tiga hal yaitu :

1. Alasan politis yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya *good governance*.
2. Alasan administratif yaitu adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, asset, dan kemampuan manajemen.
3. Alasan ekonomis yakni mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi resiko.

Atas dasar ketiga alasan tersebut di atas maka konsep kerjasama kemitraan yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan di daerah.<sup>14</sup>

#### **2.1.2.2. Pola Kemitraan**

Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan, dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya.

---

<sup>14</sup> Tri Widodo W. Utomo, *Materi Diklat Manajemen Pemerintahan : Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah*. LAN RI, diakses dari

Pembinaan kemitraan tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang berlaku di suatu wilayah, oleh karena itu dukungan kebijaksanaan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan usaha dan ditunjang operasionalisasi yang baik seperti penjabaran pelaksanaan kemitraan melalui kontrak kerjasama kemitraan dan secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Pola kemitraan menurut Sulistiyani diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut:<sup>15</sup>

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

---

<sup>15</sup> Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, 2004, hlm 130-131

### 3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

### 2.1.3. Pariwisata, Kepariwisataan, dan Destinasi Pariwisata

#### 2.1.3.1. Pariwisata

Bila dilihat dari segi etimologis Pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi Pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. *The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme* (AIEST) dalam Suwarjoko (2007), mendefenisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan pertinggalan (*stay*) para pendatang, namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap. Hal yang sama diungkapkan oleh Kodyat (2001) bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari

keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Wahab (2003) bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektorsektor produktivitas lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, menyatakan bahwa :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarikwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata memiliki berbagai macam bentuk kegiatan wisata yang dapat disesuaikan dengan minat ataupun kebutuhan wisatawan. Kegiatan wisata yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang mendatangkan manfaat tersendiri bagi masing-masing wisatawan. Menurut Suwantoro (2004) terdapat beberapa macam perjalanan wisata bila ditinjau dari berbagai macam segi, yaitu :

1. Dari segi jumlahnya, wisatawan dibedakan atas:

- a) Individual Tour (wisatawan perorangan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami-isteri.
- b) Family Group Tour (wisata keluarga), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
- c) Group Tour (wisata rombongan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan anggotanya. Biasanya paling sedikit 10 orang, dengan dilengkapi diskon dari perusahaan principal bagi orang yang kesebelas. Potongan ini berkisar antara 25 hingga 50 % dari ongkos penginapan atau penerbangan.

2. Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas:

- a) Pra-arranged Tour (wisata berencana), yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi maupun objek-objek yang akan dikunjungi.
- b) Package Tour (paket wisata), yaitu perusahaan Biro Perjalanan Wisata yang telah bekerja sama menyelenggarakan paket wisata yang mencakup biaya perjalanan, hotel, ataupun fasilitas lainnya yang merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun guna



memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata.

- c) Coach Tour (wisata dipimpin), yaitu suatu paket perjalanan ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang dilakukan secara rutin, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan yang tertentu pula.
- d) Special Arranged Tour (wisata khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai keinginannya.
- e) Optional Tour (wisata tambahan), yaitu suatu perjalanan wisata tambahan di luar pengaturan yang telah disusun dan diperjanjikanpelaksanaannya, yang dilakukan atas permintaan pelanggan.

3. Dari segi maksud dan tujuan, wisata dibedakan atas:

- a. Holiday Tour (wisata liburan), yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenangsenang, dan menghibur diri.
- b. Familiarization Tour (wisata pengenalan), yaitu suatu perjalanan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaanya.

- c. Educational Tour (wisata pendidikan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya.
- d. Scientific Tour (wisata pengetahuan), yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
- e. Pilgrimage Tour (wisata keagamaan), yaitu perjalanan wisata yang dimaksudkan guna melakukan ibadah keagamaan.
- f. Special Mission Tour (wisata kunjungan khusus), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan maksud khusus, misalnya misi dagang, kesenian, dan lain-lain.
- g. Hunting Tour (wisata perburuan), yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata.

3. Dari segi penyelenggarannya, wisata dibedakan atas:

- a) Ekskursi (Excursion), yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek wisata.
- b) Safari Tour, yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus

yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan objek wisata pada umumnya.

- c) Cruise Tour, yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar mengunjungi objek-objek wisata bahari dan objek wisata di darat dengan menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya.
- d) Youth Tour (wisata remaja), yaitu kunjungan wisata yang diselenggarakan khusus bagi para remaja menurut golongan umur yang ditetapkan negara masing-masing.
- e) Marine Tour (wisata bahari), yaitu suatu kunjung ke objek wisata khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan wreck-diving (menyelam) dengan perlengkapan selam lengkap.

#### **2.1.3.2. Kepariwisataan**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1, Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Dalam kepariwisataan, menurut Leiper dalam Ismayati (2009), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

### 1. Wisatawan

Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

### 2. Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tugas area geografi, seperti berikut ini :

- a) Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
- b) Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan Hongkong

berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.

c) Daerah Tujuan Wisata (DWT), daerah ini sering dikatakan sebagai *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. Di DWT ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DWT merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DWT juga merupakan *raison d'être* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

### 3. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan. Penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif,

asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.

b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

c. Tujuan kepariwisataan meliputi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Menghapus kemiskinan
4. Mengatasi pengangguran
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Memajukan kebudayaan
7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
10. Mempererat persahabatan antar bangsa

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu

daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Suatu obyek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung, yaitu :

- a. Something to see* adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut.
- b. Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana.
- c. Something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh (Yoeti, 1985, p.164).

#### **2.1.3.3. Destinasi Pariwisata**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ditentukan bahwa Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Perkembangan suatu kawasan wisata juga tergantung pada apa yang dimiliki kawasan tersebut untuk dapat ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peranan para pengelola kawasan wisata. Yoeti (1996) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya industri sangat tergantung pada tiga A (3A), yaitu atraksi (*attraction*), keterjangkauan (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

Atraksi wisata yaitu sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dinikmati dan yang termasuk dalam hal ini adalah tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain. *Tourism* disebut *attractive spontance*, yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata.

Aksesibilitas (*accessibility*), adalah aktifitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam aksesibilitas adalah transportasi sehingga jarak menjadi dekat. Selain transportasi, yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan



sarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi optimal.

Fasilitas (*amenties*), adalah pariwisata tidak akan terpisah dengan akomodasi perhotelan. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata yaitu akomodasi penginapan, restoran, air bersih, komunikasi, hiburan, dan keamanan.

#### **2.1.4. Aktor yang berperan dalam pembangunan Kepariwisata**

*Good governance* adalah sebuah gambaran ideal tentang bagaimana mengelola negara dan aspek-aspek terkait lain yang ada di dalamnya. Untuk mewujudkan *good governance*, diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan handal, yakni manajemen yang kondusif, responsif dan adaptif. Untuk dapat dikatakan sebagai *good governance*, maka tidak boleh ada satu pihak yang memegang kontrol penuh atas semuanya, sehingga tercipta keseimbangan antar para *stakeholders* dengan memegang prinsip-prinsip dasar.

Dalam sistem Kepariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum insan pariwisata

dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) Pemerintah, (2) Swasta, (3) Masyarakat.

#### **2.1.4.1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Pemerintahan adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>16</sup>

Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. "Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut."<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nurman, op. cit., hlm. 55

<sup>17</sup> Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 4

Pemerintah di Indonesia, dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga dikatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melakukan otonomi daerah perlu adanya asas yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
- 3) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.<sup>18</sup>

Menurut Sarundajang *local government* di masa depan paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Pemerintah daerah yang bercorak wirausaha

Suatu pemerintahan yang memanfaatkan ketiga komponen sumberdaya : pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

2. Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik

Akuntabilitas yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban pemerintah daerah dengan segenap unsur birokrasinya dalam memberikan

---

<sup>18</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*,. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 83.

<sup>19</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1999), hlm 228-237

pertanggungjawaban kepada masyarakat menyangkut berbagai kegiatan pemerintah, termasuk kinerjanya dalam pelayanan publik.

### 3. Pemerintah daerah yang bercirikan pemerintahan yang baik

Secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

### 4. Transparansi dalam pemerintahan daerah

Transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.

Adapun Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan Kepariwisataannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataannya adalah, sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Selanjutnya, juga diatur pada pasal 30 Undang-Undang Kepariwisata mengenai wewenang Pemerintah kabupaten/kota dalam hal kepariwisataan, yaitu:

- a) Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b) Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c) Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d) Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e) Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f) Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g) Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h) Menyenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i) Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j) Menyenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- k) Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

#### **2.1.4.2. Swasta**

Swasta dalam [ekonomi](#) suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh [pemerintah](#). Organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain [perusahaan](#), korporasi, [bank](#), dan [organisasi non-pemerintah](#) lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai peluang untuk perbaikan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal kepariwisataan, setiap pengusaha pariwisata memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata, yaitu:

- a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c) Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d) Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e) Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f) Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g) Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i) Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j) Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k) Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l) Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m) Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai harapan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **2.1.4.3. Masyarakat**

Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu: (1) manusia hidup bersama, (2) bercampur atau bersama-sama untuk jangka waktu yang cukup lama, (3) menyadari bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, (4) mematuhi norma-norma peraturan yang menjadi kesepakatan bersama, (5) menyadari bahwa mereka bersama-sama diikat oleh perasaan diantara para anggota satu dengan yang lainnya, (6) menghasilkan kebudayaan tertentu (Abdulsyani, 2002: 32).

Menurut Koentjaraningrat (1996:131), masyarakat didefinisikan sebagai berikut: merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Melihat definisi tersebut di atas, maka tidak semua kesatuan manusia yang saling berinteraksi merupakan masyarakat. Oleh karena masyarakat harus memiliki ikatan/persyaratan khusus seperti tersebut di atas, maka makin besar dan kompleks masyarakat, makin banyak jumlah kelompok dan perkumpulan yang ada di dalamnya. Koentjaraningrat juga mengistilahkan masyarakat sebagai komunitas. Sifat dari komunitas adalah adanya wilayah, cinta (keterikatan) terhadap wilayah, serta keterikatan itu merupakan dasar dari perasaan patriotisme, nasionalisme dan lain-lain.

Setiap orang (masyarakat) berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Setiap orang (masyarakat) berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

## **2.2. Kerangka Pikir Penelitian**

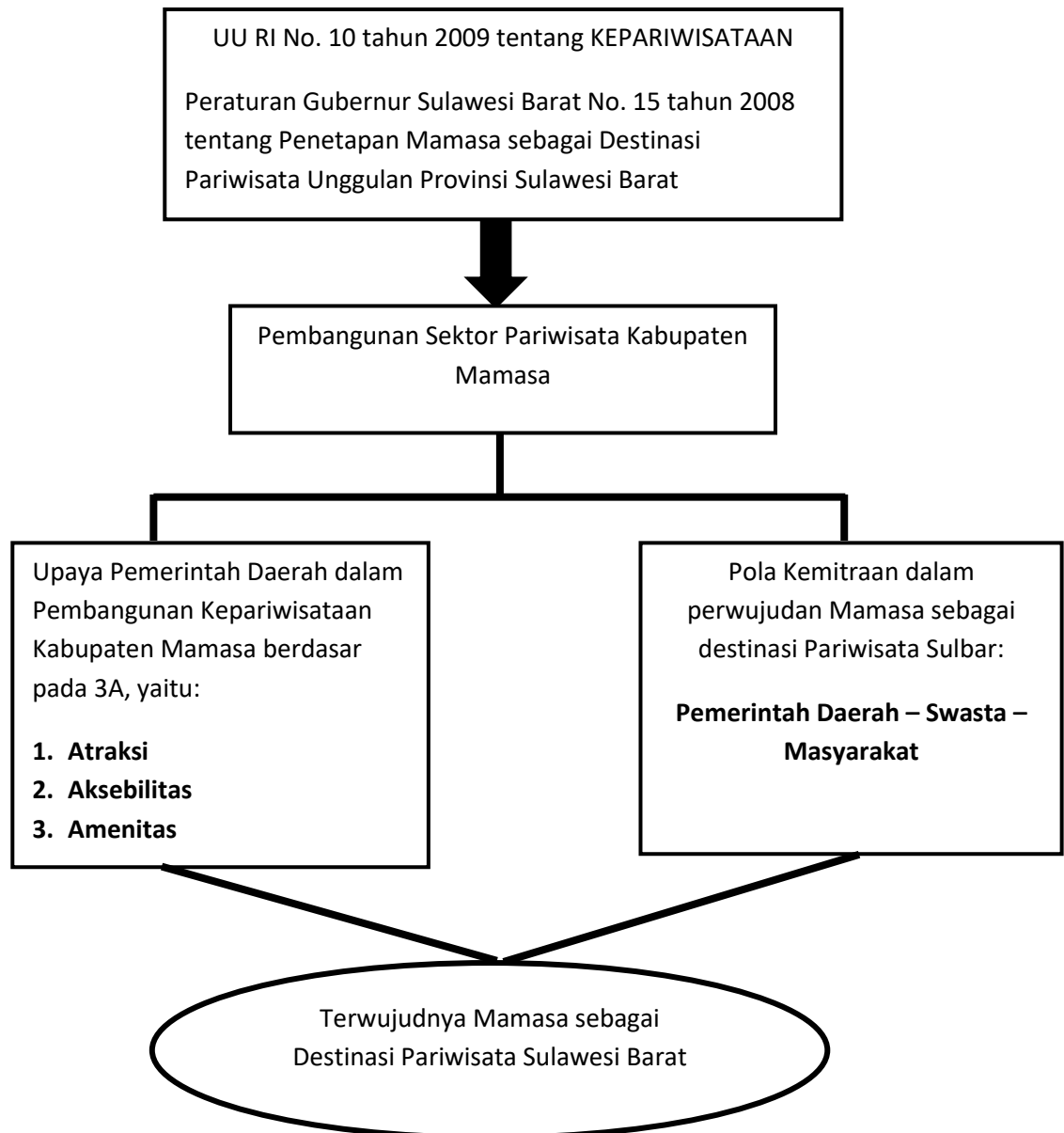
Melaksanakan pembangunan dalam lingkup nasional maupun daerah merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan negara. Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala potensi yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dalam perspektif pembangunan. Hal ini dikarenakan sektor Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Mengingat banyaknya potensi sumber daya alam serta kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengamanatkan agar sumber daya dan modal kepariwisataan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik

wisata dan destinasi di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Depbudpar, 2009).

Kabupaten Mamasa yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang sangat potensial di bidang Kepariwisataannya. Melihat kenyataan ini, berdasarkan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menetapkan Mamasa sebagai destinasi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 15 tahun 2008. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam membangun Kepariwisataannya agar dapat menjadi destinasi Pariwisata yang menarik dan diminati oleh wisatawan yang pada akhirnya akan memberi dampak positif pada perekonomian rakyat Kabupaten Mamasa. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Mamasa yaitu potensi wisata yang beragam di Kabupaten Mamasa masih belum seluruhnya disentuh dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat belum dapat merasakan dampak positif dari pariwisata secara merata. Sekalipun PAD yang diperoleh dari Pariwisata meningkat setiap tahun, akan tetapi belum merupakan sektor utama yang berkontribusi dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Mamasa. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam membangun Kepariwisataan Kabupaten Mamasa. Hal ini dapat dilihat dari 3 aspek yang disebut dengan 3A, yaitu Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Pariwisata.

Idealnya, dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Begitupun halnya dalam sistem manajemen kepariwisataan, bahwa dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan suatu daerah ada 3 pilar utama yang menjadi aktor penting, yakni pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Maka dari itu, pola kemitraan yang sinergi antar ketiga pilar ini merupakan kekuatan yang kuat dalam pembangunan kepariwisataan. Berikut gambaran singkat pola kemitraan Pemerintah Daerah, sektor Swasta, dan Masyarakat dalam perwujudan Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Sulawesi Barat.

**Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dan yang menjadi titik pengambilan data penelitian yaitu Dinas Pariwisata dan beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Mamasa.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penjabaran deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam perwujudan Mamasa sebagai daerah Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang

diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti berkunjung dan mengamati secara langsung beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Mamasa.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan.
- c. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan penelusuran literatur yang berupa buku, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **3.4. Informan Penelitian**

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

1. Bupati Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Badawi, MH
2. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa, Bapak David Bambalayuk, ST, M.Si
3. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Ibu Agusthina Toding, S.Pd, M.Pd
4. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Bapak Sugiono, S.Pd dan staf.
5. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Bapak Arvin Ival Putera, S.Sos
6. Tokoh Masyarakat dan masyarakat sekitar kawasan tempat wisata di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa
7. Beberapa pelaku usaha wisata / pengelola objek wisata antara lain pada objek wisata Air terjun Liawan, Air Panas Rante-Rante, Air panas Nusantara Kabupaten Mamasa.
8. Salah satu Tourist Guide Kabupaten Mamasa, Bapak Demianus
9. Pengguna layanan wisata / wisatawan, para pengunjung objek wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara.



### **3.5. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder :

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, antara lain adalah Para penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Mamasa yang terkait dengan kepariwisataan, Bupati, Ketua Komisi III DPRD, Aparat Pemerintah di Dinas Pariwisata, Para tokoh yang berkompeten di bidang Pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pergub, Undang-Undang, RIPPARDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata) Kabupaten Mamasa, Dokumen-Dokumen dan Arsip dari dinas Pariwisata yang relevan dengan penelitian.

### 3.6. Definisi Konsep

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni :

1. Destinasi Pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
2. Atraksi adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata. Hal ini yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat dan dinikmati oleh para wisatawan. Atraksi wisata (*Attraction*) dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Obyek wisata (*site-attraction*) dan Event wisata (*Attraction*). Lebih lanjut, Obyek wisata dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Obyek wisata alam yang merupakan ciptaan Tuhan (*Natural-site attraction*) dan Obyek wisata karya manusia (*Man-made site Attraction*). Event wisata juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Atraksi Asli (*real, authentic*) dan Atraksi Pentas (*staged*).

3. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau sulitnya lokasi suatu tempat dicapai melalui jaringan transportasi. Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada sarana prasarana transportasi karena faktor jarak dan kenyamanan di perjalanan sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Selain transportasi, yang berkaitan dengan aksesibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain.
4. Amenitas adalah merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan fasilitas pariwisata yaitu akomodasi penginapan, restoran, air bersih, komunikasi, dan keamanan.
5. Pola Kemitraan adalah bentuk hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.) Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat, b.) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama, c.) Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam memberikan

efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, d.) Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan begitu, maka Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, pihak Swasta, dan Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bagaimana pola hubungan kerjasama/kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan Pariwisata dalam perwujudan Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dengan menganalisis peran masing-masing aktor dalam upaya mendukung pembangunan Pariwisata di Kabupaten Mamasa.

6. Pola kemitraan menurut Sulistiyan diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut:

- a) *Pseudo partnership atau kemitraan semu* yaitu sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya.
- b) *Kemitraan mutualistik* yaitu persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

c) *Kemitraan Konjugasi* yaitu kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

7. Pemerintah Daerah yang dimaksud yakni Bupati Mamasa beserta SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa yang memiliki peran dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa, serta Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa yang membidangi Kepariwisata.
8. Pihak swasta yang dimaksudkan adalah para pelaku usaha pariwisata non pemerintah yang telah membuat usaha di wilayah objek wisata.
9. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat umum yang ada pada daerah destinasi, yaitu masyarakat Kabupaten Mamasa secara umum dan masyarakat yang tinggal sekitar wilayah objek wisata secara khusus termasuk masyarakat yang merupakan pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal

pariwisata karena mereka yang paling mengerti dengan kebudayaan setempat. Dimasukkan pula kedalam kelompok masyarakat ini yaitu tokoh-tokoh masyarakat, para intelektual berkompeten di bidang Pariwisata.

### **3.7. Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian beserta hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menggambarkan secara umum Kabupaten Mamasa yang meliputi sejarah, kondisi geografis, aspek-aspek pendukung lainnya seperti potensi sumber daya alam dan hayati, aspek sosial serta gambaran umum Dinas Pariwisata yang merupakan perangkat daerah yang membidangi sektor kepariwisataan. Selain itu, bab ini juga menguraikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun kepariwisataan Kabupaten Mamasa dan bagaimana hubungan kerjasama / pola kemitraan yang dilaksanakan pemerintah daerah, dengan pihak swasta dan masyarakat kabupaten Mamasa dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat.

#### **4.1. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa**

##### **4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mamasa**

Memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri NIT (Negara Indonesia Timur) pada tanggal 17 Juli 1947 No. : BZ.2/1/17 di Mamasa diadakan serangkaian rapat yang diikuti para Kepala Distrik (Parengnge') dan Tokoh-Tokoh Masyarakat se-Onderafdeling Boven Binuang en Pitu Ulunna Salu. Rapat ini menjajaki kemungkinan dibentuknya suatu New Swapraja untuk daerah tersebut.

Dalam suatu rapat akbar di Mamasa pada tanggal 07 Juni 1948, setelah melalui perdebatan alot dan cukup lama yang dipimpin langsung Residen Celebes dari Makassar pada saat itu, maka ditetapkan nama Swapraja baru tersebut yaitu "Swapraja Kondosapata' dengan ibukotanya di Mamasa".

Pada tahun 1953 NIT ternyata dibubarkan berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan pada saat itu, Swapraja Kondosapata' juga ikut bubar. Selanjutnya terbentuk Kewedanaan Mamasa yang periodenya berlangsung hingga tahun 1958. Pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa terbentuk. Seharusnya Kewedanaan Mamasa sudah menjadi Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa pada saat itu setara dengan Kewedanaan Mamuju, Kewedanaan Majene yang sudah menjadi Kabupten tersendiri, namun kenyataannya Kewedanaan Mamasa digabung dengan Kewedanaan Polewali menjadi Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa disingkat Kabupaten Polmas. Hal ini terjadi karena pada masa perubahan status Kewedanaan menjadi Kabupaten Daerah Tk. II pada tahun 1958, terjadi suatu masalah ke dalam antara Kewedanaan Polewali dan Kewedanaan Mamasa. Masalah ini memuncak pada tanggal 31 Agustus 1958, Kewedanaan Mamasa dikosongkan oleh petugas keamanan atas perintah atasannya di Polewali. Selain petugas keamanan yang meninggalkan Kewedanaan Mamasa, ikut pula pemerintahan sipil hijrah ke Polewali, sejak saat itulah hubungan



Kewedanaan Mamasa dan Kewedanaan Polewali terputus total, baik lalulintas maupun pemerintahan, terlebih komunikasi. Pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, hubungan ke Mamasa masih terputus dan Kewedanaan Mamasa tidak memiliki pengetahuan tentang terbentuknya Kabupaten Polewali Mamasa. Hubungan Polewali dan Mamasa baru mulai terbuka kembali pada tahun 1961 ketika itu Bupati Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa yang pertama memerintah yaitu Andi Hasan Mangga.

Di tahun 1962, masyarakat ex Kewedanaan Mamasa kembali menuntut Daerah Tk. II Mamasa, namun banyak hambatan sehingga prosesnya agak lambat berjalan. Atas restu Bupati KDH Tk. II Polmas Abdullah Madjid, maka terbentuklah Panitia Penuntut Kabupaten Mamasa. Berdasarkan S.K. BKDH Tk. II Polmas Nomor: 06/SK/BP/1966 Tertanggal: 17 Mei 1966 dibentuk Perwakilan Panitia Penuntut kabupaten Daerah Tk. II di Makassar dengan Ketua: Abd. Djabbar, B.A., kemudian Perwakilan di Jakarta di bawah pimpinan Urbanus Poly Bombong (Anggota DPR-GR di Jakarta mewakili Partai Kristen Indonesia dari Mamasa).

Selanjutnya berdasarkan Surat Mandat Panitia Nomor: 08/M/BP/66 Tertanggal 09 Juli 1966 yang disetujui Bupati KDH Tk.II Polmas, Kapten Infantri Abdullah Madjid, ditetapkan nama-nama delegasi yang akan berangkat di tingkat pusat dalam rangka realisasi pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa, sebagai berikut:

1. D. Tandipuang sebagai Ketua Delegasi
2. D. Pualillin sebagai Wakil Ketua Delegasi
3. J. Thumo' sebagai Anggota Delegasi
4. M. Lullulangi, B.A. sebagai Anggota Delegasi
5. Abd. Djabbar, B.A., sebagai Anggota Delegasi
6. F. Polopadang sebagai Anggota Delegasi

Sebagai realisasi di tingkat pusat, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat, menjanjikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat tetap memperhatikan tuntutan masyarakat Mamasa untuk membentuk daerah otonom Tk. II Mamasa dengan ibukotanya di Mamasa, sambil menunggu ketentua lebih lanjut.
2. Supaya BKDH Tk. II Polmas membentuk perwakilan BKDH Polmas di Mamasa untuk persiapan pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Mamasa. Berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri R.I., maka terbentuklah Perwakilan BKDH Polmas di Mamasa dengan susunan personalianya sebagai berikut:
  - Tamajoe, Bupati Muda sebagai Kepala Perwakilan,
  - S. Matasak, Penata Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan,
  - A. Paipinan, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan.

Selanjutnya berdasarkan SK BKDH Tk. II Polmas Nomor: 71/PD/1968 Tertanggal : 18 Juli 1968, personalia Perwakilan mengalami perubahan sebagai berikut:

- S. Matasak, Penata tatapraja sebagai Ketua Perwakilan,
- Y. Depparinding, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan,
- B. Mangoli', Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan,
- Y. Puatipanna, Penata Muda Tatapraja sebagai Anggota Perwakilan.

Perwakilan BKDH Tk. II Polmas berlangsung hingga tahun 1971 dengan mengalami dua kali perubahan/pergantian personalia. Akhirnya dari tahun ke tahun tidak ada realisasi, kemudian vakum tanpa dibubarkan.

Perjuangan yang sama muncul di tahun 1987, melalui surat Panitia Penuntut Daerah Tk. II Mamasa Nomor. 08/Pn/II/88 Tertanggal 19 April 1988 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I., Ketua DPR R.I., Gubernur KDH. Tk. I Sulsel, Ketua DPRD Tk. I Sulsel, Bupati KDH Polmas, Ketua DPRD Tk. II Polmas, tembusannya kepada para Menteri Kabinet R.I. terkait lainnya, namun realisasinya tidak ada.

Melalui perjalanan panjang dan berliku-liku, nampaknya masa reformasi Republik Indonesia membawa angin baik bagi ex. Kewedanaan Mamasa. Maka pada awal tahun 1999 mulai menghangat kembali tuntutan Kabupaten Mamasa dan realisasinya tertanggal 11 Maret 2002 di

mana Kabupaten Mamasa terbentuk bersamaan dengan peningkatan status Administrasi Palopo menjadi Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2002 yang diundangkan di Jakarta tanggal 07 April 2002 ketika Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang tersebut, bersamaan pula dengan 20 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia secara serempak dalam perjuangan yang sama.

#### **4.1.2. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi**

Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten yang baru terbentuk sebagai daerah otonom pada tahun 2002 dari hasil pemekaran Kabupaten Polewali-Mamasa (Polmas) berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002. Secara astronomis wilayah Kabupaten Mamasa terletak pada posisi  $2^{\circ}39'216''$  –  $3^{\circ}19'288''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}0'216''$  –  $119^{\circ}38'144''$  Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten lainnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju;

Sebelah Barat : Kabupaten Majene;

Sebelah Selatan : Kabupaten Polewali Mandar;

Sebelah Timur : Kabupaten Tana Toraja & Kabupaten Pinrang  
Provinsi Sulawesi Selatan

Secara administratif wilayah Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 Kecamatan dan 181 desa serta 13 kelurahan dengan total luas wilayah 3005,88 km<sup>2</sup>. **Tabel 3. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Mamasa Tahun 2016**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Sumarorong	254,00	8,45
2	Messawa	150,88	5,02
3	Pana	181,27	6,03
4	Nosu	113,33	3,77
5	Tabang	304,51	10,13
6	Mamasa	250,07	8,32
7	Tanduk Kalua	120,85	4,02
8	Balla	59,53	1,98
9	Sesenapadang	152,70	5,08
10	Tawalian	45,99	1,53
11	Mambi	142,66	4,75
12	Bambang	136,17	4,53
13	Rantebulahan Timur	31,87	1,06
14	Mehalaan	162,43	5,40
15	Aralle	173,96	5,79
16	Buntu Malangka	211,71	7,04
17	Tabulahan	513,95	17,10

Jumlah	3005,88	100,00
--------	---------	--------

*Sumber : Data Statistik Kabupaten Mamasa*

Berdasarkan daftar luas wilayah menurut Kecamatan yang disajikan pada tabel 3, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan yang terluas di Kabupaten Mamasa adalah Kecamatan Tabulahan dengan luas wilayah 513,95 km<sup>2</sup> dengan persentase 17,10 persen, dan wilayah tersempit yaitu terletak pada kecamatan Rantebulahan Timur dengan luas wilayah 31,87 km<sup>2</sup> (1,06 %). Sedangkan Kecamatan Mamasa yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Mamasa menempati posisi keempat terluas dengan luas wilayah 250,07 km<sup>2</sup>.

Selanjutnya, pada tabel disajikan jarak tiap Kecamatan dari Ibukota Kabupaten. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan Pana merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu 95 km, dan Kecamatan yang terdekat dari Ibukota Kabupaten adalah kecamatan Tawalian yang berjarak 3 km.

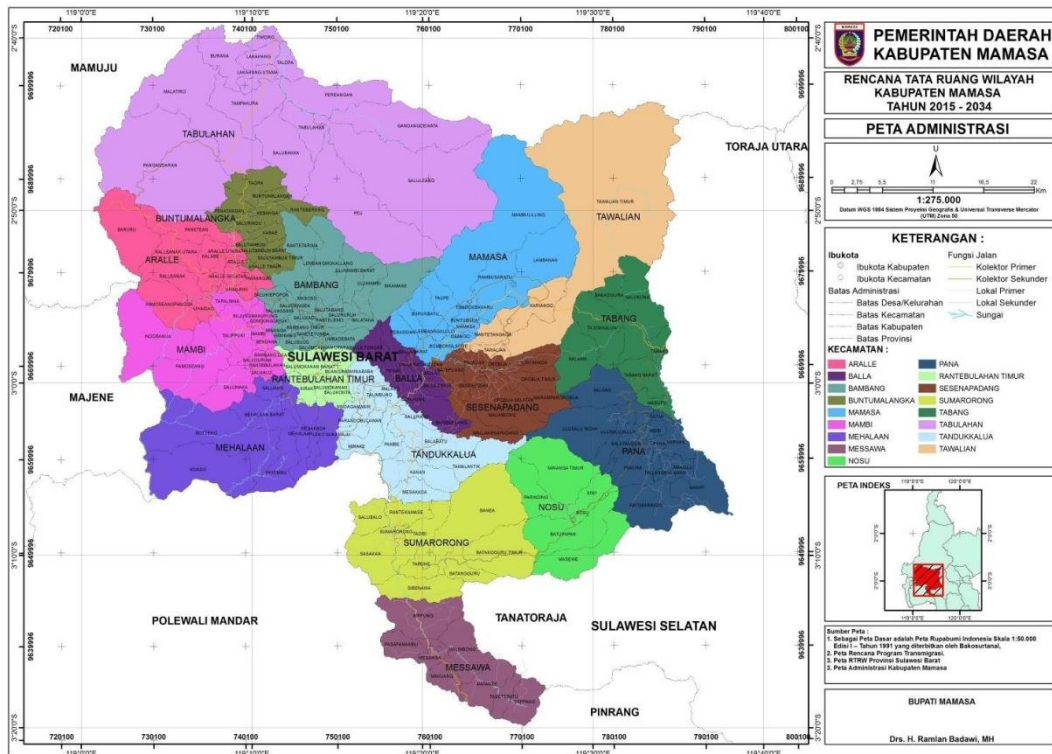
**Tabel 4. Jarak Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Mamasa**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (Km)
Sumarorong	Sumarorong	38
Messawa	Messawa	58
P a n a	P a n a	95
N o s u	N o s u	67
Tabang	Tabang	36
Mamasa	Mamasa	0
Tanduk Kalua	Minake	19
B a l l a	Balla Satanetean	14
Sesenapadang	O r o b u a	8
Tawalian	Tawalian	3
M a m b i	M a m b i	44
B a m b a n g	G a l u n g	32
Rantebulahan Timur	Salumokanan	56
Mehalaan	Mehalaan	45
A r a l l e	A r a l l e	55
Buntu Malangka	Buntu Malangka	69
Tabulahan	Lakahang	87

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa**

Pembagian wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa direpresentasikan dalam gambar berikut.

**Gambar 2. Peta Administrasi Kab Mamasa**



#### 4.1.3. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Mamasa bervariasi mulai dari dataran rendah, berbukit hingga bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal. Bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% menempati luasan terbesar yaitu 238.670 Ha (78,74%) dan terdapat pada hampir semua kecamatan. Bagian wilayah yang memiliki tingkat kemiringan 0–8% menempati areal yang terkecil yaitu hanya sekitar 2.410



Ha atau 2,41% dari total luas wilayah Kabupaten Mamasa. Posisi dan Tinggi wilayah Kabupaten Mamasa per kecamatan disajikan pada tabel 5.

**Tabel 5. Posisi dan Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa**

Kecamatan	Bujur	Lintang	Tinggi DPL(m)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumarorong	119°20'	3°10'	325 – 2.100
Messawa	119°20'	3°15'	300 – 1.750
Pana	119°35'	3°05'	325 – 2.325
Nosu	119°30'	3°10'	1.437 – 2.450
Tabang	119°30'	2°50'	700 – 2.750
Mamasa	119°25'	2°50'	1.025 – 3.000
Tanduk Kalua	119°15'	3°00'	1.050 – 2.000
Balla	119°15'	2°55'	1.100 – 1.875
Sesenapadang	119°20'	3°00'	1.300 – 2.600
Tawalian	119°25'	2°55'	1.200 – 2.275
Mambi	119°10'	3°00'	175 – 1.550
Bambang	119°15'	2°55'	950 – 1.475
Rantebulahan Timur	119°10'	3°00'	850 – 2.725
Mehalaan	*)	*)	650 – 655
Aralle	119°10'	2°50'	500 – 2.350
Buntu Malangka	*)	*)	650 – 950
Tabulahan	119°10'	2°45'	100 – 2.950

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa topografi Kabupaten Mamasa lebih didominasi oleh dataran tinggi. Dengan kekhasan wilayah dataran tinggi tersebut, maka potensi yang diunggulkan di Kabupaten Mamasa diantaranya adalah kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan air tawar, dan kepariwisataan.

#### **4.1.4. Klimatologi**

##### **a. Musim**

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Mamasa juga terdapat dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pola musim tersebut dipengaruhi oleh musim barat dan timur yang lamanya enam bulan sekali setelah mengalami masa peralihan.

##### **b. Temperatur, Kelembaban dan Suhu Udara**

Kondisi udara di Kabupaten Mamasa masih alami, bersih dan terhindar dari polusi udara. Hal ini disebabkan karena secara ekologi, wilayah Mamasa masih mempunyai wilayah hutan yang berfungsi untuk meredam dan menyerap udara kotor yang masuk ke udara. Di samping itu kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pembuangan polusi ke udara belum signifikan dapat memperburuk kondisi udara, karena luas wilayah berhutan tetap lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang dimanfaatkan. Suhu udara bervariasi menurut ketinggian tempat dan jaraknya dari pantai. Kelembaban udara relatif tinggi berkisar antara 60-

90% dan Temperatur suhu rata-rata 16-30 derajat celsius. Kondisi tersebut sangat kondusif untuk dijadikan destinasi Pariwisata.

#### **c. Curah Hujan**

Curah hujan di Kabupaten Mamasa relatif tidak merata. Curah hujan yang relatif tinggi terdapat pada musim hujan yaitu pada bulan September hingga Desember dan relatif rendah pada musim kemarau yang berlangsung pada bulan Januari hingga Agustus. Keadaan curah hujan dipantau dari beberapa stasiun pengamatan seperti pada stasiun geofisika kelas II, Dinas Pertanian, Balai Penelitian. Curah hujan rata-rata pertahun 2000 mm/tahun. Bahkan pada stasiun Rantekarua menunjukkan jumlah curah hujan diatas 4000 mm/tahun. Pada tahun 2015, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juli.

#### **4.1.5. Hidrologi**

Keadaan topografi serta ditunjang oleh iklim tropis yang basah mengakibatkan Kabupaten Mamasa menjadi sumber dari beberapa aliran sungai, diantaranya:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa yang mengalir ke wilayah Bakaru Kabupaten Pinrang;
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Masuppu yang mengalir ke wilayah Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap;

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mapilli yang mengalir ke wilayah Kabupaten Polman;
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamuju yang mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju;
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bonehau yang mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju.

#### **4.1.6. Jumlah dan Kepadatan Kependudukan**

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Penduduk Kabupaten Mamasa berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 yang disajikan dalam tabel 6 sebanyak 151.825 jiwa yang terdiri atas 76.695 jiwa penduduk laki-laki dan 75.130 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Mamasa meningkat sekitar 11.743 jiwa dari tahun 2014, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,35 persen. Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 24.766 jiwa (16,31%). Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Mehalaan sebesar 4.233 jiwa (2,78%).

Tabel 6.		Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Mamasa 2010, 2014, dan 2015				
Kecamatan		Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sumarorong	9.580	10.234	10.425	8,82	1,87
2.	Messawa	7.090	7.378	7.381	4,1	0,04
3.	P a n a	8.552	8.956	8.964	4,82	0,09
4.	N o s u	4.276	4.535	4.552	6,45	0,37
5.	Tabang	5.890	6.214	6.225	5,69	0,18
6.	Mamasa	22.541	24.184	24.766	9,87	2,41
7.	Tanduk Kalua	9.984	10.895	11.145	11,63	2,29
8.	B a l l a	6.017	6.448	6.494	7,93	0,71
9.	Sesenapadang	7.709	8.090	8.108	5,18	0,22
10.	Tawalian	6.210	7.224	7.397	19,11	2,39
11.	M a m b l	9.295	9.875	10.004	7,63	1,31
12.	Bambang	10.312	10.927	11.011	6,78	0,77
13.	Rantebulahan Timur	5.682	6.147	6.277	10,47	2,11
14.	Mehalaan	3.857	4.166	4.233	9,75	1,61
15.	A r a l l e	6.584	6.930	6.948	5,53	0,26
16.	Buntu Malangka	6.691	7.187	7.317	9,36	1,81
17.	Tabulahan	9.812	10.419	10.578	7,81	1,53
<b>Mamasa</b>		<b>140.082</b>	<b>149.809</b>	<b>151.825</b>	<b>8,38</b>	<b>1,35</b>

Sumber : Publikasi Kabupaten Mamasa Dalam Angka

Berdasarkan tabel 7, dapat pula diketahui bahwa Pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamasa 1,03 persen lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dengan angka rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 102 yang berarti bahwa diantara 100 orang perempuan terdapat 102 laki-laki.

**Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2015**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sumarorong	5 234	5 191	10 425	101
2	Messawa	3 816	3 565	7 381	107
3	P a n a	4 597	4 367	8 964	105
4	N o s u	2 383	2 169	4 552	110
5	Tabang	3 229	2 996	6 225	108
6	Mamasa	12 281	12 485	24 766	98
7	Tanduk Kalua	5 573	5 572	11 145	100
8	B a l l a	3 327	3 167	6 494	105
9	Sesenapadang	4 037	4 071	8 108	99
10	Tawalian	3 695	3 702	7 397	100
11	Mambi	5 051	4 953	10 004	102
12	Bambang	5 514	5 497	11 011	100
13	Rantebulahan Timur	3 235	3 042	6 277	106
14	Mehalaan	2 208	2 025	4 233	109
15	A r a l l e	3 462	3 486	6 948	99
16	Buntu Malangka	3 771	3 546	7 317	106
17	Tabulahan	5 282	5 296	10 578	100
Mamasa		76 695	75 130	151 825	102

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa

Rendah atau tingginya tingkat kepadatan penduduk tergantung luas wilayah dan kondisi topografi wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa tahun 2015 mencapai 51 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Rantebulahan Timur dengan kepadatan sebesar 197 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tabang sebesar 20 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 8. Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Mamasa tahun 2015**

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Sumarorong	6,87	41
2	Messawa	4,86	49
3	P a n a	5,90	49
4	N o s u	3,00	40
5	Tabang	4,10	20
6	Mamasa	16,31	99
7	Tanduk Kalua	7,34	92
8	B a l l a	4,28	109
9	Sesenapadang	5,34	53
10	Tawalian	4,87	161
11	M a m b i	6,59	70
12	Bambang	7,25	81
13	Rantebulahan Timur	4,13	197
14	Mehalaan	2,79	26

15	A r a l l e	4,58	40
16	Buntu Malangka	4,82	35
17	Tabulahan	6,97	21
Mamasa		100,00	51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa

#### 4.1.7. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Di Kabupaten Mamasa ada sebanyak 75.270 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2015, yang terdiri dari 40.816 laki-laki dan 34.454 perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam tabel 9.



**Tabel 9. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamasa tahun 2015**

Kegiatan utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	41 669	35 076	76 745
Bekerja	40 816	34 454	75 270
Pengangguran	853	622	1 475
Bukan Angkatan Kerja	9 169	15 518	24 687
Sekolah	5 646	4 912	10 558
Mengurus Rumah Tangga	1 129	8 933	10 062
Lainnya	2 394	1 673	4 067
Jumlah	50 838	50 594	101 432
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	81,96	69,33	75,66
Tingkat Pengangguran	2,05	1,77	1,92

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha sector pertanian, perkebunan, perburuan, dan perikanan, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 60.930 jiwa, atau sebanyak 81%. Data tersebut dilihat dalam tabel 10 mengenai jumlah

penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Mamasa tahun 2015.

**Tabel 10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamasa tahun 2015**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	33 669	27 261	60 930
2	215	243	458
3	841	1 953	2 794
4	3 619	4 803	8 422
5	2 472	194	2 666
Jumlah	40 816	34 454	75 270

Keterangan :

(1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (2). Industri Pengolahan (3) Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel (4) Jasa Kemasyarakatan (5) Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

#### **4.1.8. Sosial Budaya**

Penduduk masyarakat kabupaten Mamasa memiliki rasa nasionalis dan kebersamaan yang tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan membuat suatu perkumpulan/ organisasi dalam usaha menjadikan kabupaten Mamasa sebagai daerah Otonom pada tahun 2004. Selain itu masyarakat Kabupaten Mamasa terbuka terhadap orang-orang pendatang,

masyarakat masih kental dengan gotong rotong, tolong menolong dan kebersamaan, hal ini terbukti dalam segala aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menolong mereka tidak melihat suku, ras dan agama karena mereka menganggap semuanya adalah saudara, terbukti dengan beraneka ragam suku, bangsa dan agama yang tinggal di Kabupaten Mamasa. Dari segi budaya masyarakat Mamasa masih memegang adat nenek moyangnya, tetapi mereka tidak menutup terhadap adat kebiasaan suku-suku yang lain.

#### **a. Perkembangan Sosial Budaya**

Dalam kelompok masyarakat terdapat suatu pola interaksi yang membentuk suatu kepribadian dan budaya dari lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam buku berjudul *“Keunikan Budaya”* yang diliris Drs.Arianus Mandadung tahun 2005 menyatakan bahwa masyarakat Mamasa berdasarkan penyampaian lisan dari generasi kegenerasi bahwa asal usul nenek moyang di kabupaten Mamasa dan sekitarnya, merupakan perpaduan antara penghuni bumi dari sebelah Utara Kabupaten Mamasa dan penghuni laut dari sebelah Barat Mamasa sehingga muncullah istilah *Pitu Uluanna Salu dan Pitu Ba'bana Minanga* yang berarti ada dua wilayah kekuasaan para hadat yang tidak dapat dipisahkan. Pada awalnya Kabupaten Mamasa tertutup dari pengaruh yang berasal dari luar lingkungannya. Dalam kurun waktu yang cukup lama akhirnya Masyarakat Kabupaten Mamasa dapat menerima budaya yang berasal dari luar wilayah serta karena pengaruh era globalisasi. Keterbukaan masyarakat

Kabupaten Mamasa terhadap budaya luar dapat memperkaya budaya dan akan menunjang dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah khususnya sektor Pariwisata.

#### **b. Adat, Budaya dan Warisan Budaya**

Adat istiadat di Kabupaten Mamasa khususnya komunitas yang tinggal di Kampung - kampung masih bersifat mengikat. Namun dengan adanya perubahan dinamika lingkungan yang terjadi seperti meningkatnya akses dalam memperoleh informasi, serta komunikasi maka nampaknya mulai terjadi interaksi sosial sehingga adat istiadat yang tadinya mengikat berangsur mengarah kepada adat-istiadat yang bersifat transisi.

Di Kabupaten Mamasa terdapat beberapa suku lain, yaitu suku Toraja, suku Bugis, suku Jawa, dan Mandar. Kehidupan adat budaya masyarakat Mamasa yang masih sangat dipegang teguh adalah kasta atau garis keturunan, pada tataran keturunan bangsawan dapat ditandai pada saat dilakukan upacara kematian secara adat (Pa'tomatean). Namun kedudukan adat ini masih dibagi kedalam beberapa tingkatan sesuai kemampuan ekonomi dan status sosial dalam masyarakat.

#### **c. Adat dan Pola Kepemilikan Lahan**

Kondisi adat istiadat di Kabupaten Mamasa masih sangat kental, kebiasaan – kebiasaan pada masa lampu masih banyak yang dipertahankan seperti corak rumah adat, bahasa sehari-hari masih

didominasi bahasa daerah, pada sebagian masyarakat masih menanamkan perilaku yang bertentangan dengan adat (Pemali). Hal ini juga dapat digambarkan terhadap kepemilikan lahan dimana masih banyak lahan yang dikuasi secara adat atau rumpun keluarga besar. Keadaan ini terdapat dan tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

#### **d. Pola Kekerabatan**

Masyarakat Kabupaten Mamasa yang terdiri dari beberapa suku memiliki pola kekerabatan yang kental, sikap hormat menghormati, tolong menolong serta tenggang rasa yang masih tinggi, dalam masyarakat Mamasa terdapat ungkapan “*Mesa Kada Dipatuo Pantan Kada Dipomate*” Ungkapan ini mengandung makna yang cukup dalam betapa pentingnya akan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pola kekerabatan yang kental tidak membuat masyarakat Kabupaten Mamasa tertutup terhadap pendatang, justru masyarakatnya memiliki sifat yang ramah dan tolong menolong terhadap pendatang.

#### **e. Pola Permukiman Penduduk**

Kondisi permukiman penduduk di kabupaten Mamasa pada umumnya mengikuti pola mengelompok, disamping ada juga yang mengikuti pola linier mengikuti pola jaringan jalan. Lokasi kawasan permukiman di kabupaten Mamasa pada umumnya terkonsentrasi di pusat pemerintahan, perdagangan dan fasilitas sosial lainnya mulai pada tingkat pemerintahan desa sampai Kabupaten. Hal ini disebabkan karena

kondisi wilayah secara fisik merupakan dataran tinggi dengan kemiringan > 40%. Kawasan permukiman di kabupaten Mamasa dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori jenis permukiman, yaitu :

- Permukiman perkotaan.

Pola permukiman pada kawasan ini adalah pola mengelompok yang pada umumnya mengikuti kemiringan lahan yang mengarah ke jaringan jalan. Tingkat kepadatan permukiman pada kawasan perkotaan adalah tinggi, dimana batas antar rumah sangat dekat dan sangat jarang sekali ada ruang terbuka.

- Permukiman perdesaan.

Pola permukiman kawasan perdesaan adalah pola menyebar. Pada permukiman perdesaan ini sangat berbeda dengan permukiman perkotaan, dimana pada permukiman perdesaan pada umumnya pada daerah yang relatif datar dengan tingkat kepadatan bangunan rendah. Disamping itu ada peruntukan ruang terbuka yang digunakan untuk menanam apotik hidup yang berupa sayur-sayuran.

## **4.2. Visi Misi Kabupaten Mamasa**

### **4.2. 1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi pembangunan daerah Kabupaten

Mamasa tahun 2014-2018 mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2013 yaitu;

***“Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dalam Kehidupan Yang Berkeadilan, Demokratis Dan Sejahtera”***

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Mamasa selama tahun 2014-2018 dengan memuat beberapa pikiran pokok sebagai berikut :

- Pertama :Kemandirian adalah cita-cita otonomi daerah karena merupakan pilar kemandirian bangsa, gambaran kesejahteraan, dan eksistensi daerah serta merupakan prasyarat keberhasilan pemerintahan di daerah.
- Kedua :Keadilan adalah dambaan setiap insan selaku tata cara mewujudkan harmoni hidup bahkan merupakan harkat dan martabat kemanusiaan.
- Ketiga :Demokratisasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat adalah jaminan kebebasan tanggungjawab dan partisipasi aktif dalam segala bidang kehidupan.
- Keempat :Kesejahteraan merupakan tujuan hidup masyarakat sebagaimana cita-cita bersama yang dapat terwujud dalam kerangka keseimbangan yang menjunjung tinggi kebersamaan.

Kelima :Mewujudkan Pemerintahan yang baik menjadi prasyarat mutlak guna menjamin terselenggaranya pelayanan masyarakat secara optimal.

#### **4.2.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

##### **1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Berkelanjutan**

Misi mewujudkan kemandirian ekonomi selaras dengan salah satu pokok visi yaitu “Mandiri.” Kemandirian ekonomi berarti kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam sektor perekonomian. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung pengertian bahwa kemandirian ekonomi pemerintah daerah didukung oleh tangguhnya ekonomi masyarakat, yang dapat dilakukan melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara adil dan berkelanjutan. Dengan berbasis ekonomi kerakyatan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai atau meningkat. Sedangkan



prinsip dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tersedia tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Misi pertama ini sejalan dengan skala prioritas RPJMD ke-3 (2014-2018) yang terdapat dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) yaitu kondisi terus berkembangnya UMKM dan Koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Misi pertama ini mencita-citakan terwujudnya pemerintahan dan masyarakat yang mandiri, berdikari dan tidak bergantung pada pemerintah atau pihak lain.

## **2. Menumbuhkembangkan Iklim Investasi yang Kondusif**

Misi menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif sejalan dengan skala prioritas RPJMD ke-3 (2013-2018) yang terdapat dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) yaitu kondisi terus meningkatnya investasi-penanaman modal di berbagai sektor baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Perekonomian daerah akan mantap jika didukung oleh iklim investasi yang kondusif yang dapat memberikan daya tarik bagi investor baik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Sehingga, dengan tumbuhnya iklim usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.

### **3. Menyelenggarakan/Menyediakan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Terjangkau, Merata dan Berkualitas**

Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan aspek dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pendidikan dan kesehatan yang diselenggarakan adalah yang berkeadilan dan merata, dalam arti semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas. Misi ketiga ini sejalan dengan skala prioritas RPJMD ke-3 (2014-2018) yang terdapat dalam RPJPD Mamasa (2005-2025) yaitu kondisi terus meningkatnya kualitas SDM, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu faktor penentu kemajuan suatu daerah adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat kesehatan. Misi ketiga ini mencita-citakan meningkatnya kualitas SDM Mamasa dan terjaganya kesehatan masyarakat.

### **4. Membangun Infrastruktur yang Memadai dan Mendukung Kegiatan Perekonomian**

Upaya pemenuhan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan

infrastruktur yang memadai di segala bidang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah.

#### **5. Mewujudkan Mamasa sebagai Daerah Tujuan Wisata (Tourism Destination)**

Misi ini mencita-citakan Kabupaten Mamasa pada tahun 2018 menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang paling diminati baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan misi ini diharapkan Kabupaten Mamasa akan memiliki obyek wisata unggulan, serta obyek wisata tradisional/potensial lainnya yang tertata, sehingga akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

#### **6. Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Prima melalui Penerapan Good Governance dan Clean Government**

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan oleh instansi, lembaga atau organisasi yang memberikan layanan kepada publik atau masyarakat sebagai pelanggan, dengan memperhatikan aturan atau prosedur yang ditetapkan serta dengan memenuhi standar minimal layanannya, guna menciptakan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misi menyelenggarakan pelayanan publik yang prima merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memuaskan masyarakat diperlukan tata kelola pemerintahan yang

baik. Penerapan prinsip good governance dan clean government diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

#### **4.3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa**

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Tugas dan fungsi utama dinas daerah yang memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan (Riwu, 1997). Dinas Pariwisata sebagai salah satu dinas daerah adalah organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian dari dinas daerah dan bertugas sebagai unsur pelaksanaan daerah dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintah daerah di sektor pariwisata.

##### **4.3.1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa**

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kepariwisataan Kabupaten Mamasa maka, ditetapkan visi yaitu:

## **“Menjadikan Mamasa Sebagai Daerah Tujuan Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat ”**

Dengan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa sebagai berikut

:

1. Menjadikan *Mambulilling* sebagai Brinding Image Pariwisata Mamasa yang merupakan kawasan strategis untuk menyaksikan sunrise, sunset dan city view melalui Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Wisata di Kawasan Gunung Mambulilling;
2. Membangun kerjasama masyarakat dan SKPD terkait untuk mengembalikan Citra Mamasa dengan julukan “Kota Kembang” yang sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda baik di Indonesia maupun di luar negeri utamanya di Negara-negara Eropa;
3. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai Seni, Budaya dan kearifan lokal sebagai warisan nenek moyang dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
4. Mensosialisasikan Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Rapi, Indah, Sejuk dan Kenagan) menuju masyarakat Sadar Wisata
5. Mendorong pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif sebagai Industri Pariwisata melalui Pembinaan Industri2 Kerajinan, serta mengundang investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata;

6. Mewujudkan kerjasama lintas sektoral dengan SKPD terkait dan stake holder dibidang kepariwisataan;
7. Meningkatkan Promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan Festifal Seni Budaya Daerah melauai tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional; dan
8. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur dan Pelaku-pelaku pariwisata dengan mengikuti Pelatihan-pelatihan baik di dalam maupun di luar daerah;

#### **4.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata yang meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran wisata.
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.3.3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa**

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa terdiri dari :

##### **a. Kepala Dinas**

Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasi, membina, menyelenggarakan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pariwisata
- b. Penyusunan rencana strategis Bidang dan Pariwisata

- c. Pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengandiln tugas Bidang Pariwisata
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dan umum di Bidang Pariwisata

(2) Rincian Tugas Kepala Dinas Pariwisata sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Pariwisata
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan rencana strategis dan program kerja
- c. Membina dan menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan / anugrah bagi lembaga instansi yang berjasa dibidang Kebudayaan skala Kabupaten dan perlindungan HKI dibidang Kebudayaan
- d. Membina, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemasaran dan promosi di dalam dan di luar Negeri melalui pameran, pertunjukan, mood show, media massa dan Teknologi Informasi
- e. Menyenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Pemasaran Pariwisata penetapan Pariwisata Nasional dan penerapan Pariwisata Daerah
- f. Membina dan menyelenggarakan perizinan usaha pembuatan Film skala Kabupaten izin pengedaran, izin penjualan dan



- penyewaan film, VCD, DVD, izin petunjuk Film keliling, izin penayangan Film melalui media elektronik dan tempat hiburan
- g. Menetapkan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat Kabupaten
  - h. Membina dan menyelenggarakan penerbitan rekomendasi pengendalian pembangunan Hotel, Restoran, Kafe, Rumah Makan dan penginapan
  - i. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi Kerja serta mengembangkan karir
  - j. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada Bupati
  - k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Serta pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Dinas

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian serta keuangan dan perencanaan
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian serta keuangan dan perencanaan
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan Administrasi dan fungsional kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas

(2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut

- a. Mengkoordinasikan, menggerakan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta keuangan dan perencanaan.
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan Kepegawaian;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas keuangan dan perencanaan
- e. Mengelola dan Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan dan aset;

- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas Administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan perencanaan
- g. Mengkoordinasikan dan pengelolaan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
- h. Mengkoordinasikan dan mengelola penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan tahunan dalam lingkup dinas;
- i. Menilai prestasi para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya;

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan Kepegawaian meliputi pengelolaan Rumah Tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan Dinas, Tata Laksana, Perlengkapan dan Aset, Kepegawaian dan tugas umum lainnya, Serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas, kepala sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan aset kepegawaian dan tugas umum lainnya;
- c. Pengkoordinasian, pengurusan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaporan dan Evaluasi pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian.

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menghimpun bahan penyusunan kebijakan teknis;
- b. Menyusun rencana Oprasional Program kerja dan Kegiatan
- c. Membina dan mengelola pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan kerja
- d. Membina dan mengelola pelaksanaan surat menyurat meliputi surat masuk dan surat keluar serta kearsipan;
- e. Membina dan mengelola Pelaksanaan tugas kehumasan, keprotokoleran perjalanan dinas dan tatalaksana

- f. Membina dan mengelola administrasi penyimpanan, pendistribusian dan penginventarisasian barang, perlengkapan dan aset dinas;
- g. Membina dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi penyiapan rencana kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala daftar urut kepangkatan ( DUK ) dan DP3 pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya;
- h. Membina dan mengelola pelaksanaan cuti, teguran pelanggaran disiplin, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- i. Membina dan mengelola pengembangan karir, dan kesejahteraan pegawai;
- j. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**d. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas, keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi,

perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan anggaran dan tugas keuangan lainnya menyusun perencanaan melaksanakan kegiatan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Kepala sub bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan perencanaan meliputi penyusunan anggaran, Verifikasi, Perbendaharaan, dan pembukuan pelaporan anggaran dan penyusunan rencana dan program;
- c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- d. Pelaporan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas;

(3) Rincian tugas kepala sub bagian keuangan dan perencanaan sebagai berikut;

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis;
- b. Menyusun rencana operasional program kerja;
- c. Membina dan mengelola menyusun rencana tahunan dan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. Melaksanakan Perbendaharaan keuangan;
- g. Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembantu bendahara pengeluaran;
- h. Mengajukan SPP untuk pengisian buku kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (SKPD/Lembaga Teknis Daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan Keputusan Bupati;
- i. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada bendahara kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan penggunaan anggaran;
- j. Memeriksa, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penerimaan dan pengeluaran Kas beserta lampirannya ;
- k. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran Operasional Kantor;
- l. Menyiapkan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan pengkajian data statistik serta informasi Dinas;
- m. Mengendalikan menyusun program dan kegiatan Dinas;
- n. Melaksanakan Pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**e. Bidang Promosi dan Kesenian**

(1) Bidang Promosi dan Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengembangan promosi dan pemasaran serta pendataan kesenian;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) , Kepala Bidang Promosi dan Kesenian mempunyai fungsi :

- a. Membuat program dan rencana kerja tahunan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas pelayanan di bidang Kepariwisata;
- c. Pelaksanaan Promosi dan kesenian di bidang kepariwisataan;
- d. Melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pendataan kesenian tradisional;
- f. Menyusun bahan pembinaan sanggar-sanggar kesenian berdasarkan data dan informasi atau hasil pemantauan agar kesenian mempunyai daya guna dan hasil guna;

(3) Rincian tugas Kepala Bidang Promosi dan Kesenian sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis bidang Promosi dan Kesenian;



- b. Membina dan mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- d. Menyusun bahan bimbingan penyelenggaraan peningkatan aktivitas pembinaan iven wisata sebagai upaya mendorong kemandirian lokal;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan pemasaran termasuk penelitian serta promosi kepariwisataan;
- f. Pengadaan brosur, audio visual dan media publikasi lainnya;
- g. Melakukan publikasi terhadap atraksi wisata;
- h. Menilai prestasi kerja Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

**f. Seksi Promosi dan Pemasaran**

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kesenian, mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi dan pemasaran kepariwisataan;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),

Kepala seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis;
- b. Melaksanakan kerja sama dengan usaha travel dalam melaksanakan promosi;
- c. Menyusun program penyelenggaraan promosi dan pameran;
- d. Merencanakan kegiatan promosi kepariwisataan seperti festival, pameran, perlombaan, dan sejenisnya;
- e. Melakukan kerjasama dengan para kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat untuk memperkenalkan Potensi Objek Wisata;
- f. Menyusun jadwal kunjungan ke Objek;
- g. Menyusun telaahan tentang objek wisata, Potensi wisata, sumber daya kepariwisataan dan peluang pengembangan;
- h. Menginventarisir faktor yang menjadi penghambat pengembangan kepariwisataan;
- i. Melakukan sumber potensi wisata dan sumber daya pendukung;
- j. Menyelenggarakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **g. Seksi Pengembangan Kesenian**

(1) Seksi Pengembangan kesenian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi dan Kesenian, mempunyai tugas pokok menyusun rencana tentang pendataan kesenian tradisional, seniman dan sanggar-sanggar seni;

(2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1), Kepala seksi Pengembangan Kesenian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan Rencana Tahunan;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pendataan kesenian tradisional;
- c. Menyusun bahan pembinaan sanggar-sanggar kesenian;
- d. Membina sanggar-sanggar kesenian yang hidup dalam masyarakat;
- e. Memantau dan mengevaluasi kesenian tradisional dan sanggar-sanggar kesenian untuk dijadikan bahan pembinaan dan atau bahan evaluasi;

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan kesenian sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis
- b. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. Menginventarisir sarana kesenian serta membina usaha pembuatan sarana kesenian;
- d. Mengumpulkan program dan kegiatan sanggar seni;
- e. Membina dan memantau pengembangan sanggar seni;
- f. Menginventarisir jenis-jenis kesenian tradisional;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
- h. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- i. Melakukan sosialisasi pelestarian seni tradisional;
- j. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

#### **h. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok mengumpulkan data objek dan jenis usaha serta tempat pariwisata;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan destinasi dan pemanfaatan sarana pariwisata;
- c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

(3) Rincian tugas kepala bidang destinasi pariwisata sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengontrol/mengecek pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk kerja dan pembinaan agar pekerjaan selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;
- c. Melaksanakan analisis terhadap kemungkinan adanya pengembangan destinasi pariwisata secara seksama agar kekayaan wisata daerah dapat terkelola secara maksimal;
- d. Melaksanakan analisis data objek jenis usaha dalam rangka pengembangan kepariwisataan
- e. Memantau dan mengevaluasi objek wisata, atraksi, rekreasi dan hiburan umum untuk dijadikan bahan pembinaan atau bahan evaluasi;

- f. Menyiapkan perizinan perusahaan objek wisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mengontrol pemberian perizinan objek wisata oleh pejabat pengadministrasian umum agar selalu lancar dan baik;
- h. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban;
- k. Melaksanakan penataan dan pengembangan objek wisata;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

**i. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas pokok memantau, mendata pengembangan usaha pariwisata dan jenis usaha serta tempat wisata;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) , Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Penyelenggaraan pendataan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Melakukan pendataan jenis-jenis usaha dan tempat wisata;

(3) Rincian tugas seksi pengembangan Destinasi Pariwisata sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis serta menyusun program kerja;
- b. Mencari Informasi terhadap kemungkinan adanya pengembangan pariwisata secara seksama agar kekayaan pariwisata daerah dapat diolah dengan maksimal;
- c. Memberi pelayanan perizinan objek wisata;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas;
- e. Memantau pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari bahan upaya pemecahannya;
- g. Melaksanakan evaluasi dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- i. Memberi sarana pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;

**j. Seksi Pemanfaatan Sarana Wisata**

- (1) Seksi Pemanfaatan Sarana Wisata dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana wisata;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan sarana wisata mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pengurusan, penelitian dan pendapatan sarana wisata;
  - b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembinaan pemanfaatan sarana wisata;
  - c. Membuat petunjuk teknis / panduan tentang sarana wisata;
- (3) Rincian tugas seksi pemanfaatan sarana wisata sebagai berikut :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
  - b. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan sarana wisata;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan sarana wisata;



- d. Melakukan, pendataan sarana dan prasarana wisata serta potensinya;
- e. Membuat deskripsi atas sarana dan prasarana wisata;

**k. Bidang Investasi, Bina Mitra dan Perizinan**

- (1) Bidang investasi, bina mitra dan perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelaku wisata, pemberian fasilitas usaha dan perizinan di bidang pariwisata;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Investasi, Bina Mitra Dan Perizinan mempunyai fungsi :
  - a. Bahan penyusunan kebijakan teknis;
  - b. Menyusun program dan rencana kegiatan setiap tahun anggaran;
  - c. Penyelenggaraan dan pemberian perizinan bidang pariwisata;
  - d. Memfasilitasi kerajinan tangan yang bisa dikembangkan
  - e. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan;
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang Investasi, Binamitra dan Perizinan sebagai berikut :
  - a. Membuat Program dan rencana kerja tahunan;

- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian fasilitas pembangunan/pengembangan usaha dibidang kepariwisataan;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan investasi dibidang kepariwisataan;
- d. Penyiapan perizinan dibidang akomodasi, rumah makan, bar, café, discotik, bioskop, serta aneka usaha jasa pelayanan pariwisata lainnya;
- e. Penyiapan bahan analisis rencana pengembangan, pembinaan serta pengaturan usaha akomodasi, rumah makan, bar, café, discotik, bioskop, ketenaga kerjaan serta aneka usaha jasa pelayanan pariwisata;
- f. Penyiapan kebijakan pembinaan oprasional dibidang usaha akomodasi rumah makan, bar, café, dicotik, bioskop, serta aneka usaha jasa pelayanan pariwisata;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembanagn karier;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

#### **I. Seksi Investasi dan Bina Mitra**

- (1) Seksi Investasi dan Bina Mitra dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala

bidang Investasi, Bina Mitra dan Perizinan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggaraan daya tarik wisata serta seni budaya dan prosedur investasi yang muda dan cepat;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),

Kepala seksi Investasi, Bina Mitra mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis;
- b. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang investasi dan bina mitra;
- c. Penyelenggaraan dan pengembangan daya tarik wisatawan;
- d. Pengembangan seni budaya dan Prosedur investasi yang mudah dan cepat;
- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

(3) Rincian tugas kepala seksi Investasi dan Bina Mitra sebagai berikut:

- a. Membuat Perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian fasilitas pembangunan pengembangan usaha bidang kepariwisataan;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan investasi dan bina mitra di bidang kepariwisataan;
- d. Melaksanakan pengurusan kerja sama dengan investasi/lembaga terkait maupun dengan mitra usaha untuk pengembangan investasi di bidang kepariwisataan;

- e. Pembinaan oprasional atas pengelolaan usaha atraksi wisata serta usaha rekreasi dan hiburan;
- f. Melaksanakan pelayanan bagi investor dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan usaha atraksi wisata serta usaha rekreasi dan hiburan lainnya;
- g. Penyiapan rekomendasi dan izin penerbitan pengembangan kepariwisataan;
- h. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha atraksi wisata serta usaha rekreasi dan hiburan secara berkala;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Investasi, Bina Mitra dan Perizinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**m. Seksi Perizinan dan Evaluasi**

- (1) Seksi perizinan dan evaluasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bidang Investasi, Bina Mitra dan Perizinan, mempunyai tugas pokok memberikan perizinan pementasan, pertunjukan, pameran dibidang seni budaya dan perizinan memasuki objek wisata, melakukan evaluasi atas pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan;

(2) Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),

Kepala seksi perizinan dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan menyusun rencana dan program kerja;
- b. Memberikan perizinan kepariwisataan dan seni budaya;
- c. Melaksanakan pemantauan tentang izin yang telah dikeluarkan;
- d. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

(3) Rincian tugas kepala seksi Perizinan dan Evaluasi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pertunjukan, evaluasi , aspirasi, pameran dan atraksi di bidang seni budaya;
- b. Melaksanakan pengurusan pengiriman duta dibidang seni budaya;
- c. Melaksanakan pengurusan pengawasan pementasan, pertunjukan pameran dan atraksi dibidang seni budaya serta pembangunan kepariwisataan;
- d. Melaksanakan pengurusan perizinan, pementasan, pertunjukan, pameran dan atraksi di bidang seni budaya dan perizinan memasuki objek dan sarana wisata;
- e. Melaksanakan pengurusan perizinan usaha di bidang seni budaya dan usaha kepariwisataan;
- f. Melaksanakan pengurusan kerja sama dengan instansi terkait dengan organisasi masyarakat dibidang seni budaya;

- g. Mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **4.4. Potensi Pariwisata Kabupaten Mamasa**

##### **4.4.1. Daya Tarik Wisata Alam**

Kabupaten Mamasa yang berada pada ketinggian 100 – 3.000 mdpl memiliki keindahan alam yang masih mencerminkan kesan *natural* sehingga sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Pesona keindahan alam sudah dapat dinikmati sejak pertama kali memasuki wilayah Kabupaten Mamasa. Pada hampir seluruh bagian wilayah Kabupaten Mamasa, dapat dijumpai bukit-bukit yang hijau menjulang, air sungai yang mengalir, serta udara khas pegunungan yang menghadirkan kesejukan jauh dari polusi udara. Mozaik lahan buatan manusia, seperti hamparan sawah dan kebun-kebun juga tidak luput memperkaya keindahan alami Kabupaten Mamasa.

Kabupaten Mamasa yang terletak pada jantung gugusan Pegunungan Quarles di bagian barat Pulau Sulawesi memiliki deretan gunung dan bukit yang menyimpan banyak pesona wisata, antara lain Gunung Gandang Dewata dengan ketinggian 3.037 mdpl di Kecamatan Tabulahan sebagai gunung tertinggi di Kabupaten Mamasa, sekaligus tertinggi kedua di Pulau Sulawesi dan dikenal penuh misteri serta memiliki medan tempuh sangat menantang bagi para pendaki gunung dan pecinta

alam yang datang untuk menaklukkannya. Selanjutnya, Gunung Mambulilling dengan ketinggian 2.573 mdpl di Kecamatan Mamasa dapat terlihat begitu jelas dari pusat ibukota kabupaten yang memiliki kondisi medan lebih mudah sehingga banyak didaki oleh pengunjung dan masyarakat sekitar. Ada pun Bukit Buntu Mussa di Kecamatan Balla yang merupakan lokasi terbaik untuk melihat deretan beratus rumah tradisional Mamasa di perkampungan Balla Peu. Selain itu juga terdapat Bukit Marudinding di Kecamatan Sesenapadang, Gunung Sareong di Kecamatan Sumarorong, Gunung Pasapa' di Kecamatan Bambang, dan Bukit Tadokalua di Kecamatan Tabang.

Pegunungan di Kabupaten Mamasa merupakan hulu dari banyak aliran sungai besar, antara lain Sungai Mamasa, Sungai Masuppu, Sungai Mambi, Sungai Aralle, dan Sungai Liawan yang menyimpan potensi wisata minat khusus petualangan tirta, seperti *rafting* dan *river tubing*, meskipun wisata jenis ini membutuhkan keterampilan teknis dan sarana keselamatan yang memadai bagi peminatnya. Sepanjang aliran sungai di Kabupaten Mamasa juga tersebar banyak air terjun yang sebagian di antaranya sudah dikelola sebagai obyek wisata. Air Terjun Liawan di Kecamatan Sumarorong, merupakan obyek pemandian alam di dalam kawasan hutan lindung Gunung Sareong yang sudah dilengkapi fasilitas sarana wisata berupa penginapan dan pondok-pondok wisata. Air Terjun Sambabo di Desa Ulumambi Kecamatan Bambang yang memiliki tinggi  $\pm 300$  m termasuk sebagai air terjun tertinggi di Pulau Sulawesi. Air Terjun

Mambulilling yang terletak di salah satu lembah Gunung Mambulilling dapat dilihat jelas keindahannya dengan mata telanjang dari pusat Kota Mamasa, sementara Air Terjun Parak di Kecamatan Tawalian dan Air Terjun Minanga di Sesenapadang memiliki akses yang cukup mudah ditempuh dari ibukota kabupaten. Beberapa obyek wisata air terjun lain yang terdapat di Kabupaten Mamasa di antaranya Air Terjun Sollokan di Kecamatan Messawa, Air Terjun Tambuk Manuk di Kecamatan Balla, dan Air Terjun Rimbe di Kecamatan Nosu.

Tidak hanya air terjun, Kabupaten Mamasa juga memiliki banyak potensi mata air panas. Keberadaan mata air panas alami ini merupakan peluang besar untuk mengembangkan wisata kebugaran dan kesehatan, apalagi mengingat Kabupaten Mamasa merupakan daerah yang bersuhu dingin. Beberapa mata air panas yang sudah dikembangkan menjadi obyek wisata pemandian antara lain Pemandian Air Panas Kole, Rante Katoan, Rante-rante dan Nusantara di Kecamatan Mamasa; Pemandian Air Panas Uhailanu di Kecamatan Aralle; Pemandian Air Panas Tamalanti' di Kecamatan Tanduk Kalua' dan Pemandian Air Panas Malimbong di Kecamatan Messawa. Sementara potensi air panas alami yang masih belum dikembangkan terdapat di Desa Osango Kecamatan Mamasa, Rante Kamiri di Kecamatan Tawalian, Indo Banua di Kecamatan Mambi, Rante Berang di Kecamatan Buntu Malangka dan yang lainnya.

Gua-gua alam yang masih misterius dan belum banyak dikunjungi juga dapat dijumpai Kabupaten Mamasa, antara lain di Kecamatan



Mambi, Messawa dan Rantebulahan Timur. Selain itu juga terdapat benda-benda gejala alam unik yang terkait dengan mitos serta legenda setempat, antara lain Batu Kumila' (batu nakal) di Kecamatan Mamasa, Batu Sikoba' di Kecamatan Balla dan Batu Laledong (batu bergoyang) di Kecamatan Pana.

Sektor lain yang teramat potensial dikembangkan sebagai daya tarik wisata alam dan budaya di Kabupaten Mamasa adalah meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kebiasaan sebagian besar masyarakat Mamasa adalah masih bertani dan beternak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pertanian umumnya masih dikembangkan secara tradisional dan belum terlalu ditunjang dengan teknik budidaya modern, dengan komoditi yang dihasilkan antara lain padi hitam, kopi, kakao, terung belanda, markisa, kacang tanah, kacang hijau, lada serta sayur-sayuran.

Umumnya sawah dan lahan pertanian juga dilengkapi dengan kolam ikan dengan ikan mas sebagai jenis yang paling banyak dibudidayakan, di samping juga terdapat ikan lele dan ikan nila. Adapun kerbau, babi, ayam dan itik merupakan ternak yang sangat umum dipelihara masyarakat Mamasa pada pekarangan di sekitar rumahnya. Ternak di kalangan masyarakat Mamasa berperan penting sebagai simpanan/tabungan yang dapat dijual jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, disamping juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan berbagai upacara adat.

Hutan di Kabupaten Mamasa memegang fungsi penting dalam menjaga pasokan air bagi aliran sungai, kebutuhan rumah tangga dan pembangkit energi listrik, tidak hanya untuk internal Kabupaten Mamasa melainkan juga kabupaten lain di sekitarnya seperti Polewali Mandar dan Pinrang. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamasa adalah seluas 78.038 ha, sedangkan 15.064 ha berupa hutan produksi, dan 367 ha hutan produksi yang dapat dikonversi. Kabupaten Mamasa juga akan memiliki kawasan konservasi berupa taman nasional dan taman hutan raya, yakni Taman Nasional Gandang Dewata dan Taman Hutan Raya Marudinding yang sudah dicanangkan penetapannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Kawasan tersebut akan ditetapkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan wisata alam.

#### **4.4.2. Daya Tarik Wisata Budaya dan Peninggalan Sejarah**

Kebudayaan asli Mamasa merupakan aset berharga bagi pengembangan pariwisata. Jauh sebelum terbentuknya pemerintahan administratif-birokratif formal di Kabupaten Mamasa, kawasan ini telah dihuni oleh beberapa komunitas adat yang memiliki tatanan kemasyarakatan yang mapan berupa batas wilayah, pemangku adat serta gelar pemangku adatnya masing-masing. Secara umum kekayaan tatanan kehidupan komunitas adat yang telah berlangsung secara turun-

temurun tersebut dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup kewilayahan berdasarkan kemiripan dalam hal tradisi (dalam bahasa lokal disebut “*kabeasaan*”) masyarakatnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Wilayah Limbong Kalua’ dan Tanduk Kalua, meliputi Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Sesenapadang, Kecamatan Balla dan Kecamatan Tanduk Kalua’.
- 2) Wilayah Tandasau’, meliputi Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa.
- 3) Wilayah Tandarokko, meliputi Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Bambang, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Buntu Malangka dan Kecamatan Mehalaan
- 4) Wilayah Tandalangnan, meliputi Kecamatan Tabang, Kecamatan Pana dan Kecamatan Nosu

Berbagai komunitas adat di Kabupaten Mamasa tersebut memiliki ragam bentuk kebudayaan material maupun immaterial yang berpotensi menjadi daya tarik wisata, antara lain meliputi berbagai tipe rumah tradisional dengan keunikan nilai sejarah dan fungsinya dalam struktur sosial masyarakat, perkampungan-perkampungan tradisional, upacara/ritual adat dalam empat ruas kehidupan (kegiatan perekonomian, syukuran kegembiraan, pernikahan, dan kematian), seni budaya tradisional, hingga monumen dan benda-benda bersejarah.

Bentuk-bentuk budaya di Mamasa dikenal memiliki kemiripan dengan budaya di Tana Toraja mengingat masyarakat di kedua daerah tersebut masih berasal dari satu rumpun etnis yang sama, namun dalam banyak hal budaya Mamasa memiliki keunikan tersendiri yang menjadikannya benar-benar berbeda dengan budaya Toraja. Bangunan-bangunan rumah adat/rumah tradisional (*tongkonan*) yang terdapat di Mamasa, misalnya, memiliki bentuk serta jenis yang lebih beragam dibandingkan *tongkonan* di Tana Toraja. Berbagai bentuk rumah adat dan rumah tradisional Mamasa tersebut sampai sekarang masih dapat dijumpai pada perkampungan-perkampungan yang masih mempertahankan corak budaya tradisionalnya antara lain: Makuang di Kecamatan Messawa; Balla Peu (perkampungan tradisional terpanjang dengan lebih dari 100 *tongkonan* berderet), Batarirak dan Balla Satanetean di Kecamatan Balla; Tondok Sirenden di Kecamatan Tawalian; Orobua, di Kecamatan Sesena Padang; Rambusaratu, Tondok Bakaru dan Buntu Kasisi di Kecamatan Mamasa.

Upacara kematian (Rambu Solo') masih umum ditemukan pada wilayah-wilayah adat Limbong Kalua', Tandalangnan dan Tandasau'. Rambu Solo' di daerah Mamasa dikenal memiliki prosesi yang lebih rumit dari upacara serupa di Tana Toraja. Upacara kematian tersebut disesuaikan dengan strata sosial sehingga ada mayat yang disemayamkan sampai beberapa tahun dengan pengorbanan puluhan hingga ratusan ternak (kerbau, babi, ayam) dan ada juga yang hanya dua

hari dengan pengorbanan seadanya. Di Mamasa, khususnya di Kecamatan Nosu dan Pana terdapat juga ritual kematian unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain manapun, yakni Ritual Mangngaro atau tradisi mengeluarkan ratusan jasad leluhur dari kubur sekali setahun secara bersamaan untuk dikremasi ulang sebagai pelengkap ritual Rambu Solo' bagi orang meninggal yang diupacarakan khusus (Dipandan).

Adapun upacara/ritual adat bernuansa kegembiraan (syukuran) yang dapat ditemukan di Kabupaten Mamasa antara lain Malangngi' (pesta syukuran bagi kaum perempuan), Ma'bululondong \]dan Ma'pararuk (syukuran untuk kaum pria), Menani pare (syukuran pasca panen). Ma'rinding Bai, Ma'rinding Tedong, Mae'ran Gayang, dan Ma'bua' (tingkatan-tingkatan upacara syukuran bagi orang kaya dan kaum bangsawan), serta Melambe yakni upacara permohonan kepada Sang Pencipta.

Kabupaten Mamasa juga memiliki banyak peninggalan yang mengandung nilai sejarah. Kuburan tua Tedong-tedong di Kecamatan Balla diyakini berisi ratusan kerangka keturunan manusia pertama dan tokoh adat Mamasa pertama di Sulawesi Barat, padaling (gong) peninggalan Nenek Pongka Padang di Kecamatan Tabulahan, situs pohon mangga To' Pao sebagai lokasi musyawarah pemangku adat pada zaman dulu, *sepu* (tas tangan berisi dokumen perjanjian kuno), serta meriam peninggalan Belanda di Kecamatan Mamasa, gereja tua peninggalan Belanda yang dibangun tahun 1929 di Kecamatan Tawalian,

Benteng Paladan dan Kuburan Pahlawan Demmatande yang gugur dalam menghadapi penjajah Belanda di Kecamatan Sesenapadang, serta tugu korban perlawanan terhadap Belanda di Kecamatan Buntu Malangka.

#### **4.5. Upaya Pemerintah Daerah dalam membangun Kepariwisata di Kabupaten Mamasa**

Kabupaten Mamasa mempunyai beraneka ragam budaya dan potensi sumber daya alam yang memiliki prospek ke depan dalam menambah aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut yang menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Unggulan di Sulawesi Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2008. Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terus berupaya untuk melakukan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Mamasa. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya Pemerintah Daerah yang mulai melakukan konsolidasi, membuka jaringan, dan mengadakan sosialisasi terkait penetapan Mamasa sebagai destinasi pariwisata Sulawesi Barat kepada seluruh elemen masyarakat melalui SKPD-SKPD, Camat, dan Desa pasca Peraturan Gubernur tersebut dikeluarkan.

Sebagaimana dengan yang dikatakan oleh Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Badawi, MH bahwa:

“Ya. Jadi, setelah ada Peraturan Gubernur tahun 2008 itu yang menetapkan Mamasa sebagai destinasi Pariwisata, Pemda sudah

mulai melakukan konsolidasi membuka jaringan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Mamasa melalui SKPD-SKPD, camat dan desa setelah itu kita juga masukkan ke dalam anggaran untuk mendukung pembangunan kepariwisataan, tapi tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada.”<sup>20</sup>

Selanjutnya, Pemerintah Daerah semakin berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan daerah dengan mencantumkan sektor ini secara eksplisit dalam visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2013-2018. Visi-misi tersebut menyiratkan harapan agar daya saing sektor pariwisata mampu semakin tumbuh dan berkembang dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Mamasa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa yang membidangi Kepariwisata, Bapak David Bambalayuk, ST., M.Si yaitu :

“Ditetapkannya Kabupaten Mamasa sebagai destinasi Pariwisata tentunya sangat kita syukuri karena itu artinya Mamasa diprioritaskan untuk pengembangan wisata dan kalau itu dilakukan maka Mamasa menuju ke arah yang lebih baik. Yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan perekonomian rakyat Mamasa. Untuk Itu, Kita sebagai Pemerintah sangat mendukung hal ini.”<sup>21</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa Destinasi Pariwisata adalah kawasan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bupati Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Bdawi, MH pada tanggal 10 April 2017.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa, yang membidangi Kepariwisata, Bapak David Bambalayuk, ST, M.Si pada tanggal 11 April 2017

geografis yang berada pada satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai destinasi Pariwisata dan selanjutnya dapat melahirkan Industri Pariwisata apabila memiliki tiga A (3A), yaitu *Attraction* (atraksi), *Accessability* (Aksesibilitas), dan *Amenities* (Amenitas). Untuk mengkaji upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam membangun dan Mewujudkan Mamasa sebagai Daerah Tujuan (destinasi) Wisata, maka perlu dianalisis menggunakan konsep “3A” tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh, Peneliti mengelompokkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sebagai berikut.

#### **4.5.1. Pembangunan Atraksi Wisata Kabupaten Mamasa (*Attraction*)**

Atraksi wisata yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata. Hal ini yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat dan dinikmati oleh para wisatawan. Atraksi wisata (*Attraction*) dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Obyek wisata (*site-attraction*) dan Event wisata (*Attraction*). Lebih lanjut, Obyek wisata dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Obyek wisata alam yang merupakan ciptaan Tuhan (*Natural-site attraction*) dan Obyek wisata karya manusia (*Man-made site Attraction*). Yang termasuk dalam Obyek



wisata adalah: gunung, pantai, pemandangan, air terjun, situs peninggalan sejarah, cagar budaya, dan lain-lain. Event wisata juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Atraksi Asli (*real, authentic*) dan Atraksi Pentas (*staged*). Yang termasuk dalam atraksi wisata adalah: tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain-lain. Upaya pemerintah daerah dalam membangun Atraksi Wisata di kabupaten Mamasa adalah dengan melaksanakan program-program strategis di bawah ini, yaitu:

#### **4.5.1.1. Pengembangan Objek / Daya Tarik Wisata**

Segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan mau datang berkunjung ke tempat tersebut disebut sebagai objek/ daya tarik wisata. Hal ini merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik wisata di suatu daerah, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Obyek/daya tarik wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa obyek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain. Dalam mengembangkan Objek/ daya tarik wisata di Kabupaten Mamasa, maka Pemerintah daerah melakukan :

##### **a. Inventarisasi dan evaluasi objek / daya tarik wisata.**

Pemerintah daerah melakukan inventarisasi objek wisata terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasi seluruh objek yang dianggap potensial untuk dijadikan objek wisata / daya tarik wisata baik yang telah dikembangkan maupun yang belum dikembangkan sama sekali yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa.

Selanjutnya, objek tersebut dievaluasi dengan memberikan skor terhadap masing-masing objek atau uji kelayakan.

Hasil identifikasi yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 128 objek potensial yang dapat dijadikan objek / daya tarik wisata yang terdiri dari berbagai ragam pesona bentang alam, serta ragam pesona budaya masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Mamasa. Data ini diperoleh dari dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa dan disajikan dalam bentuk tabel pada lampiran.

Potensi objek / daya tarik wisata yang dimiliki 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa merupakan modal dasar bagi pembangunan pariwisatanya. Potensi daya tarik wisata di tiap kecamatan digambarkan secara singkat pada uraian di bawah ini.

### **1) Kecamatan Mamasa**

Kecamatan Mamasa merupakan lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Mamasa. Luas wilayah Kecamatan Mamasa adalah 250,07 km<sup>2</sup> (25.007 ha) atau 8,32% dari luas total kabupaten, terbagi atas 11 desa dan 1 kelurahan. Dari keseluruhan luas wilayah tersebut, 17.775,71 ha di antaranya masih berstatus sebagai kawasan hutan lindung dan 1.0673,29 ha berstatus sebagai hutan produksi terbatas.

Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, Kecamatan Mamasa memiliki gabungan karakteristik lingkungan antara lingkungan perkotaan dan pedesaan yang dikelilingi nuansa pegunungan yang asri. Kota Mamasa sendiri terletak pada areal landai dengan ketinggian 1.025-3.000 mdpl, sedangkan kawasan pedesaan beserta dengan lahan pertanian, kebun dan hutan terletak pada areal yang lebih tinggi mulai dari tepian kota mengarah ke pegunungan.

Di wilayah Kecamatan Mamasa terdapat potensi wisata sejumlah 22 daya tarik wisata, yang terdiri atas 11 obyek wisata alam dan 11 obyek wisata budaya. Obyek wisata alam yang terdapat di Kecamatan Mamasa antara lain adalah Puncak Gunung Mambulilling (2.573 mdpl) dan Air Terjun Mambulilling yang terlihat jelas dari pusat kota, Air Terjun Tetean di Rantepongko, serta beberapa obyek pemandian air panas yang berada cukup dekat dari pusat kota seperti Pemandian Kole, Rante Katoan dan Rante-rante.

Daya tarik wisata budaya yang sering didatangi oleh wisatawan sebagai tujuan *trekking* adalah perkampungan-perkampungan tradisional seperti Kampung Loko, Taupe dan Tondok Bakar. Pada kecamatan ini juga terdapat 2 situs benda cagar budaya, yakni rumah pemimpin adat di Rambusaratu yang termasuk salah satu rumah adat tertua di Kabupaten Mamasa serta rumah pemimpin adat di Buntu Kasisi yang termasuk dalam jenis *Banua Layuk* (rumah tinggi besar). Evaluasi yang telah dilakukan

yang disajikan dalam tabel 11, menunjukkan bahwa potensi daya tarik wisata di Kecamatan Mamasa secara rata-rata berada pada kondisi nilai 4,8 atau agak baik.

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Monumen To' Pao	6	5	4	7	5	7	6	6	5,8
2	Rumah Adat Rambusaratu'	6	6	6	6	4	6	6	5	5,5
3	Rumah Adat Buntu Kasisi	6	6	5	6	4	6	6	5	5,5
4	Perkampungan Tradisional Loko	5	4	6	6	5	6	5	4	5,0
5	Perkampungan Tradisional Taupe	4	4	6	6	6	6	5	4	5,0
6	Perkampungan Tondok Bakarui	5	4	5	5	6	6	6	4	5,1
7	Kuburan Tua Batutu	5	6	4	5	3	6	4	3	4,5
8	Meriam Belanda	4	4	4	7	4	7	4	4	4,8
9	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	7	6	6	5	5	6	7	6	6,0
10	Pasar Mamasa	4	3	4	5	7	7	5	5	5,0
11	Gunung Mambuliling	5	4	6	6	4	4	4	4	4,6
12	Air Terjun Mambuliling	6	5	6	4	5	3	4	4	4,6
13	Air Terjun Tetean	6	4	7	4	5	2	4	3	4,4
14	Air Terjun Rantepongko	4	4	5	4	5	3	4	3	4,0
15	Pemandian Air Panas Kole	4	4	4	7	4	7	4	3	4,6
16	Pemandian Air Panas Rante-rante	2	2	2	4	4	7	2	2	3,1
17	Pemandian Air Panas Rante	4	3	6	7	4	6	4	5	4,9

	Katoan									
18	Pemandian Air Panas Nusantara	4	3	6	7	4	7	4	6	5,1
19	Mata Air Panas Desa Osango	5	3	4	7	4	6	4	3	4,5
20	Situs Batu Kumila'	5	6	4	5	3	4	5	4	4,5
21	Bukit Pa'to'longan	5	3	6	7	6	6	4	5	5,3
22	Sungai Mamasa	4	3	4	5	5	6	4	3	4,3
23	Gereja Tua	5	5	6	5	5	6	5	4	5,1
<b>Rata-rata</b>		4,8	4,2	4,9	5,7	4,6	5,6	4,6	4,1	4,8

**Tabel 11. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Mamasa**

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

*Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa*

## 2) Kecamatan Tawalian

Kecamatan Tawalian merupakan daerah penyangga sekaligus menjadi wilayah perluasan pengembangan Ibukota Kabupaten Mamasa. Sebelum dimekarkan kecamatan ini mulanya merupakan bagian dari Kecamatan Mamasa. Total luas Kecamatan Tawalian adalah 45,99 km<sup>2</sup> (4.599 ha) atau 1,53% dari luas total kabupaten dengan pembagian wilayah administratif terdiri atas 3 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Tawalian masih memiliki kawasan hutan lindung seluas 615,46 ha.

Letak yang berdekatan dengan ibukota kabupaten membuat Kecamatan Tawalian memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata. Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Mamasa

juga akan berkeliling ke Kecamatan Tawalian, baik dengan berjalan kaki (*trekking*) maupun menggunakan kendaraan untuk melihat potensi wisata yang dimilikinya

Berdasarkan hasil survey, terdapat 5 obyek daya tarik wisata budaya dan 2 obyek daya tarik wisata alam di Kecamatan Tawalian yang berada pada kondisi rata-rata skor 4,9 atau agak baik (Tabel 12). Potensi wisata budaya di Kecamatan Tawalian antara lain adalah Gereja Klasis Tawalian yang merupakan bangunan gereja tertua di Sulawesi Barat, serta satu kompleks preservasi berbagai bentuk arsitektur rumah tradisional Mamasa di Kampung Tondok Sirenden. Adapun potensi daya tarik wisata alam di Kecamatan Tawalian antara lain adalah Air Terjun Parak dan mata air panas di Rante Kamiri yang masing-masing berjarak sekitar 5 km dan 4 km dari Ibukota Kabupaten Mamasa.

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Gereja Tua Tawalian	4	7	4	5	4	6	7	6	5,4
2	Rumah Tradisional Tondok Sirenden	5	4	5	7	5	6	4	6	5,3
3	Kuburan Tua Nenek Pattoni	5	6	4	4	3	6	4	3	4,4
4	Kuburan Batutu Tatale	5	5	4	4	4	6	5	4	4,6
5	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	7	6	6	5	5	6	7	6	6,0
6	Air Terjun Parak	6	5	6	4	4	5	4	4	4,8
7	Mata Air Panas Rantekamiri	4	3	4	6	4	5	5	3	4,3
Rata-rata		5,1	5,1	4,7	5,0	4,1	5,7	5,1	4,6	4,9

. Tabel 12. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Tawalian

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baiK, 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

### 3) Kecamatan Sesenapadang

Kecamatan Sesenapadang terdiri atas 10 desa. Total luas Kecamatan Sesenapadang adalah 152,70 km<sup>2</sup> (15.270 ha) atau 5,08% dari luas total kabupaten. Kecamatan ini memiliki kawasan hutan seluas 5.026,10 ha. Wilayah kecamatan Sesenapadang bervariasi dari landai



hingga berbukit-bukit di bagian baratnya yang berbatasan dengan Kecamatan Pana. Pada bagian yang landai di kecamatan ini dapat dilihat persawahan yang begitu indah terhampar. Keindahan alam tersebut membuat banyak wisatawan yang melakukan *trekking* dari Kota Mamasa menuju lokasi ini.

Secara keseluruhan daya tarik wisata di kecamatan Sesenapadang terdiri atas 8 daya tarik wisata berupa 2 obyek wisata alam dan 6 obyek wisata budaya (Tabel 13) . Salah satu keunggulan di Sesenapadang berupa perkampungan masyarakat yang masih mempertahankan budaya asli mereka berupa perkampungan tradisional dan rumah adat. Di tepi jalan utama Perkampungan Orobua akan dapat dijumpai situs Benda Cagar Budaya berupa *Banua Layuk* atau rumah pemimpin adat yang berukuran tinggi dan besar. Rumah kayu yang sudah berusia ratusan tahun tersebut sampai sekarang masih ditempati oleh keturunan pemimpin adat Orobua. Hasil dari evaluasi daya tarik wisata di Kecamatan Sesenapadang berada pada skor 5,3 atau agak baik.

**Tabel 13. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Sesenapadang**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Perkampungan Tradisional Orobua	6	6	5	7	5	6	6	5	5,8
2	Rumah Adat Parengnge' Orobua	6	7	6	7	5	6	6	5	6,0
3	Perkampungan Tradisional Orobua Timur	5	3	6	6	6	4	6	5	5,1
4	Perkampungan Tradisional Sepang	5	3	4	6	6	5	5	5	4,9
5	Kuburan Pahlawan Demmatande & Benteng Salubanga	5	5	6	6	6	6	6	5	5,6
6	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	7	6	6	5	5	6	7	6	6,0
7	Air Terjun Minanga	4	3	5	5	5	4	4	5	4,4
8	Bukit Marudinding	6	6	7	6	6	4	4	4	5,4
9	Panorama Alam Lisuan Ada'	5	4	6	6	6	5	4	4	5,0
<b>Rata-rata</b>		5,4	4,8	5,7	6,0	5,6	5,1	5,3	4,9	5,3

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

#### 4) Kecamatan Balla

Kecamatan Balla terdiri dari 8 desa dengan dengan total luas 59,53 km<sup>2</sup> (5953 ha) atau 1,98 % dari luas Kabupaten Mamasa. Sejumlah 285,46 ha lahan di Kecamatan Balla masih berupa kawasan hutan. Kecamatan di bagian selatan Kota Mamasa ini memiliki kondisi topografi yang berbukit-bukit.

Balla merupakan kecamatan yang kaya dengan potensi wisata budaya. Dari survey yang telah dilakukan, terdapat 14 daya tarik wisata di Kecamatan Balla dimana sebagian besar merupakan obyek wisata budaya (9 obyek ), dan sisanya (5 obyek) berupa wisata alam (Tabel 14.).

**Tabel 14. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Balla**

No	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Ratarata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Kuburan Tua Tedong-tedong	7	7	6	6	3	7	4	6	5,8
2	Perkampungan Tradisional Balla Peu'	7	6	6	7	5	6	6	6	6,1
3	Perkampungan tradisional Ranteballa Kalua'	6	5	5	6	5	6	5	5	5,4
4	Perkampungan Tradisional Batarirak	7	5	6	7	5	5	6	5	5,8
5	Perkampungan Tenun Rante Sepang	6	6	4	7	6	7	7	5	6,0
6	Rumah Adat Balla Satanetean	6	5	5	6	5	7	6	5	5,6
7	Rumah Adat Tumangke	6	5	6	5	5	6	6	5	5,5
8	Gua Maria Bukit Pena	5	6	6	4	4	7	6	5	5,4
9	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	7	7	6	5	5	6	6	6	6,0
10	Bukit Buntu Mussa	5	5	7	6	5	4	4	5	5,1
11	Air Terjun Tambuk Manuk	5	4	5	4	4	5	4	4	4,4
12	Air Terjun Allo Dio	5	4	5	4	4	5	4	4	4,4
13	Air Terjun Sareayo	5	4	4	4	4	5	4	4	4,3
14	Situs Batu Sikoba	5	4	4	5	4	5	4	4	4,4
<b>Rata-rata</b>		5,9	5,2	5,4	5,4	4,6	5,8	5,1	4,9	5,3

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

*Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa*

Kecamatan Balla memiliki Desa Wisata Balla Peu' yang merupakan perkampungan tradisional terpanjang di Mamasa, terdiri dari hampir seratus rumah tradisional yang dibangun berderet, lengkap dengan lumbung padi di tiap halamannya. Perkampungan tradisional Batarirak yang masih menjaga tradisi dan seni budaya asli. Situs kuburan tua Tedong-tedong yang diduga berusia sama tuanya dengan peradaban di Lembang Mamasa itu sendiri serta rumah-rumah pemangku adat di banyak dusun yang masih terpelihara dengan baik. Terdapat juga Perkampungan Tenun Rante Sepang yang menjadi penghasil utama bagi kebutuhan kain tenunan tradisional di Mamasa dan Toraja, serta Obyek Gua Maria di Bukit Pena yang menjadi lokasi ziarah umat Katolik.

Selain beberapa situs budaya dan perkampungan tradisional, di Kecamatan Balla dapat dinikmati pemandangan alam yang sangat indah dari Buntu Mussa, yakni sebuah bukit yang terletak tidak jauh dari perkampungan tradisional Ballapeu yang memiliki fasilitas *camping ground*, 4 unit shelter dan 1 unit dapur di bagian puncaknya. Beberapa air terjun alam dapat dijumpai pada jarak tempuh yang dekat dari jalan utama antara lain Air Terjun Tambuk Manuk, Air Terjun Allo Dio dan Air Terjun Sareayo.

## 5) Kecamatan Tanduk Kalua'

Kecamatan Tanduk Kalua' terdiri dari 12 desa dengan luas mencapai 120,85 km<sup>2</sup> (12.085 ha) atau 4,02 % dari luas total Kabupaten Mamasa. Kecamatan yang konturnya sebagian besar berbukit-bukit ini masih memiliki kawasan hutan seluas 4.845,54 ha.

Tanduk Kalua merupakan titik pertemuan antara jalan poros di Kabupaten Mamasa yang mengarah ke Kota Mamuju melalui Mambi dan jalan poros yang mengarah ke Kabupaten Polewali Mandar di selatan. Kebanyakan obyek wisata di kecamatan ini berupa obyek wisata alam sebanyak 4 obyek. Adapun obyek wisata budaya dapat ditemukan pada Perkampungan Tradisional Mala'bo.

**Tabel 15. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di KecamatanTanduk Kalua'**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Perkampungan Tradisional Mala'bo	5	6	6	6	6	6	5	5	5,6
2	Air Terjun Sakunan	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
3	Air Terjun Ba'ba Rapa'	5	5	6	4	4	3	4	4	4,4
4	Mata Air Panas Tamalanti'	4	4	4	4	4	6	4	4	4,3
5	Tebing Mataurang	4	4	4	6	4	4	6	4	4,5
Rata-rata		4,4	4,6	4,8	4,8	4,4	4,6	4,6	4,2	4,6

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas;  
F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas.

*Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk  
Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa*

## **6) Kecamatan Sumarorong**

Sumarorong merupakan kecamatan yang berperan penting dalam simpul transportasi wisata di Kabupaten Mamasa karena di kecamatan ini terdapat sebuah bandar udara domestik. Wilayah Kecamatan Sumarorong terdiri dari 8 desa dan 2 kelurahan dengan luas 254 km<sup>2</sup> (25.400 ha) atau 8,45% dari luas total kabupaten. Kecamatan ini masih memiliki kawasan hutan seluas 14.065,17 ha, antara lain hutan lindung di Gunung Sareong.

Daya tarik wisata di Kecamatan Sumarorong berjumlah 5 obyek wisata, yang terdiri dari 3 obyek wisata alam dan 2 obyek wisata budaya. Selain Air Terjun Liawan yang merupakan salah satu obyek wisata alam andalan yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Sumarorong juga terdapat beberapa air terjun seperti Air Terjun Laloeng dan Air Terjun Bakkele. Air Terjun Bakkele berada di tepi jalan akses menuju Nosu, sehingga sangat mudah dijangkau, dan apabila ditata melalui perencanaan yang tepat dapat menjadi obyek wisata singgah yang menarik.

Pada Kecamatan Sumarorong terdapat jalan poros ke arah Kecamatan Nosu yang memiliki daya tarik wisata sepanjang perjalanan. Salah satunya terdapat di kampung Minanga, Kelurahan Tabone. Di lokasi

tersebut, terdapat kombinasi pemandangan alam yang indah, bentangan sawah terassering, pekuburan tradisional (alang), serta perkebunan kopi dan kakao. Perencanaan tapak yang tepat dapat mengangkat lokasi tersebut menjadi tapak agrowisata yang ideal menjadi tempat persinggahan masyarakat yang sedang dalam perjalanan menuju Nosu.

**Tabel 16. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Sumarorong**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Ratarata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	7	7	7	5	6	5	6	6	6,1
2	Air Terjun Liawan	5	4	6	5	6	4	4	7	5,1
3	Air Terjun Laloeng	4	4	6	4	5	4	4	5	4,5
4	Air Terjun Bakkele'	3	4	4	5	5	7	4	5	4,6
5	Agrowisata Kopi dan Kakao	6	4	6	4	6	7	5	3	5,1
<b>Rata-rata</b>		5,0	4,6	5,8	4,6	5,6	5,4	4,6	5,2	5,1

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

## 7) Kecamatan Messawa

Kecamatan Messawa merupakan pintu gerbang Kabupaten Mamasa dari arah Kabupaten Polewali Mandar di selatan. Kecamatan Messawa terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan. Total luas Kecamatan Messawa adalah 150,88 km<sup>2</sup> (15.088 ha) atau 5,02% dari luas total

kabupaten di mana 9.386,23 ha di antaranya masih berupa kawasan hutan.

Daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Messawa berupa 7 obyek wisata, yang terdiri dari 4 obyek wisata budaya dan 3 obyek wisata alam (Tabel 17). Pemandian Air Panas Malimbong merupakan obyek wisata pemandian alami yang banyak dikunjungi wisatawan, tidak hanya dari Kabupaten Mamasa melainkan juga dari Kabupaten Polewali Mandar yang umumnya datang berakhir pekan secara berombongan. Obyek wisata budaya di Kecamatan Messawa yang telah dikenal luas adalah Rumah Adat Makuang di Desa Makuang merupakan salah satu rumah adat tertua di Kabupaten Mamasa. Rumah ini dihuni oleh pemimpin adat setempat yang dikenal dengan sebutan *tomakaka*.



**Tabel 17. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Messawa**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Rumah Adat Makuang	7	7	6	6	5	6	7	6	6,3
2	Rumah Adat Dadeko Malimbong	6	6	5	5	5	6	5	5	5,4
3	Rumah Adat Tappang	4	6	3	5	5	6	4	3	4,5
4	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	7	7	7	5	6	5	6	6	6,1
5	Air Terjun Sollokan	5	5	5	4	5	4	4	3	4,4
6	Pemandian Air Panas Malimbong	4	5	6	6	4	6	4	5	5,0
7	Gua Lo'ko Ledo	5	5	5	6	3	3	4	3	4,3
<b>Rata-rata</b>		5,4	5,9	5,3	5,3	4,7	5,1	4,9	4,4	5,1

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

## 8) Kecamatan Rantebulahan Timur

Kecamatan Rantebulahan Timur terdiri dari 7 desa dengan total luas sejumlah 31,87 km<sup>2</sup> (3.187 ha) atau 1,06 % dari luas total kabupaten. Potensi obyek wisata yang terdapat di Rantebulahan Timur adalah 2 obyek wisata alam yakni Air Terjun Salulemo dan sebuah gua alam yang terletak di Desa Buangin (Tabel 18).

**Tabel 18. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Rantebulahan Timur**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Air Terjun Salulemo	5	4	6	6	4	4	4	3	4,5
2	Gua Alam	5	4	5	4	3	3	4	3	3,9
<b>Rata-rata</b>		5,0	4,0	5,5	5,0	3,5	3,5	4,0	3,0	4,2

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARD) Kabupaten Mamasa

## 9) Kecamatan Mehalaan

Kecamatan Mehalaan terdiri dari 7 desa dengan luas 162,43 km<sup>2</sup> (16.243 ha) atau 5,40 % dari luas total kabupaten. Daya tarik wisata kecamatan ini terletak pada kombinasi pemandangan alam yang menakjubkan. Sebagian besar didominasi pemandangan persawahan yang sangat indah.

**Tabel 19. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Mehalaan**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Bentang Alam Persawahan	5	3	6	5	4	5	6	3	4,6
<b>Rata-rata</b>		5,0	3,0	6,0	5,0	4,0	5,0	6,0	3,0	4,6

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARD) Kabupaten Mamasa

## **10) Kecamatan Mambi**

Kecamatan Mambi merupakan salah satu wilayah pengembangan terpenting di Kabupaten Mamasa bagian barat. Kecamatan ini berada di titik tengah jalur poros yang menghubungkan Kota Mamasa dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju sehingga berpotensi menjadi salah satu pusat perniagaan serta simpul transportasi angkutan barang dan penumpang.

Kecamatan Mambi yang berada di ketinggian 175-1.550 mdpl ini terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan. Total luas kecamatan adalah 142,66 km<sup>2</sup> (14.266 ha) atau 4,75% dari luas total kabupaten dengan 8.051,62 ha di antaranya berupa kawasan hutan.

Terdapat 7 obyek daya tarik wisata di Kecamatan Mambi, terdiri dari 5 obyek wisata alam dan 2 obyek wisata budaya (Tabel 20). Pada kecamatan ini dapat ditemukan benda bersejarah dari masa-masa awal penyebaran Agama Islam di Kabupaten Mamasa yakni sebuah Al-Qur'an tua yang cukup langka dan kuburan seorang tokoh pendakwah Agama Islam dari Mesir yang konon dianggap keramat oleh masyarakat.

Aksesibilitas obyek wisata di Mambi bernilai rendah karena jalur transportasi ke Mambi dari Mamasa berada dalam kondisi rusak. Sehingga untuk mengakses obyek-obyek wisata tersebut memerlukan usaha yang tidak ringan.

**Tabel 20. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Mambi**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Kuburan To Salama' dan Al-Qur'an Tua	5	6	4	5	5	2	7	3	4,6
2	Pasar Mambi	4	4	4	5	7	5	6	4	4,9
3	Air Terjun Salu Allo	4	3	4	4	4	6	4	3	4,0
4	Air Terjun Limba Lepong	4	3	5	4	4	6	4	3	4,1
5	Gua Leang Ledo	5	5	6	5	3	3	3	3	4,1
6	Mata Air Panas Indo'banua	5	5	5	4	5	2	4	3	4,1
7	Sungai Mambi	4	2	5	4	4	6	4	3	4,0
Rata-rata		4,4	4,0	4,7	4,4	4,6	4,3	4,6	3,1	4,3

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

## 11) Kecamatan Bambang

Kecamatan Bambang yang berada pada ketinggian 950-1.475 mdpl, terdiri dari 20 desa. Luas Kecamatan ini adalah 136,17 km<sup>2</sup> (13.617 ha) atau 4,53% dari luas total kabupaten dengan 4.737,88 hektarnya berupa kawasan hutan.

**Tabel 21. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Bambang**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Perkampungan Tradisional Minanga	5	5	5	6	5	6	6	4	5,3
2	Perkampungan Tradisional Saludengen	5	5	6	6	5	4	6	3	5,0
3	Perkampungan Tradisional Ulumambi	6	5	5	5	5	4	6	3	4,9
4	Perkampungan Kuno Kora'	6	7	4	5	4	4	4	3	4,6
5	Perkampungan Kuno Tapaom	6	7	4	5	4	4	4	3	4,6
6	Rumah Tradisional Lentong	5	4	4	5	5	5	4	4	4,5
7	Rumah Tradisional Lateompom	5	4	4	5	5	5	4	4	4,5
8	To dipandan, Kuburan dalam Gua	5	5	4	6	4	5	4	3	4,5
9	Upacara Ritual Ada' Mappurondo	7	7	7	3	3	4	7	4	5,3
10	Air Terjun Sambabo	7	7	7	5	5	4	5	5	5,6
11	Bumi Perkemahan Rantepeni	4	4	4	6	6	5	4	4	4,6
12	Bukit Takkatio	5	3	6	5	5	5	4	3	4,5
13	Gunung Pasapa'	6	5	7	6	4	4	5	5	5,3
<b>Rata-rata</b>		5,5	5,2	5,2	5,2	4,6	4,5	4,8	3,7	4,9

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

Daya tarik wisata yang terdapat di Kecamatan Bambang berupa 13 obyek wisata, terdiri dari 9 daya tarik wisata peninggalan budaya dan 4 daya tarik wisata terkait alam (Tabel 21). Daya tarik wisata budaya yang utama di Kecamatan Bambang adalah banyaknya jumlah penganut kepercayaan tua *Mappurondo* yang masih menjalankan adat istiadat dengan berbagai upacara ritualnya yang khas. Beberapa Perkampungan Tradisional Masyarakat *Mappurondo* dapat dijumpai tersebar di hampir seluruh Kecamatan Bambang mulai dari Dusun Minanga, Saludengen, hingga Ulumambi.

Potensi obyek wisata alam unggulan yang dimiliki Kecamatan Bambang adalah Air Terjun Sambabo yang merupakan air terjun tertinggi di Pulau Sulawesi. Selain itu juga terdapat Gunung Pasapa' yang sering dijadikan lokasi pendakian sekaligus berkemah oleh para pecinta alam. Adapun Bumi Perkemahan Rantepeni yang terletak di jalan menuju Air Terjun Sambabo sangat berpotensi dikembangkan menjadi lokasi *camping ground* untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di kalangan pelajar.

## **12) Kecamatan Aralle**

Kecamatan Aralle terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. Total luas Kecamatan Aralle adalah 173,96 km<sup>2</sup> (17.396 ha) atau 5,79% dari luas total Kabupaten Mamasa, dengan 13.286,33 ha berup kawasan hutan.

Daya tarik wisata di Kecamatan Aralle terdiri dari 3 obyek wisata alam. Pemandian air panas terdapat di Desa Salukanan dan Desa Salutambun. Sedangkan satu air terjun kecil berukuran tinggi sekitar 5 m bernama Sarambu (Air Terjun) Pipping terletak di Desa Panetean.

**Tabel 22. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Aralle**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Pemandian Air Panas Uhailanu	4	5	5	4	5	6	4	5	4,8
2	Mata Air Panas Salutambun	4	5	4	4	5	6	4	4	4,5
3	Air Terjun Pipping	4	4	4	5	5	4	4	3	4,1
Rata-rata		4,0	4,7	4,3	4,3	5,0	5,3	4,0	4,0	4,5

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPADA) Kabupaten Mamasa

### 13) Kecamatan Buntu Malangka

Kecamatan Buntu Malangka terdiri dari 11 desa. Total luas Kecamatan Buntu Malangka adalah 211,71 km<sup>2</sup> (21.171 ha) atau 7,04% dari luas total kabupaten. Daya tarik wisata di Kecamatan Buntu Malangka berupa 9 obyek wisata, terdiri dari 4 obyek wisata budaya dan 5 obyek wisata alam. Masyarakat penganut kepercayaan *Mappurondo* dengan perkampungan dan upacara adatnya yang khas juga banyak tinggal di kecamatan ini.





**Tabel 23. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Buntu Malangka**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Ratarata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Rumah Adat Banua Kasalle	6	6	4	5	4	5	4	3	4,6
2	Perkampungan Tradisional Rante Berang	6	5	5	6	4	4	5	4	4,9
3	Tugu Perjuangan Taora	5	5	4	6	6	4	4	5	4,9
4	Upacara Ritual Ada' Mappurondo	7	7	7	3	3	4	7	4	5,3
5	Air Terjun Lomba' Tera	6	3	5	6	6	6	3	4	4,9
6	Air Terjun Maksaruran	5	3	4	5	6	4	3	3	4,1
7	Batu Lea Memoro	4	4	3	6	6	4	4	3	4,3
8	Air Panas Rante Berang	4	4	3	6	4	4	4	3	4,0
9	Agrowisata Kopi	4	4	5	6	6	5	5	4	4,9
Rata-rata		5,2	4,6	4,4	5,4	5,0	4,4	4,3	3,7	4,6

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

#### 14) Kecamatan Tabulahan

Kecamatan Tabulahan terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan. Luas Kecamatan ini mencapai 513,95 km<sup>2</sup> (51.395 ha) atau 17,10% dari luas total kabupaten, dengan 33.848,97 ha diantaranya adalah kawasan hutan.

Kecamatan Tabulahan memiliki 6 obyek daya tarik wisata, berupa 4 obyek wisata budaya dan 2 obyek wisata alam. Tabulahan dikenal sebagai wilayah yang dituakan dalam tatanan adat yang berlaku di Kabupaten Mamasa, mengingat wilayah ini diyakini merupakan tempat tinggal pertama bagi nenek-moyang manusia di wilayah *Pitu Ulunna Salu* hingga Lembang Mamasa. Kecamatan Tabulahan juga menjadi salah satu kantung populasi terbesar masyarakat adat *Mappurondo* yang masih tersisa di Kabupaten Mamasa, akan tetapi beratnya medan serta buruknya infrastruktur akses jalan membuat komunitas tersebut belum sepenuhnya dapat dipantau oleh dunia luar.

**Tabel 24. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Tabulahan**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Padaling (Gong) Nenek Pongka Padang	7	7	4	5	3	4	5	3	4,8
2	Kampung Tua Buntu Bulu	6	6	5	6	4	4	6	4	5,1
3	Rumah Adat Saluleang	6	7	5	6	4	4	6	4	5,3
4	Upacara Ritual Ada' Mappurondo	7	7	7	3	3	4	7	4	5,3
5	Gunung Gandang Dewata	6	7	7	5	3	3	5	2	4,8
6	Air Terjun Podiba	6	5	7	5	5	4	4	3	4,9
<b>Rata-rata</b>		6,3	6,5	5,8	5,0	3,7	3,8	5,5	3,3	5,0

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPADA) Kabupaten Mamasa

Kecamatan Tabulahan dengan wilayahnya yang tergolong luas serta memiliki ragam bentang alam dari dataran rendah hingga pegunungan menyimpan banyak potensi daya tarik wisata alam yang masih terpendam. Belum banyak diketahuinya potensi obyek wisata di Tabulahan terutama disebabkan kondisi akses keseluruhan wilayahnya yang tergolong masih sangat terbatas. Wisata alam di Tabulahan yang sudah dikenal memiliki nilai keunggulan adalah Gunung Gandang Dewata yang merupakan puncak tertinggi dari rangkaian Pegunungan Quarles di bagian barat Sulawesi. Selain itu, juga ditemukan Air Terjun Podiba di Desa Malatiro dengan ketinggian lebih dari 100 meter sehingga termasuk dalam deretan air terjun tertinggi di Kabupaten Mamasa.

#### **15) Kecamatan Tabang**

Kecamatan Tabang memiliki luas wilayah 304,51 km<sup>2</sup> (30.451 ha) atau 10,13% dari luas total kabupaten. Kecamatan ini memiliki kawasan hutan seluas 26.664,52 ha. Kecamatan Tabang terbagi atas 6 desa dan 1 kelurahan.

Tabang merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja. Ibukota kecamatan Tabang merupakan jalur akses utama bagi para wisatawan yang melakukan *trekking* menuju Ponding dan Bittuang di Tana Toraja. Jalur *trekking* sepanjang 96 km yang digunakan tersebut sebetulnya merupakan jalan nasional poros utama penghubung Kabupaten Mamasa dan Tana Toraja, namun saat ini

kondisinya masih rusak parah sehingga baru bisa dilalui oleh mobil berspesifikasi medan berat, ojek, maupun berjalan kaki. Daya tarik wisata yang dapat dijumpai di kecamatan Tabang sebanyak 4 obyek wisata, yang terdiri dari 2 obyek wisata budaya dan 2 obyek wisata alam (Tabel 25).

**Tabel 25. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Tabang**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Rumah Tradisional Patotong	6	7	6	6	5	3	6	4	5,4
2	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	5	6	6	4	5	6	6	6	5,5
3	Bukit Tado Kalua	5	4	6	7	5	3	4	3	4,6
4	Sungai Masuppu	5	4	6	3	5	4	4	3	4,3
Rata-rata		5,8	5,5	6,0	5,0	5,0	4,0	5,0	4,0	4,9

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

## 16) Kecamatan Pana

Kecamatan Pana terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. Total luas Kecamatan Pana adalah 181,27 km<sup>2</sup> (18.127 ha) atau 6,03% dari luas total kabupaten. Kecamatan ini memiliki kawasan hutan seluas 8.021,58 ha. Terdapat 4 obyek wisata di kecamatan Pana yang terdiri dari 3 obyek wisata budaya dan 1 obyek wisata alam dengan penilaian agak baik (Tabel23.) Tidak kalah unik dengan Batu Laledong (batu bergoyang) yang tidak jatuh meski tampak tak seimbang, terdapat juga sebuah rumah tua di Kampung Liasa, Kelurahan Pana yang konon memiliki sebagian tiang-tiang penyangga utama dari kayu jenis tumbuhan lombok (cabai) yang berukuran raksasa.

Diperlukan cukup waktu dan tenaga untuk mencapai semua obyek wisata di Kecamatan Pana mengingat kecamatan ini memiliki jarak akses terjauh dari Ibukota Kabupaten Mamasa serta kondisi infrastruktur jalan yang sangat buruk. Tidak semua kendaraan dapat mencapai kecamatan ini, bahkan hanya kendaraan sepeda motor dan mobil-mobil berspesifikasi khusus yang dapat menembusnya.

**Tabel 26. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Pana**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Rumah Tiang Lombok	6	6	4	6	5	5	5	4	5,1
2	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	7	7	6	4	5	6	6	6	5,9
3	Perkampungan Tradisional Mamullu	6	5	5	6	5	4	5	4	5,0
4.	Batu Laledong	7	4	6	7	4	5	4	4	5,1
<b>Rata-rata</b>		6,5	5,5	5,3	5,8	4,8	5,0	5,0	4,5	5,3

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa

## 17) Kecamatan Nosu

Kecamatan Nosu terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan. Total luas Kecamatan Nosu adalah 113,33 km<sup>2</sup> (11.333 ha) atau 3,77% dari luas total kabupaten. Kecamatan ini memiliki kawasan hutan seluas 3.567,23 ha. Kecamatan Nosu merupakan kecamatan tertinggi di Sulawesi Barat dengan ketinggian 1.437-2.450 mdpl. Ketinggian letak serta karakteristik

wilayah Nosu yang dikelilingi perbukitan dan hutan lebat menciptakan suasana sejuk dan dingin yang khas sehingga Nosu dapat disebut sebagai "Malino-nya" Sulawesi Barat. Di pagi hari Nosu selalu diselimuti embun kabut yang baru menghilang sekitar jam 9 pagi.

Nosu merupakan daerah pertanian yang unik. Dinginnya suhu di Nosu membuat masa panen di daerah ini menjadi sangat lama, yakni sekitar 8 bulan untuk jenis padi yang khas, yakni padi hitam. Selain padi hitam, Nosu juga terkenal sebagai penghasil utama kopi arabika, markisa dan alpukat.

Kecamatan Nosu memiliki 10 obyek daya tarik wisata, yang terdiri dari 6 obyek wisata budaya dan 4 obyek wisata alam. Perjalanan menuju Kecamatan Nosu sangat menyegarkan. Pemandangan alam yang tersaji mulai dari kecamatan Sumarorong menuju Nosu sangat indah, mulai dari areal persawahan sampai kombinasi perbukitan yang sangat menawan, meskipun saat ini akses jalan masih berada dalam kondisi rusak.

**Tabel 27. Skor evaluasi potensi daya tarik wisata di Kecamatan Nosu**

No.	Nama Daya Tarik Wisata	Skor Penilaian								Rata-rata
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Ritual Mangngaro	7	7	7	3	6	6	7	6	6,1
2	Rumah Adat Batupapan	5	5	5	6	5	5	4	4	4,9
3	Rumah Adat Banua Sondong Sura'	5	4	5	6	5	5	4	4	4,8
4	Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	7	7	7	5	6	5	6	6	6,1
5	Pasar Nosu	6	4	5	5	7	5	6	4	5,3
6	Agrowisata Padi Hitam	6	5	6	5	6	5	5	3	5,1
7	Air Terjun Rimbe	6	4	7	5	5	4	4	3	4,8
8	Air Terjun Lekhang	5	4	5	5	6	4	4	4	4,6
9	Air Terjun Parinding	4	4	5	5	5	4	4	4	4,4
10	Bukit Rangri'	6	4	6	7	7	5	4	6	5,6
<b>Rata-rata</b>		5,7	4,8	5,8	5,2	5,8	4,8	4,8	4,4	5,2

Keterangan: A=keunikan; B=kelangkaan; C=keindahan; D=seasonalitas; E=sensitifitas; F=aksesibilitas; G=fungsi sosial; H= ketersediaan fasilitas. 1=sangat tidak baik; 2=tidak baik; 3=agak tidak baik; 4=biasa saja; 5=agak baik; 6=baik; 7=sangat baik.

Sumber : Hasil Penelitian terdahulu yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPADA) Kabupaten Mamasa

Selanjutnya hasil dari Inventarisasi dan evaluasi terhadap Objek yang potensial tersebut, Pemerintah Daerah memilih beberapa objek untuk dijadikan prioritas dalam mengembangkannya karena disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah seorang staf bidang pengembangan destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Bapak Ibrahim Paotonan, bahwa:



“awalnya kita data dulu semua potensi yang ada, setelah itu kita memilih yang mana yang dinilai urgent dengan melihat skala prioritas. Tidak usah terlalu banyak dulu, pokoknya kita fokus pada beberapa yang diprioritaskan agar tepat sasaran”<sup>22</sup>

Objek-objek yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa antara lain adalah Air Terjun Liawan, Air Terjun Sambabo, Pemandangan Alam Buntu Mussa', Permandian Air Panas Rante-Rante, Permandian Air Panas Malimbong, Kuburan tua tedong-tedong, Desa Wisata Balla Peu', Air terjun Mambulilling.<sup>23</sup>

#### **b. Membenahi objek wisata yang telah dikelola**

Upaya pengembangan objek / daya tarik wisata di Kabupaten Mamasa dilakukan juga dengan membenahi objek wisata yang telah dikelola. Jadi, Pemerintah daerah melakukan pembenahan secara bertahap pada objek-objek wisata yang telah dikelola sebelumnya dan dianggap urgent karena disesuaikan dengan minimnya anggaran daerah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bupati Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Badawi, MH bahwa “Dari tahun ke tahun kita lakukan pembenahan sedikit-sedikit terhadap objek-objek wisata yang dianggap urgent tapi disesuaikan dengan anggaran yang ada juga.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Staf bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Bapak Ibrahim Paotonan.

<sup>23</sup> Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Bapak Sugiono, S.Pd selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa

<sup>24</sup> Wawancara pada tanggal 10 April 2017 dengan Bupati Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Badawi, MH

Objek / daya tarik wisata yang sedang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa salah satunya adalah Air Terjun Liawan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sugiono, S.Pd selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, yang mengatakan bahwa: “Kalau objek wisata alam, pemerintah daerah sedang melakukan pembenahan salah satunya di objek wisata Air Terjun Liawan. Sudah ada beberapa fasilitas yang kita bangun di dalam sebagai penunjang pariwisata.”<sup>25</sup>

Objek ini merupakan salah satu objek wisata yang diunggulkan dan diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa untuk dikembangkan, di samping karena memiliki keunikan dan keindahan juga karena merupakan objek yang telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat dan letaknya yang strategis yaitu di Kecamatan Sumarorong yang posisinya berada di pertengahan jalan poros Polewali-Mamasa. Air terjun Liawan ini terletak di kawasan hutan lindung yang posisinya tidak terlalu jauh dari pusat Kecamatan Sumarorong. Dapat ditempuh dengan jalan kaki, kendaraan roda dua, maupun roda empat. Pembenahan objek wisata yang dilakukan pemerintah daerah pada objek wisata Air terjun Liawan ialah dengan membangun fasilitas-fasilitas di dalam kawasan Air terjun berupa penginapan (5 kamar model banua mamasa modern, 3 kamar model rumah modern), kamar ganti/WC umum untuk pria dan

---

<sup>25</sup> Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Bapak Sugiono, S.Pd selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa

wanita berjumlah masing-masing 2 kamar, kolam ikan, kantin, gazebo-gazebo atau pondok-pondok wisata, dan Baruga (tempat pertemuan/rapat) bernuansa alam. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, kondisi tempat tersebut masih tidak begitu terurus dan kurang bersih. Ada beberapa bangunan yang telah rusak bahkan hilang. Hal ini menunjukkan salah satu kelemahan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata tersebut.

Selanjutnya, Pemerintah daerah juga telah membenahi permandian air panas rante-rante, yaitu salah satu permandian air panas yang dimiliki oleh pemerintah yang terletak di Kota Mamasa dengan membenahi kolam-kolam permandian dan membangun villa / penginapan di sekitar kolam sebagai penunjang objek wisata tersebut. Hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti bersama Pengelola Air Panas Rante-rante, Ibu Yosephine yang mengatakan bahwa: “Pemerintah yang bangun ini semua. Jadi selama saya yang pegang ini permandian, pemerintah rutin melakukan pembangunan.”<sup>26</sup>

Namun, tempat tersebut terlihat tidak begitu ramai dikunjungi oleh pengunjung. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, salah satu kendalanya adalah air panas ini dikalah saing dengan permandian air panas Nusantara milik swasta ( Nusantara Group ) yang lebih komersil dan lebih diminati oleh pengunjung dan letaknya tepat bersebelahan

---

<sup>26</sup> Wawancara pada tanggal 28 Februari 2017 dengan Pengelola Air Panas Rante-rante, Ibu Yosephine

dengan lokasi permandian air panas rante-rante. Objek wisata lain yang sedang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa adalah situs sejarah To'Pao, Permandian air panas Malimbong, dan lain lain.

#### **4.5.1.2. Melestarikan kebudayaan dan kesenian Kabupaten Mamasa**

Selain memiliki kekayaan alam yang alami dan menarik, Kabupaten Mamasa pun identik dengan kebudayaan yang beraneka ragam dan unik, kebudayaan yang unik yang dimiliki oleh Kabupaten Mamasa diantaranya upacara-upacara adat, kepercayaan (religi) yang masih kental dengan adat istiadat (adat mapurondo), serta atraksi tari-tarian tradisional maupun kreasi, cagar budaya dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya.

Untuk itu, dalam meningkatkan atraksi wisata Kabupaten Mamasa di bidang kebudayaan dan kesenian, pemerintah daerah telah melestarikan kebudayaan dengan memelihara cagar-cagar budaya dan peninggalan bersejarah serta membina sanggar seni ( musik bambu, tari-tarian) yang ada di Kabupaten Mamasa dan memberikan ruang kepada para seniman-seniman daerah untuk berkreasi. Namun, hal ini dapat dikatakan belum terlaksana secara maksimal karena belum ada sebuah wadah tempat perkumpulan para seniman daerah serta museum budaya di Kabupaten Mamasa yang dapat lebih mendukung pelestarian kebudayaan dan kesenian Kabupaten Mamasa ini.

#### **4.5.1.3. Melakukan promosi daya tarik wisata.**

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan atraksi di Kabupaten Mamasa tentunya dibarengi dengan mempromosikan daya tarik wisata yang ada agar lebih dikenal dan menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Bagaimana orang lain dapat mengetahui adanya hal-hal yang menarik di Kabupaten Mamasa apabila tidak dipromosikan. Untuk itu, pemerintah daerah mempromosikan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa dengan cara:

- a. Ikut serta dalam event-event promosi kepariwisataan dan pameran kebudayaan skala regional, nasional, dan internasional. Event – event tersebut antara lain adalah Kemilau Sulawesi yang diadakan setiap tahunnya, event Travel Mart, Pameran pegalaran budaya di Taman Mini Indonesia Indah, dan lain lain.
- b. Menyelenggarakan kegiatan festival budaya yang di dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menampilkan kebudayaan dan kesenian yang ada di Kabupaten Mamasa dengan tujuan melestarikan sekaligus mempromosikan kebudayaan dan kesenian yang ada di Kabupaten Mamasa. Namun, Festival budaya tersebut belum dilakukan secara rutin.
- c. Menyelenggarakan ajang pemilihan muane masokan anna baine matatta'. Ajang tersebut merupakan ajang pemilihan putra-putri terbaik daerah yang telah melalui tahap-tahap seleksi yang nantinya akan dinobatkan menjadi Duta Pariwisata Kabupaten Mamasa dan diharapkan dapat menguasai seluk beluk tentang

kepariwisataan Mamasa dan membantu dalam memperkenalkan Kabupaten Mamasa di dalam maupun di luar daerah. Sama halnya dengan ajang-ajang pemilihan pada umumnya, Ajang ini dilaksanakan sekali dalam setahun waktu berjalan.

- d. Promosi melalui media massa dan sosial. Melakukan promosi kepariwisataan melalui media massa maupun media sosial merupakan salah satu cara yang efektif dan efisien di tengah arus globalisasi saat ini. Karena dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, dapat mempermudah wisatawan dalam mengakses info mengenai kepariwisataan suatu wilayah. Untuk itu, Pemerintah daerah telah membuat website dinas pariwisata dengan tujuan untuk memperkenalkan keadaan dan kondisi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Mamasa. Hanya saja website ini masih belum berjalan secara efektif dikarenakan masih banyak info yang belum terupdate dan setelah ditanyakan kepada dinas terkait, website tersebut memang sedang dalam proses perbaikan.
- e. Pemerintah Daerah juga membuat dan menjual CD-CD lagu daerah Mamasa yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi daerah. Dengan video klip yang mengangkat panorama-panorama serta objek-objek wisata yang ada di Mamasa sebagai alat promosi daerah sekaligus peletarian kebudayaan dan kesenian.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Bapak Arvin Ival Putra, S.Sos bahwa :

“Upaya yang kita lakukan dalam melakukan promosi pariwisata itu, yang pertama kita aktif dalam mengikuti event-event promosi, pagelaran budaya dan seni baik itu skala regional, nasional, maupun Internasional. Kemudian, Kita juga setiap tahun selalu mengikuti kegiatan Kemilau Sulawesi, kalau tidak salah sudah 6 kali beturut-turut itu. Kita juga telah membuat website dinas pariwisata yang menyajikan info-info dan mempromosikan wisata-wisata yang kita punya melalui Internet. Walaupun saat ini website tersebut masih dalam tahap penyempurnaan. Sambil berbenah membenahi objek-objek wisata, kita juga terus melakukan promosi.”<sup>27</sup>

#### **4.5.1.4. Mengalokasikan Anggaran**

Anggaran (dana) merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu wilayah termasuk pembangunan Kepariwisata. Tanpa adanya anggaran, segala program strategis yang telah direncanakan sebelumnya dapat terhambat. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa juga berperan dalam mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan setiap program yang berkaitan dengan pembangunan atraksi kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa, Bapak David Bambalayuk, ST.,M.Si bahwa :“ditetapkannya Mamasa sebagai destinasi

---

<sup>27</sup> Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Bapak Arvin Ival Putra, S.Sos

Pariwisata mutlak harus mendapat perhatian dari Pemerintah utamanya anggaran.”<sup>28</sup>

Mengalokasikan Anggaran memang merupakan wewenang Pemerintah kabupaten/kota yang termaktub dalam Undang-Undang No 10 tahun 2009 pasal 30 huruf (k), yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota berwenang untuk mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Meskipun sangat disadari bahwa Anggaran yang dialokasikan pada sektor Pariwisata masih belum mampu untuk menyentuh semua objek yang ada di Kabupaten Mamasa karena hanya bersumber dari dana APBD Kabupaten Mamasa saja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Agustina Toding, S.Pd, M.Pd selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa bahwa :

“Anggaran yang digunakan untuk membayai segala program pembangunan Kepariwisataan memang sangat terbatas karena hanya bersumber dari satu sumber saja, yaitu APBD Kabupaten Mamasa. Dengan segala keterbatasan dana tersebut, Pemerintah daerah terpaksa harus mencukupkannya dengan membenahi objek yang lebih urgent terlebih dahulu, bukan berarti menganaktirikan objek lainnya. Tetapi karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Selama ini, tidak pernah ada dana yang bergulir dari Pusat. Salah satu penyebabnya adalah karena sampai saat ini Mamasa belum memiliki Ripparda. Untuk itu, kita berusaha segera memperdakan Ripparda Kabupaten Mamasa. Dana yang bergulir dari Provinsi pun hanya sekali, yaitu sebesar 4 miliar pada tahun 2015. Tahun sebelum dan sesudahnya, sudah tidak ada lagi.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara pada tanggal 11 April 2017 dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa, Bapak David Bambalayuk, ST., M.Si

<sup>29</sup> Wawancara pada tanggal 24 Januari 2017 dengan Ibu Agustina Toding, S.Pd, M.Pd selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa



Berikut tabel realisasi dana yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam mendukung Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Mamasa pada tahun 2016 untuk tahun anggaran 2017.

**Tabel 28. Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa Tahun 2017**

APBD Kabupaten Mamasa	APBD Provinsi Sulawesi Barat	APBN
5,135,000,000	-	-

*Sumber: Data Rencana Kerja SKPD tahun anggaran 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa tahun 2016, Pada Lampiran Penelitian dilampirkan secara detail.*

Dampak pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Mamasa berdasarkan anggaran tersebut belum memberikan hasil yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Mamasa. Sekalipun kontribusi PAD di bidang Pariwisata setiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi jika dilihat berdasarkan jumlah setorannya masih belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Mamasa. Besaran jumlah register PAD sektor Pariwisata Kabupaten Mamasa dari tahun 2013-2016 disajikan dalam tabel 29 berikut.

**Tabel 29. Register PAD di sektor Pariwisata Kabupaten Mamasa dari tahun 2013-2016.**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Jumlah Setoran PAD</b>	<b>Pencapaian Target</b>
2013	18.000.000	4.384.000	24,36%
2014	18.000.000	5.237.000	29,09%
2015	10.000.000	11.172.000	111,72%
2016	14.500.000	19.099.000	131,72%

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupetan Mamasa, Pada Lampiran Penelitian dilampirkan secara detail.*

#### **4.5.1.5. Memberikan Informasi kepariwisataan Kabupaten Mamasa**

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pada pasal 23 menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa selalu mensosialisasikan Sapta Pesona kepada masyarakat Kabupaten Mamasa dan juga menyediakan program layanan *Tourism Information Service* bagi para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamasa yang bertujuan untuk menyediakan informasi-informasi kepariwisataan di Kabupaten Mamasa dan memudahkan para wisatawan untuk memperoleh gambaran mengenai objek/daya tarik wisata yang hendak dikunjungi dengan mencetak brosur, *tourism map*.

#### **4.5.2. Pembangunan Aksesibilitas wisata Kabupaten Mamasa (Accessibility)**

Akseibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau sulitnya lokasi suatu tempat dicapai melalui jaringan transportasi. Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada sarana prasarana transportasi karena faktor jarak dan kenyamanan di perjalanan sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Selain transportasi, yang berkaitan dengan akseibilitas adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan sarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri. Kondisi prasarana yang baik akan membuat laju transportasi optimal. Untuk membangun kepariwisataan Mamasa, maka Pemerintah daerah juga membenahi akseibilitas penunjang kepariwisataan yang ada di kabupaten Mamasa. Pemerintah Kabupaten Mamasa telah menerapkan beberapa simpul jaringan transportasi yang sangat besar peranannya untuk pariwisata, terutama dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata.

##### **4.5.2.1. Jaringan Transportasi Darat**

Transportasi darat merupakan sistem transportasi primer untuk melakukan pergerakan antar wilayah menuju Kabupaten Mamasa.

Adapun penunjang dari pelaksanaan transportasi darat ini adalah pembangunan jaringan jalan dan jaringan pelayanan lalu lintas.

## **a) Jaringan Jalan**

### **1. Jaringan Jalan Kolektor Primer**

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. Ciri-ciri jalan Kolektor Primer adalah :

- Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota.
- Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer.
- Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km per jam.
- Lebar badan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
- Jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien. Jarak antar jalan masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter.
- Kendaraan angkutan barang berat dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini.

- Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya.
- Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
- Lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diizinkan pada jam sibuk.
- Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas dan lampu penerangan jalan.
- Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri primer.
- Dianjurkan tersedianya Jalur Khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya.

Jaringan Jalan Kolektor Primer Kabupaten Mamasa yang telah dibangun adalah jalur:

1. Mambi – Aralle – Kabupaten Mamuju
2. Mambi – Aralle – Buntu Malangka – Tabulahan –Kabupaten Mamuju
3. Mambi - Bambang – Rantebulahan Timur – Tanduk Kalua (Mala'bo)
4. Tanduk Kalua (Mala'bo)- Mamasa - Tabang - Kabupaten TanaToraja

5. Tanduk Kalua (Mala'bo)- Sumarorong - Messawa - Kabupaten Polewali Mandar

## **2. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder**

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Ciri – ciri Jalan Kolektor Sekunder adalah:

- Jalan kolektor sekunder menghubungkan: antar kawasan sekunder kedua, kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- Jalan kolektor sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam.
- Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
- Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini di daerah pemukiman.
- Lokasi parkir pada badan jalan-dibatasi.
- Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup.
- Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari sistem primer dan arteri sekunder.

Jaringan jalan kolektor Sekunder yang telah dibangun di Kabupaten Mamasa adalah pada jalur:

1. Balla – Balla Tumuka - Sepakuan – Balla Satanetean - Bambapuang - Rantepuang
2. Kanan - Buangin - Salururu - Masoso - Bambang - Salutambun - Taora - Kala'be - Aralle Utara - Hahangan - Ralleanak Utara
3. Kanan – Parondo Bulawan – Mehalaan
4. Kanan - Pidara – Balla Timur - Balla Barat - Lambanan - Mamasa - Rantetannga - Kariango - Malimbong - Rantepuang - Tamalantik
5. Sumarorong - Mehalaan - Salualo - Pamoseang – Sondonglajuk
6. Tabone – Rante Kamase – Batanguru -Salubalo - Batupapan - Nosu - Salutambun - Sapan - Pana – Datu Baringan - Saloan - Tado' Kalua
7. Timoro - Pangandaran - Aralle

### **3. Jaringan Jalan Lokal primer**

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan

lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Ciri-ciri Jalan Lokal Primer adalah :

- Jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota.
- Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya.
- Jalan lokal primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km per jam.
- Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini.
- Lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter.
- Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer.

Jalan Lokal Primer yang telah dibangun di Kabupaten Mamasa adalah pada jalur :

1. Bambang buda - Mehalaan - Salubiru - Pasembu - Batas Kabupaten Polewali Mandar
2. Buntu Malangka - Penatangan - Peu - Tabulahan - Periangan - Kabupaten Mamuju

#### **b) Jaringan Pelayanan Lalu Lintas**

Jaringan pelayanan lalu lintas di Kabupaten Mamasa terdiri atas trayek angkutan barang untuk kendaraan barang antarkecamatan dalam



wilayah Kabupaten Mamasa dan kendaraan barang ke luar wilayah Kabupaten Mamasa; serta trayek angkutan penumpang sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 25 berikut.

**Tabel 25. Trayek Angkutan Penumpang di Kabupaten Mamasa**

Antar Kota Antar Provinsi	Antar Kota Dalam Provinsi	Angkutan Kota/ Pedesaan
Mamasa – Makassar	Mamasa – Mamuju	Mamasa – Lambanan
Mamasa – Tana Toraja	Mamasa-Pasangkeyu	Mamasa – Osango
	Mamasa – Majene	Mamasa – Orobua
	Mamasa - Polewali	Mamasa – Pana
		Nosu – Pana
		Mamasa – Tabang
		Mamasa–Tanduk Kalua
		Mamasa – Mambi
		Mamasa – Aralle
		Mamasa – Lakahang
		Mamasa – Nosu
		Mamasa – Sumarorong
		Mamasa – Messawa

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa

Akan tetapi, kondisi jaringan jalan yang telah dibangun tersebut masih dalam kondisi yang belum memadai. Sebagian jalan telah di beton tetapi yang lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Bahkan di sejumlah titik masih banyak dijumpai kondisi jalan yang rusak parah dan masih berwujud tanah yang belum dikeraskan sehingga sangat sulit melewatinya apalagi ketika musim penghujan. Pada beberapa kecamatan

di Kabupaten Mamasa seperti Tabang, Pana, Nosu hanya dapat dilalui oleh kendaraan yang berspesifikasi khusus. Melihat hal ini, maka Pemerintah daerah Kabupaten Mamasa sedang berupaya membenahi infrastruktur jalan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Badawi, MH bahwa

“Salah satu kendala dalam pembangunan di Mamasa adalah karena infrastruktur jalan yang masih belum memadai. Saat ini kita masih terus membenahi infrastruktur kita dulu khususnya infrastruktur jalan. Karena segala yang kita butuhkan akan lebih mudah tercapai apabila kita memiliki jalan yang baik”<sup>30</sup>

#### **4.5.2.2. Jaringan Transportasi Udara**

Jaringan transportasi lainnya yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah Kabupaten Mamasa adalah Simpul transportasi udara yang ditujukan untuk meningkatkan keterjangkauan wilayah Kabupaten Mamasa melalui udara. Berkaitan dengan hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Mamasa telah membangun bandar udara perintis di Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong sebagai simpul transportasi udara skala lokal yang secara bertahap akan dikembangkan untuk melayani penerbangan berskala domestik-dalam negeri. Meskipun saat ini bandara tersebut baru melayani rute penerbangan yang terbatas dengan pesawat

---

<sup>30</sup> Wawancara pada tanggal 10 April 2017 dengan Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Badawi, MH

berukuran kecil, akan tetapi adanya rencana dari Kementerian Perhubungan untuk membuka rute penerbangan langsung Bali-Sumarorong diharapkan akan semakin meningkatkan arus transportasi udara di Kabupaten Mamasa secara keseluruhan dan diharapkan dapat lebih menunjang kepariwisataan di Kabupaten Mamasa.

#### **4.5.3. Pembangunan Amenitas wisata Kabupaten Mamasa (*amenities*)**

Amenitas wisata (Fasilitas wisata) merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Adapun sarana-sarana penting yang berkaitan dengan fasilitas pariwisata yaitu akomodasi penginapan, restoran, air bersih, komunikasi, dan keamanan.

##### **a. Akomodasi**

Untuk pembangunan fasilitas penunjang pariwisata dalam hal ini akomodasi penginapan, Pemerintah daerah telah memberikan dukungan kepada para pelaku usaha pariwisata yang ingin membangun fasilitas penginapan di Kabupaten Mamasa. Hal ini dapat dilihat dari Keberadaan beberapa fasilitas akomodasi (hotel/losmen/penginapan) di Kabupaten Mamasa walaupun masih sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun sebarannya. Berdasarkan data tahun 2015 terdapat 25 fasilitas akomodasi di Kabupaten Mamasa, dimana 14 akomodasi (tiga perempatnya) berada di Kecamatan Mamasa, sedangkan sisanya berada di Kecamatan Mambi, Sumarorong, Nosu, dan Tabulahan. Total terdapat 228 kamar akomodasi

dengan 328 tempat tidur di Kabupaten Mamasa. Namun, kualitas pelayanan yang disediakan oleh berbagai fasilitas akomodasi tersebut masih tergolong standar dan belum memenuhi standar kualitas menengah maupun baik. Kebanyakan fasilitas akomodasi di Kabupaten Mamasa dapat dikatakan masih sekelas “hotel melati”.

**Tabel 26. Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1	Sumarorong	3	19	22
2	Messawa	-	-	-
3	Pana	-	-	-
4	Nosu	1	13	13
5	Tabang	-	-	-
6	Mamasa	14	159	250
7	Tandukkalua'	-	-	-
8	Balla	-	-	-
9	Sesenapadang	-	-	-
10	Tawalian	-	-	-
11	Mambi	3	16	22
12	Bambang	-	-	-
13	Rantebulahan Timur	-	-	-
14	Mehalaan	-	-	-
15	Aralle	-	-	-
16	Buntumalangka	-	-	-

17	Tabulahan	4	21	21
Jumlah		25	228	328

Sumber: BPS, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2016

## b. Rumah Makan dan Restoran

Sama halnya dengan penginapan, Pemerintah daerah juga memberikan dukungan dalam hal pemberian izin pembangunan fasilitas rumah makan dan restaurant di Kabupaten Mamasa. Tercatat telah didikan sebanyak 72 unit fasilitas rumah makan dan restaurant di Kabupaten Mamasa dan jika dilikat dari jumlahnya pada tahun 2015 fasilitas ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014). Akan tetapi Keberadaan rumah makan maupun restoran ini belum tersebar secara merata dan masih terpusat di Kota Mamasa saja.

**Tabel 27. Fasilitas Rumah Makan dan Restoran di Kabupaten Mamasa tahun 2014-2015**

No.	Kecamatan	2014	2015
1	Sumarorong	6	11
2	Messawa	8	12
3	Pana	-	-
4	Nosu	-	-
5	Tabang	-	-
6	Mamasa	23	33

7	Tandukkalua'	1	8
8	Balla	-	-
9	Sesenapadang	-	-
10	Tawalian	-	-
11	Mambi	4	5
12	Bambang	-	-
13	Rantebulahan Timur	-	-
14	Mehalaan	-	-
15	Aralle	1	3
16	Buntumalangka	-	-
17	Tabulahan	-	-
Jumlah		43	72

Sumber: BPS, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2016

### **c. Air Bersih (PDAM), Listrik (PLN), Jaringan Telekomunikasi, dan Jasa Keuangan.**

Fasilitas penunjang yang penting dalam pariwisata lainnya antara lain berupa (1) air bersih, (2) listrik, (3) telekomunikasi dan (4) jasa keuangan/perbankan. Pemerintah daerah telah memasukkan jaringan listrik dan fasilitas air bersih di Kabupaten Mamasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk air (PDAM) dan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) untuk listrik (PLN) akan tetapi hal ini masih belum menjangkau setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Mamasa secara keseluruhan. Hanya pada beberapa tempat tertentu yang baru dijangkau oleh pelayanan jaringan PLN dan PDAM. Hal tersebut dikarenakan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan sumber mata air alami, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang relatif memiliki ketersediaan air yang langsung dari alam. Adapun untuk listrik kebanyakan warga menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dikarenakan terbatasnya kapasitas jaringan listrik PLN dari PLTA Bakaru di Kabupaten Pinrang.

Selanjutnya Fasilitas jaringan telekomunikasi dan jasa keuangan, telah disediakan oleh pemerintah di Kabupaten Mamasa. Hal ini dapat dilihat pada terdapatnya bangunan menara telekomunikasi (BTS) dan Bank-Bank untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi serta bertransaksi. Akan tetapi, saat ini jaringan telekomunikasi dan jasa perbankan tersebut masih belum dapat menjangkau semua wilayah Kabupaten Mamasa. Infrastruktur telekomunikasi, terutama jaringan telepon seluler dan internet, baru terbatas pada wilayah di sekitar jalan poros utama di mana terdapat bangunan menara telekomunikasi (BTS). Bahkan pada banyak kecamatan, seperti Pana, Nosu, Bambang, Buntu Malangka, Mambi, Tabulahan sebagian besar wilayahnya sama sekali belum terjangkau oleh jaringan telepon seluler maupun internet. Hal tersebut sekali lagi akibat infrastruktur jalan yang belum memadai. Untuk

Fasilitas jasa perbankan, di Kabupaten Mamasa hanya ada tiga Bank yang beroperasi yaitu Bank SulSelBar, BRI, dan BNI yang baru beroperasi tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam membangun Kepariwisata Kabupaten Mamasa sudah berusaha melakukan upaya-upaya hal dilihat dari beberapa program yang telah dilaksanakan. Hanya saja masih ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang diperoleh pun belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum sepenuhnya maksimal karena adanya beberapa hambatan seperti terbatasnya anggaran, minimnya regulasi dan infrastruktur yang belum memadai. Kabupaten Mamasa saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata dalam hal ini Ripparda, ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa untuk segera memperdakan Ripparda Kabupaten Mamasa. Sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang tersedia juga belum lengkap dan berkualitas, mulai dari infrastruktur jalan, fasilitas akomodasi penginapan, restaurant sampai fasilitas listrik, air bersih serta telekomunikasi umum. Hal yang paling urgent adalah Infrastruktur jalan karena merupakan kunci pembangunan segala sektor termasuk Pariwisata.



#### **4.6. Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Sulawesi Barat**

Esensi dari sebuah kemitraan adalah adanya gotong-royong atau kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak (*stakeholders*) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia. Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama, tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Begitupun halnya dengan Pembangunan Kepariwisata.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha. Sebagai sektor yang multidimensi dan menyentuh banyak aspek, tentu harus melibatkan banyak pihak dalam pembangunannya. Maka, dalam membangun Kepariwisata di suatu daerah bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja melainkan seluruh *stakeholder* yang ada. Dalam konsep manajemen kepariwisataan, ada tiga pilar yang menjadi motor penggerak dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan yang

terpadu dan berkelanjutan, yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Kesinergisan peran antara ketiga *stakeholders* tersebut sangat dibutuhkan. Konsep matang dalam pembangunan pariwisata harus didukung oleh kesiapan setiap *stakeholder*. Hal ini sejalan dengan konsep *Good Governance*, yang mana dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi di dominasi oleh satu pihak (Pemerintah). Tetapi lebih menggambarkan adanya pola kerjasama yang baik (kemitraan) antar elemen yang ada, yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Ditetapkannya Kabupaten Mamasa sebagai destinasi pariwisata unggulan Sulawesi Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2008 merupakan tanggungjawab yang harus diemban oleh pemerintah daerah dan seluruh *stakeholders* pariwisata baik itu swasta maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa untuk bekerja bersama dalam mendukung pembangunan kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan sehingga Mamasa dapat menjadi destinasi pariwisata yang diminati oleh wisatawan dan kemudian dapat memberi manfaat secara nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Mamasa tidak seluruhnya merupakan milik dan dikelola oleh pemerintah daerah akan tetapi ada juga yang dimiliki oleh non pemerintah (swasta). Swasta yang dimaksud disini adalah para pelaku usaha pariwisata yang berasal dari kalangan masyarakat yang ada

di Kabupaten Mamasa yang memiliki modal sendiri dalam mengembangkan potensi wisata Mamasa. Berdasarkan pengelolaannya, Objek wisata yang ada di Kabupaten Mamasa dikategorikan sebagai berikut.

#### 1. Objek Milik Pemerintah Daerah, Dikelola Pemerintah Daerah

Di Kabupaten Mamasa, hampir semua objek wisata milik pemerintah daerah dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Akan tetapi karena minimnya anggaran dan infrastruktur yang belum memadai, maka yang baru tersentuh dan bersifat komersil hanya di beberapa objek saja. Selebihnya masih belum tersentuh sama sekali.

Salah satu objek yang merupakan milik pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah air terjun Liawan. Air terjun ini murni dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa menggunakan dana APBD yang secara teknis dilakukan oleh dinas Pariwisata. Seluruh pengelola yang berada di lokasi objek merupakan pegawai dari dinas Pariwisata yang terdiri atas 3 PNS, dan 2 honorer. Retribusi yang diperoleh dari air terjun tersebut diberikan untuk PAD sektor pariwisata. Begitupun halnya dengan objek-objek lain milik pemda yang dikelola oleh pemerintah daerah sendiri.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Ibu Agustina Toding, S.Pd, M.Pd selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa bahwa:

“Air Terjun Liawan yang terletak di Kecamatan Sumarorong itu merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. Belum ada kerjasama yang kita lakukan bersama pihak swasta dalam hal mengelola dan mengembangkan objek tersebut. Jadi semuanya murni Pemerintah yang bangun. Mulai dari pembangunan, pemeliharannya, pembenahan-pembenahannya, pengelolaannya. Semua dilakukan oleh Pemerintah. Kami menempatkan orang kami (pegawai dinas pariwisata) sebagai pengelola di sana. Dan hasil dari retribusi karcis tersebut masuk dalam PAD sektor Pariwisata.”<sup>31</sup>

## 2. Objek Milik Swasta, Dikelola Swasta

Pada model ini, Pembangunan dan pengelolaan objek seluruhnya dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah daerah hanya sebatas memberi izin dalam mendirikan bangunan untuk usaha pariwisata, dan pihak swasta wajib membayar pajak penghasilan tiap bulannya kepada pemerintah. Salah satu objek yang memiliki status kepemilikan swasta dan dikelola langsung oleh pemiliknya (swasta) adalah permandian air panas Nusantara milik Nusantara Group yang terletak di Kota Mamasa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Pemilik Permandian Air Panas Nusantara, Bapak Yeyen bahwa:

“Mulai dari awal pembangunan permandian ini, saya memang yang bangun sendiri dengan modal seadanya dan penuh dengan tantangan. Walaupun saat itu banyak pihak yang berusaha mehalang-halangi saya termasuk Pemerintah, tapi saya tetap lakukan. Tapi syukurlah, saat ini Pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi kami para pelaku usaha yang ingin membangun objek wisata. Walaupun memang belum ada kerjasama bersama Pemerintah daerah dalam hal pengelolaan objek ini, akan tetapi setidaknya Pemerintah telah memberikan dukungan doa dan motivasi untuk membangun semampu kami. Seluruh pembiayaan dalam pembangunan dan pengelolaan objek, kami (pihak swasta)

---

<sup>31</sup> Wawancara pada tanggal 24 Januari 2017 dengan Ibu Agustina Toding, S.Pd, M.Pd selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa

yang tanggung. Kami membayar pajak penghasilan kepada Pemerintah sesuai dengan yang ditentukan.”<sup>32</sup>

Selanjutnya, Bapak Sugiono, S.Pd selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa juga mengatakan hal yang senada, bahwa:

“Selama ini Kita hanya memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang mau mengembangkan objek wisata. Tapi memang belum ada yang dapat kita bantu dalam hal material karena keterbatasan anggaran. Kita fokus dulu benahi objek yang kita punya. Kalo selesai itu , baru bisa kita bantu (objek swasta) itupun disesuaikan dengan anggaran yang ada.”<sup>33</sup>

### 3. Objek Milik Pemerintah Daerah, Dikelola Pemerintah Daerah dan Swasta

Pada bagian ini, pengelolaan objek dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan MoU yang berlaku. Ada pembagian peran antara keduanya yaitu Pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah menyediakan lahan, dan mengucurkan dana untuk membangun dan mengembangkan sarana prasarana objek wisata Air Panas Rante-Rante. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah memasuki tahap ke empat terhadap objek ini. Sedangkan yang

---

<sup>32</sup> Wawancara pada tanggal 8 April 2017 dengan Pemilik Permandian Air Panas Nusantara, Bapak Yeyen

<sup>33</sup> Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Bapak Sugiono, S.Pd selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa

bertindak selaku pihak kedua sesuai dengan MoU yang berlaku adalah pihak swasta, yaitu Ibu Yosephine. Peran yang dilakukan oleh Ibu Yosephine adalah mengelola objek tersebut. Ibu Yosephine berhak menerima sewa dari hasil penggunausahaan objek wisata tersebut dan Pemerintah berhak menerima iuran/retribusi dari hasil penggunausahaan objek wisata air panas rante-rante sesuai dengan yang telah disepakati bersama di dalam MoU, yaitu Pihak kedua wajib menyetor iuran/retribusi sebesar Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa setiap bulannya. Besaran tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi dari Pihak Pertama (Pemerintah Daerah) terhadap volume kunjungan wisata Permandian Air Panas Rante-Rante setiap bulannya.

Pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan swasta di Kabupaten Mamasa yang telah melahirkan surat perjanjian kerjasama berupa MoU hanya pada satu (1) objek wisata saja, yaitu Air Panas Rante-Rante yang merupakan objek milik pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi promosi dan pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Bapak Arvin Ival Putra, S.Sos yang mengatakan bahwa:

“Di Kabupaten Mamasa baru satu objek yang dikerjasamakan dengan pihak swasta, yaitu Permandian Air Panas Rante-Rante. Jadi kita buat MoU dalam mengelola objek tersebut. Untuk

pembagian hasil, ada semua di dalam MoU. Nah, selebihnya itu (objek wisata) masih kita (Pemda) yang kelola sendiri.”<sup>34</sup>

Berdasar pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kondisi kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan pihak swasta di Kabupaten Mamasa dalam pembangunan objek wisata masih belum membuahkan hasil yang baik karena belum diterapkan secara maksimal. Kenyataannya kerjasama yang terjalin hanya seadanya saja. Dapat dikatakan seperti itu karena hampir seluruh objek wisata milik pemerintah daerah di Kabupaten Mamasa dikelola oleh pihak pemerintah daerah saja. Hanya satu yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dan melahirkan MoU.

Di satu sisi, ada beberapa objek wisata yang dimiliki oleh pihak non-pemerintah ( swasta ) yang lebih komersil dan diminati oleh kalangan wisatawan yang berkunjung. Akan tetapi pemerintah belum melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta tersebut. Sampai saat ini, Pemerintah hanya sekedar memberikan kelonggaran bagi setiap pihak yang ingin mengembangkan usaha pariwisata. Pemerintah hanya memberikan dukungan kepada seluruh masyarakat yang ingin membuka atau mengembangkan objek wisata tanpa memberi bantuan fisik. Pemerintah berfokus membenahi objek yang merupakan miliknya saja.

---

<sup>34</sup> Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Bapak Arvin Ival Putra, S.Sos

Tanpa melihat lebih jeli sebuah peluang bahwa ada objek milik swasta yang sebenarnya berpotensi untuk mendatangkan banyak wisatawan.

Pemerintah dan swasta seakan-akan melakukan pekerjaan masing-masing tapi belum bersama-sama menyatukan persepsi dalam membangun kepariwisataan Mamasa. Arah pembangunan berwujud kemitraan dalam penyelenggaraan sektor pariwisata di Kabupaten Mamasa belum jelas kemana. Sehingga dapat dikatakan, pemda dan swasta di Kabupaten Mamasa berjalan bersama tapi belum seirama. Salah satu penyebabnya adalah karena belum adanya aturan hukum atau regulasi khusus tentang penyelenggaraan kepariwisataan Mamasa. Sehingga para pelaku wisata belum mengetahui jelas bagaimana peran dan posisi yang seharusnya dibuatnya begitupun dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mamasa. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha Pariwisata, Bapak Yeyen bahwa :

“Sampai saat ini, saya juga masih bingung bagaimana posisi saya dalam pembangunan Kepariwisata Kabupaten Mamasa. Saya sangat berharap apabila Pemerintah dapat berkunjung sewaktu-waktu memberikan kami (para pelaku usaha) bimbingan, arahan, petunjuk mengenai pembangunan kepariwisataan”<sup>35</sup>

Selain kerjasama yang baik yang harus dibangun oleh pemerintah daerah dan swasta atau para pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Mamasa, tentunya juga harus didukung oleh kesiapan

---

<sup>35</sup> Wawancara pada tanggal 8 April 2017 dengan salah satu pelaku usaha Pariwisata, Bapak Yeyen



masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa. Seluruh Masyarakat seharusnya turut andil dalam mendukung kemajuan pariwisata Mamasa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, saat ini masyarakat Mamasa sudah mulai melakukan gerakan-gerakan yang mendukung pembangunan Pariwisata Mamasa, mereka menyatakan dukungannya dalam wujud partisipasi mempromosikan pariwisata mamasa baik melalui media sosial maupun secara langsung. Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemajuan di bidang IPTEK, telah ada akun yang dibuat oleh masyarakat seperti akun "Mamasa Community" sebagai wadah perkumpulan para masyarakat Mamasa baik yang tinggal di wilayah Mamasa maupun yang di daerah perantauan termasuk juga para pejabat Kabupaten Mamasa ada di dalamnya dengan tujuan sebagai wadah untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, saran maupun kritik terhadap proses pembangunan daerah termasuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa. Beberapa kali juga pemerintah daerah mengadakan *hearing* atau forum dengar pendapat baik secara formal maupun sebatas cerita lepas yang sarat makna bersama masyarakat yang di dalamnya ada para pelaku wisata (swasta), tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa dan para intelektual lainnya untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa. Menurut Bapak Bupati Drs. H. Ramlan Badawi, MH, Aspirasi atau usulan-usulan yang diberikan untuk Pemerintah Daerah yang sifatnya positif tersebut akan ditampung dan dimasukkan ke dalam program-program strategis dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Mamasa.<sup>36</sup>

Sebagian masyarakat Mamasa memang sudah mulai memahami bahwa Pembangunan bukan saja hanya tugas dari pemerintah daerah saja termasuk dalam membangun kepariwisataan daerah melainkan merupakan tanggungjawab bersama seluruh stakeholder. Namun, sebagian masyarakat yang dimaksud di sini hanya merupakan segelintir Masyarakat Kabupaten Mamasa secara keseluruhan. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Mamasa yang masih belum tersentuh dengan sarana prasarana yang memadai, mengakibatkan pemahaman lebih terhadap pembangunan daerah dan kepariwisataan hanya dapat dipahami oleh para kaum intelektual dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Kabupaten Mamasa khususnya di wilayah yang tersentuh oleh akses media dan fasilitas lainnya. Sebagian besar masyarakat Mamasa belum memahami betul apa itu Pariwisata dan apa manfaatnya pembangunan Pariwisata bagi mereka khususnya bagi mereka yang hidup di pelosok dan sulit diakses.

Pada dasarnya tabiat asli masyarakat Mamasa merupakan pribadi yang baik, ramah, santun, dan tidak kriminal, bahkan menjunjung tinggi kekeluargaan dan kondisi tersebut dapat menjadi pendukung pembangunan kepariwisataan di Mamasa akan tetapi pemahaman akan

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Badawi, MH pada tanggal 10 April 2017

pentingnya pariwisata di kalangan masyarakat masih belum dipahami secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai Tourist Guide, Bapak Demianus bahwa:

“Mamasa ini merupakan daerah yang sangat potensial dalam pengembangan kepariwisataan. Kita punya kondisi alam yang sangat natural dan kondusif serta potensi-potensi wisata yang beranekaragam. Kalau ini dikembangkan dengan baik dapat menarik banyak wisatawan. Namun, sayangnya sebagian besar masyarakat Mamasa belum mengerti dan pahami makna sebenarnya dari Pariwisata dan apa manfaat yang akan diperoleh dari sektor Pariwisata.”<sup>37</sup>

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan membantu terciptanya suasana santun, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Sungai Mamasa yang merupakan salah satu potensi wisata terkadang dibuat sebagai bank sampah bagi oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, begitupun halnya pada beberapa objek wisata lainnya. Masyarakat kurang menjaga kebersihan daerah khususnya lokasi objek wisata<sup>38</sup>. Contoh kasus lain adalah dengan tingginya sifat kekeluargaan di Kabupaten Mamasa terkadang membuat beberapa oknum masyarakat tidak membayar retribusi karcis ketika

---

<sup>37</sup> Wawancara pada tanggal 01 Februari 2017 dengan Tourist Guide, Bapak Demianus

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha pariwisata, pemilik permandian air panas Nusantara, Bapak Yeyen pada tanggal 08 April 2017

memasuki area objek wisata karena mereka merasa bahwa area tersebut adalah milik nenek-nenek moyangnya yang terdahulu. Mereka belum menyadari bahwa retribusi yang dikenakan pada objek wisata tersebut akan disetor kepada pemerintah daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan mendukung pembangunan daerah Kabupaten Mamasa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yosephine sebagai pengelola permandian air panas rante-rante bahwa:

“Salah satu kendala saya dalam mengelola objek ini adalah terkadang ada beberapa oknum masyarakat tidak membayar karcis untuk masuk. Bahkan ketika ditagih ada dari mereka yang marah karena merasa ini punyanya nenek-neneknya dulu. Mereka sepertinya belum memahami kalau karcis masuk dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Tapi saya tetap bersabar saja. Sekali waktu mereka pasti akan paham. Awal-awal mereka tidak bayar, tapi keseringan masuk juga membuat mereka sedikit malu kalau tidak membayar”<sup>39</sup>

Berdasarkan kondisi kerjasama yang terbangun antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa sesuai yang telah dijelaskan secara singkat di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pola Kemitraan yang terjalin antara stakeholders yang ada masih seadanya saja dan belum diterapkan secara maksimal di Kabupaten Mamasa. Sebagian besar *stakeholders* belum memahami peran yang seharusnya dilakukan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. Sebagian besar *stakeholders*, baik itu pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat masih kurang memahami manfaat Kepariwisata

---

<sup>39</sup> Wawancara pada tanggal 28 Februari 2017 dengan Ibu Yosephine sebagai pengelola permandian air panas rante-rante

dan memiliki *mindset* bahwa pembangunan itu hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Sedangkan, sebagaimana yang diketahui bahwa dalam membangun Kepariwisata suatu daerah untuk mencapai tujuan bersama merupakan tanggungjawab dan peran seluruh stakeholders, yaitu Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan teori pola kemitraan yang dikemukakan oleh Sulistyani, maka Pola Kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Sulawesi Barat termasuk dalam pola *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu, yaitu sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik dan metode dalam pengumpulan data, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun Kepariwisata di Kabupaten Mamasa jika ditinjau berdasarkan konsep 3A, yaitu Pembangunan Atraksi, Akseibilitas, dan Amenitas wisata Kabupaten Mamasa dapat dikatakan belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal karena masih ada beberapa kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurang memadainya infrastruktur, dan minimnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Mamasa.
2. Pola Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat belum berjalan dengan baik. Pada dasarnya baik itu Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun Masyarakat belum memahami dengan benar esensi kemitraan dan tujuan dari kemitraan itu bagi proses pembangunan Kepariwisata. Penyebabnya antara lain yakni masih terdapat ego sektoral, rendahnya pemahaman, dan

tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini mempengaruhi proses pembangunan dan perwujudan Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Sulawesi Barat. Maka, berdasarkan teori pola kemitraan yang dikemukakan oleh Sulistyani, Pola Kemitraan yang terbangun antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi Pariwisata Sulawesi Barat termasuk dalam pola *Pseudo Partnership* atau *kemitraan semu* yaitu sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya.

## **5.2. Saran**

1. Pemerintah Daerah harus semakin kreatif dan inovatif dalam membuat program-program strategis untuk membangun atraksi wisata yang ada di Kabupaten Mamasa agar lebih menarik bagi para wisatawan. Pemerintah daerah harus bekerja secara profesional dan maksimal, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan umum. Pemerintah Daerah harus fokus membenahi infrastruktur jalan yang merupakan kunci keberhasilan proses pembangunan daerah Kabupaten Mamasa di segala sektor termasuk Pariwisata, dan mempercepat disahkannya Perda Ripparda (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) Kabupaten Mamasa agar dana dari pusat dapat diallirkan untuk pembangunan Kepariwisataaan Mamasa serta dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah

kebijakan dan penyelenggaraan Kepariwisata agar lebih terarah dan tepat sasaran.

2. Dalam mewujudkan Mamasa sebagai destinasi Pariwisata yang menarik dan diminati para wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara yang dapat mendatangkan segala efek positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamasa, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja melainkan seluruh *stakeholders* yang ada. Untuk itu, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat harus lebih memahami peran dan tanggungjawabnya masing-masing, semakin menyatukan hati serta mengerti esensi dan pentingnya hubungan kemitraan yang baik untuk diterapkan dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan. Namun, Pemerintah Daerah harus tetap menyadari bahwa Pemerintah Daerah merupakan titik sentral dalam meningkatkan kemitraan tersebut karena Pemerintah yang memiliki *power* dalam menggerakkan seluruh *stakeholders* kepariwisataan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.



## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

Angga,Dade. 2006. *Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan (Suatu Studi tentang Kasus Kemitraan Sektor Kehutanan di Kabupaten Pasuruan)*, Vol.4, No.3

Astuti, Nurareni Widi. 2006. *Pola Kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta dalam Implementasi Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) (Studi Kasus di Desa Segoro Tambak Kabupaten Sidoarjo)*. Surabaya:Universitas Airlangga.

BPS Kabupaten Majene. 2016. *Kabupaten Majene dalam Angka 2016*.  
Majene: BPS Kabupaten Majene.

BPS Kabupaten Mamasa. 2016. *Kabupaten Mamasa dalam Angka 2016*.  
Mamasa: BPS Kabupaten Mamasa.

BPS Kabupaten Mamuju Utara. 2016. *Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka 2016*. Mamuju Utara: BPS Kabupaten Mamuju Utara.

BPS Kabupaten Mamuju. 2016. *Kabupaten Mamuju dalam Angka 2016*.  
Mamuju: BPS Kabupaten Mamuju.

BPS Kabupaten Polewali Mandar. 2016. *Kabupaten Polewali Mandar dalam Angka 2016*. Polewali Mandar: BPS Kabupaten Polewali Mandar.

C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PN Balai Pustaka.

Mahmudi. 2007. *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik*. Vol.9 No.1

Marsiatanti, Dyah Yusi. 2011. *Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah Universitas Brawijaya*. Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan

Melyanti, Imelda. M. 2014. *Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo*, Vol.2, No.1

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Kepemerintahan yang Baik Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju

Siagian, Sondang.P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, Agustinus (ed.). 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*

Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: UM-Press

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Penyusun Kamus. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. edisi kedua*. Jakarta:Balai Pustaka

Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Vestikowati, Endah. 2012. *Model Kemitraan Pemerintahan dengan Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah, Vol.1, No.8*

Yoeti, Oka A. 1997. *Tours and Travel Management*. Jakarta: Pradnya  
Paramita

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah  
Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro  
Universiti.

Zulkarimen, Nasution. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengertian Teori  
dan Penerapannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Peuraturan perundang-Undang :**

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa

Tahun 2014-2018

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 20 tahun 2014 tentang

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

**Website:**

WS Padang, diakses dari

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25944/5/Chapter%20I.pdf>,

(pada tanggal 21 November 2016)



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK**  
Jl. Demmatande - Kantor Gabungan Dinas Pemkab. Mamasa Lantai I, Kode Pos 91362

Mamasa, 18 Januari 2017

No. : 070/040/BKBP/II/2017  
Lamp. : -  
Hal : Rekomendasi /Izin Penelitian

Kepada  
Yth. **Kepala Dinas Pariwisata**  
Di -  
Tempat

Berdasarkan Surat dari Universitas Hasanuddin Nomor : 9095/UN4.8.II/PL.02/2016 perihal permohonan penelitian untuk menyusun skripsi. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **BEATRIX MASTURI**  
Nomor Pokok : E12113329  
Departemen : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Prog. Studi : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jl. Romang Tanggayya dalam 12 Blok. 5 No. 66 Perunmas  
Antang  
Nomor Hp : 085242920055

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Bapak dalam rangka penyusunan Skripsi dengan masalah yang di teliti: **"POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PERWUJUDAN MAMASA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA DI SULAWESI BARAT"**. Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami memberikan rekomendasi penelitian kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan Kegiatan, Kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Mamasa;
2. Tidak menyimpang dari surat Rekomendasi Penelitian;
3. Mentaati semua undang-undangan yang berlaku dan adat istiadat daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 ( Satu ) Exemplar foto copy hasil penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Mamasa

Demikian Surat Rekomendasi / Izin Penelitian ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan,  
  
**MAGDALENA, S. Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19620825 198601 2 004

**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Mamasa
2. Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR**

**SULAWESI BARAT**

**NOMOR 15 TAHUN**

**2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN KABUPATEN MAMASA  
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Mamasa mempunyai beraneka budaya dan potensi sumber daya alam yang memiliki prospek kedepan dalam menambah aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa dalam program pembangunan kepariwisataan, sesuai keunikan budaya dan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat



tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai  
Destinasi Pariwisata Unggulan.

c.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang  
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3419);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang  
Kepariwisata (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3427);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1992 tentang Benda Cagar Budaya  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Nomor 3470);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DAerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun  
1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
29, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4374);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  
2003 tentang Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4286);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
2004 tentang Sumber Daya Air  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
4377);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun  
2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 25  
Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 104, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
2007 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia 4737);

15. Instruksi Presiden Republik  
Indonesia Nomor 16 Tahun 2005  
tentang Kebijakan Pembangunan  
Kebudayaan dan Pariwisata;

16. Peraturan Daerah Provinsi  
Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun  
2007 tentang Pembentukan  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Daerah Pemerintah Provinsi  
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah  
Sulawesi Barat Tahun 2007 Nomor  
16,  
Tambahan Daerah Sulawesi Barat 16);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG  
PENETAPAN KABUPATEN MAMASA SEBAGAI  
DESTINASI  
PARIWISATA UNGGULAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Destinasi Pariwisata adalah tempat dan tujuan perjalanan wisatawan;
8. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi yang ditetapkan pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional;
9. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penata ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan;
10. Konservasi Alam adalah pemeliharaan dan perlindungan alam secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan

agar tetap memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan secara berkelanjutan;

11. Konservasi Budaya adalah pemeliharaan dan perlindungan serta pengembangan budaya daerah secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan perubahan nilai agar tetap menarik wisatawan secara berkelanjutan;
12. Masyarakat adalah seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum, adat atau badan hukum;
13. Pelaku Pariwisata adalah seorang atau himpunan/asosiasi profesi yang sama dengan tujuan melaksanakan fungsi kepariwisataan;
14. SDM adalah sumber daya manusia dibidang pariwisata yang memiliki keahlian atau profesi dibidang kepariwisataan;
15. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat;
16. Masyarakat Pariwisata adalah anggota masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya dibidang usaha kepariwisataan secara terus menerus;
17. Cagar Alam adalah keadaan alam yang masih alami dan menarik untuk wisatawan;
18. Cagar Budaya adalah keadaan budaya budaya yang masih asli tanpa pengaruh dari luar yang menarik untuk wisatawan.

## **BAB II**

## **P E N E T A P A N**

**P  
a  
s  
a  
l**

**2**

Dengan Peraturan Gubernur ini, Kabupaten Mamasa ditetapkan sebagai daerah Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Sulawesi Barat.

## **ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama**

### **Asas dan Tujuan**

### **Pasal 3**

Rencana Penetapan Pengembangan Destinasi Pariwisata didasarkan atas asas :

- a. Pemanfaatan destinasi pariwisata unggulan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum,
- c. Pemerataan kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok desa atas manfaat pariwisata.



#### **Pasal 4**

Perencanaan Pembagunan Destinasi Pariwisata bertujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan fungsi destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan lingkungan;
- c. Terselenggaranya konservasi alam dan konservasi budaya secara teratur dan berkelanjutan;
- d. Terselenggaranya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terencana dan berhasil guna;
- e. Tercapainya pemanfaatan pengembangan destinasi pariwisata unggulan yang berkualitas untuk :
  - 1. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
  - 2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
  - 3. mewujudkan perlindungan fungsi pemanfaatan dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan;
  - 4. mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

#### **Bagian Kedua**

#### **F u n g s i**

#### **Pasal 5**

Fungsi Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan adalah :

- a. Sebagai bahan arahan bagi pembangunan pariwisata daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan pariwisata daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- c. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan pembangunan pariwisata antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Sebagai rujukan/referensi Kabupaten dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten.

### **BAB III**

#### **KEGUNAAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA**

##### **Pasal 6**

**Kegunaan Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan adalah :**

- a. Bagi pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyusunan program-program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan secara terkoordinasi dan terintegrasi;
- b. Bagi Pemerintah Provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan tahunan;
- c. Bagi Pemerintah Kabupaten sebagai rujukan/referensi dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten;
- d. Bagi swasta dan masyarakat sebagai bahan referensi dalam program pengembangan destinasi pariwisata yang berkaitan dengan investor.

#### **Pasal 7**

Wilayah Perencanaan meliputi rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah dengan batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek nasional.

#### **Pasal 8**

Jangka Waktu Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Wilayah adalah 4 (empat) tahun dan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali harus dilakukan peninjauan kembali materi rencana.

### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 9**

Ruang Lingkup Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan adalah :

- a. Arahan pengelolaan kawasan lindung;
- b. Arahan pengelolaan kawasan budaya dan seni;
- c. Arahan pengembangan kawasan wisata unggulan;
- d. Arahan pengembangan kawasan;

- e. Arahana pengembangan sarana wilayah;
- f. Kebijakan tata guna tanah, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya;
- g. Arahana pengembangan pelestarian cagar alam;
- h. Arahana pengembangan dan pelestarian cagar budaya.

## **BAB V**

### **RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN**

#### **Pasal 10**

Kegunaan Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan adalah :

- (1) Rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan wilayah nasional dan pulau kedalam strategi dan struktur pemanfaatan wilayah Provinsi, yang meliputi :
  - a. tujuan pemanfaatan wilayah Provinsi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
  - b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
  - c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Rencana tata pengembangan destinasi pariwisata unggulan wilayah provinsi berisi :
  - a. arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;

- b. arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
  - c. arahan pengembangan sistem pusat pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya;
  - d. arahan pengembangan sistem pusat pemukiman pedesaan dan perkotaan;
  - e. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
  - f. arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
  - g. arahan kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- (3) Rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan wilayah provinsi menjadi pedoman untuk :
- a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah provinsi;
  - b. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;
  - c. penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan destinasi pariwisata unggulan.
- (4) Jangka waktu rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Mamasa adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan;

## **BAB VI**

### **ARAHAN PEMANFAATAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN**

#### **Pasal 11**

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) arahan umum pengelolaan kawasan lindung adalah :

- a. Pemantapan batas dan status kawasan lindung sehingga keberadaannya lebih jelas, baik secara maupun hukum;
- b. Pemanfaatan kawasan lindung dapat dilakukan sejauh tidak mengurangi fungsi lindungnya;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan daya tarik wisata;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya;
- e. Kerjasama antar daerah kabupaten menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan kawasan lindung yang meliputi lebih dari satu wilayah administrasi;
- f. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

## **BAB VII**

### **ANGGARAN**

#### **Pasal 9**

Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan menggunakan :

- a. Anggaran Stimulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Stimulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN**

**P  
a  
s  
a  
l  
  
1  
2**

- (1) Rencana pengembangan destinasi pariwisata unggulan yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 3 JULI 2008

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH** diundangkan di : Mamuju

Pada tanggal : 3 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**ttd**

**H. M ARSYAD HAFID**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008 NOMOR**





# **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**TENTANG**  
**PENGGUNAUSAHAAN OBYEK WISATA**  
**PERMANDIAN AIR PANAS RANTE-RANTE**



**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**  
**Dengan**  
**YOSEPINA RAMPANG**  
**( PENGELOLAH )**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Alamat : Jl. Demmatande (KANTOR GABUNGAN DINAS-DINAS) No.      Telp.      Mamasa-Sulawesi Barat

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

Dengan

**YOSEPINA RAMPANG**

Tentang

**PENGUNAUSAHAAN**

**OBYEK WISATA PERMANDIAN AIR PANAS RANTE-RANTE**

Nomor .556/01 /DISBUDPAR/1/2015

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Limabelas Yang bertandatangan dibawah ini :

1. **BUPATI MAMASA** : Pemerintah Kabupaten Mamasa Berkedudukan Di Kabupaten Mamasa, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk selaku penyedia sarana dan prasarana Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante, Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **YOSEPINA RAMPANG** : Sebagai pengelola Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-rante, berkedudukan di Rante-Rante Desa Osango, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penggunaan Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana teruraikan dalam poin-poin dibawah ini :

**PASAL 1  
DASAR PERJANJIAN**

Ada kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas dasar saling menguntungkan dalam pengelolaan Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia sarana dan prasarana Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante yang berlokasi di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. bermaksud mengunghgunakan sarana tersebut agar berdayaguna dan berhasilguna dalam pelayanan kegiatan Masyarakat dalam penyediaan Obyek Wisata.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini, adalah penyediaan tempat rekreasi dan sarana Kepariwisataaan bagi Masyarakat yang disediakan dan dikelola Pemerintah Kabupaten Mamasa.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan perjanjian kerjasama ini adalah Penggunausahaan Obyek Wisata Permandian Air Panas yang terletak di Rante-rante, Desa Osango, Kecamatan mamasa Kabupaten Mamasa.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Setelah melakukan pemantaun dan evaluasi sebagaimana surat perjanjian ini ternyata mengalami peningkatan pendapatan.
2. Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka akan dilakukan penijauan ulang mengenai besaran **Retribusi** setiap bulannya.
3. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 05 januari 2015 dan berlaku untuk jangka waktu (5) Lima tahun atau berakhir pada tanggal 05 Januari 2020, dengan ketentuan perjanjian ini akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
4. Apabila hasil evaluasi memaksa untuk segera mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian ini dapat berjalan hanya dalam jangka 1 (Satu) Tahun saja.
5. Setelah berlakunya masa kegiatan sebagaimana tersebut diatas pasal ayat (1) perjanjian ini, dapat diperpanjang atas kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5**  
**HAK dan KEWAJIBAN**

1. Hak-Hak Para PIHAK.
  - a. **PIHAK PERTAMA**, berhak menerima iuran/retribusi dari hasil penggunausahaan Obyek Wisata Permandian Air panas Rante-Rante secara hukum sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
  - b. **PIHAK KEDUA**, berhak menerima sewa dari penggunausahaan Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante untuk dipelihara dan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama.
2. Kewajiban Para PIHAK.
  - a. **PIHAK PERTAMA**, wajib menyerahkan sarana dan prasarana Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante kepada **PIHAK KEDUA** untuk dikelola sampai pada batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
  - b. **PIHAK KEDUA**, wajib memelihara keutuhan, menghindari kerusakan sarana dan prasarana pada Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**. Dan tidak mengalihkan penggunausahaan kepada orang lain tanpa sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
  - c. **PIHAK KEDUA**, wajib membayar iuran/Retribusi dari hasil penggunausahaan sarana dan prasarana Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante kepada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 6**  
**PENERIMAAN dan PENYETORAN IURAN/RETRIBUSI**

1. Pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, iuran / Retribusi yang berhak diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** adalah **Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulannya** dan disetor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa, selaku perpanjangan tangan **PIHAK PERTAMA** Paling lambat hari terakhir bulan berjalan, untuk kemudian disetor sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa.

**PASAL 10  
PENGALIHAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.

**PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Polewali.

**PASAL 12  
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hai yang belum diatur dan atau belum cukup di atur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat di Mamasa dalam 3 (Tiga) Rangkap dengan kekuatan hukum yang sama. 2 (Dua) diantaranya bermaterai cukup untuk dipegang oleh masing-masing pihak, 1 (Satu) rangkap tanpa materai menjadi arsip yang tersimpan pada **PIHAK PERTAMA** untuk Bahan seperlunya.

**PIHAK KEDUA**  
*Pengelolaan*



**YOSEPINA RAMPANG**

**PIHAK PERTAMA**  
*Supati Mamasa*



**H. RAMLAN BADAWI**

**RANCANGAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2017**  
**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**KABUPATEN MAMASA**

NO	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	TARGET KINERJA (KUALITATIF/KUANTITATIF)	RENCANA ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I		BIDANG PROMOSI DAN KESENIAN					
		- Pengembangan Destinasi Pariwisata					
		- Melaksanakan Audi Gita Bahana Nusantara (GBN) Tk. Kabupaten dan mengikuti GBN Tk. Provinsi serta Nasional	1 kegiatan	Mamasa, Mamuju & Jakarta	- Dikenalnya Seni dan Budaya Mamasa	Rp 65,000,000	APBD
		- Pembuatan/Pencetakan Brosur/Leaflet Kepariwisata	1 kegiatan	Jakarta	- Dikenalnya Seni dan Budaya Mamasa	Rp 15,000,000	APBD
		- Mengikuti Kemilau Sulawesi 2017	1 kegiatan	Tentatif	- Dikenalnya Seni dan Budaya Mamasa	Rp 130,000,000	APBD
		- Melaksanakan Festival Tari / Musik Bambu	1 kegiatan	Mamasa	- Dikenalnya Seni dan Budaya Mamasa	Rp 120,000,000	APBD
		- Pembinaan Kelompok Sanggar Seni	1 kegiatan	Mamasa	- Terbinaanya kelompok Sanggar seni tari/musik	Rp 110,000,000	APBD
		- Mengikuti HUT Sulawesi Barat	1 kegiatan	Mamuju	- Dikenalnya Seni dan Budaya Mamasa	Rp 100,000,000	APBD
		- Penyusunan Foto Base KunjunganWisata	1 paket	Kab. Mamasa	- Tersedianya Data Base Jumlah Kunjungan Wisatawan	Rp 40,000,000	APBD
		- Monitoring & Evaluasi Pengembangan Kesenian	1 kegiatan	Mamuju	- Terpantaunya pengembangan kesenian	Rp 30,000,000	APBD
Jumlah						Rp 610,000,000	
II		BIDANG EKONOMI KREATIF					
		- Pengembangan Kemitraan					
		- Pembinaan Kelompok Pengrajin Seni Ukir/Cinder Mata (Souvenir)	1 paket	17 Kecamatan	- Terbinaanya Kelompok Pengrajin Seni Ukir/Cinder Mata	Rp 100,000,000	APBD
		- Mengikuti EXPO Fair / Handy Craft	1 kegiatan	Tentatif	- Dikenalnya barang-barang kerajinan / cinder mata khas Kab. Mamasa	Rp 150,000,000	APBD
		- Fasilitas Peralatan Sanggar seni	17 Klp	17 Kecamatan	- Tersedianya Peralatan Seni bagi kelompok sanggar seni	Rp 150,000,000	APBD
		- Melaksanakan Lomba Foto Pariwisata Tk. Kab. Mamasa	1 kegiatan	Mamasa	- Dikenalnya Potensi-Potensi Pariwisata Kab. Mamasa	Rp 120,000,000	APBD
		- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kelompok Pengrajin	1 paket	Mamasa	- Terpantaunya Program Pengembangan Kelompok Pengrajin	Rp 80,000,000	APBD
		Jumlah					



1	2	3	4	5	6	7	8
III		<b>BIDANG INVESTASI PARIWISATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kemitraan</li> <li>- Melaksanakan Lomba Kebersihan Penginapan dan Rumah Makan se- Kab. Mamasa</li> <li>- Melaksanakan Audisi/Pemilihan Putri Mamasa</li> <li>- Melaksanakan Audisi/Pemilihan Baine Matatta-Muane Masakan</li> <li>- Sosialisasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) &amp; Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Tk. Kab. Mamasa</li> <li>- Studi Banding Investasi Pariwisata</li> <li>- Penyusunan Data Base Objek Wisata, Hotel dan Rumah makan</li> <li>- Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kemitraan Pariwisata</li> </ul>	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket	Se- Kab. Mamasa Se- Kab. Mamasa Se- Kab. Mamasa Se- Kab. Mamasa Tenstaff Kab. Mamasa Kab. Mamasa Se- Kab. Mamasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Lomba Kebersihan Penginapan dan Rumah Makan</li> <li>- Terlaksananya Audisi/Pemilihan Putri Mamasa</li> <li>- Terlaksananya Audisi/Pemilihan Baine Matatta-Muane Masakan</li> <li>- Terlaksananya Sosialisasi Pengelola Penginapan dan Rumah Makan se- Kab. Mamasa</li> <li>- Terlaksananya Uji Petik Investasi Kepariwisataah</li> <li>- Tersedianya Data Base Objek Wisata, Hotel dan Rumah Makan</li> <li>- Terlaksananya Sosialisasi terhadap Pramuwisata Kab. Mamasa</li> <li>- Terpantaunya program kemitraan pariwisata</li> </ul>	Rp 80,000,000 Rp 150,000,000 Rp 150,000,000 Rp 80,000,000 Rp 150,000,000 Rp 40,000,000 Rp 100,000,000 Rp 60,000,000	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
<b>Jumlah</b>						<b>Rp 810,000,000</b>	
IV		<b>BIDANG DESTINASI PARIWISATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Destinasi pariwisata</li> <li>- Pekerjaan Talud di Objek Wisata Air Panas Rante-Rante Kec. Mamasa</li> <li>- Pembangunan Jalan Setapak Permandian Air Panas Malimbong Kec. Messawa</li> <li>- Pembangunan Villa Pada Objek Wisata Pemandangan Alam Buntu Mussa Kec. Balla</li> <li>- Pembangunan WC dan Kamar Ganti pada Objek Wisata Liawan Kec. Sumarorong</li> <li>- Betonisasi Jalan Wisata Menuju Air Terjun Liawan (Lanjutan)</li> </ul>	1 paket 1 paket 1 paket 1 Kegiatan 1 paket	Kec. Mamasa Desa Malimbong Kec. Messawa Kec. Balla Kec. Sumarorong Kec. Sumarorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tleraksananya Perahan Longsor pada Objek Wisata Air Panas Rante-Rante</li> <li>- Tersedianya Fasilitas dan Akses Menuju Objek Wisata</li> <li>- Tersedianya Fasilitas Penginapan/Tempat Istirahat di Objek Wisata Buntu Mussa</li> <li>- Tersedianya Fasilitas WC dan Kamar Ganti pada Objek Wisata Liawan</li> <li>- Tersedianya Fasilitas dan Akses Menuju Objek Wisata</li> </ul>	Rp 500,000,000 Rp 300,000,000 Rp 500,000,000 Rp 300,000,000 Rp 500,000,000	APBD APBD APBD APBD APBD

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Penataan Obyek-Obyek Wisata:					
		1. Pembangunan Kolam Air Panas Rante Kamiri	1 paket	Kec. Tawallan	Tertatanya Obyek Wisata	Rp 200,000,000	APBD
		2. Lokasi Air Terjun Liawan	1 paket	Kec. Sumarorong	Tertatanya Obyek Wisata	Rp 200,000,000	APBD
		3. Air Panas Kole dan Rante Kotoan Kec. Mamasa	2 paket	Kec. Mamasa	Tertatanya Obyek Wisata	Rp 140,000,000	APBD
		4. Obyek Wisata Gandang Batu Desa Panura	1 paket	Kec. Pana	Tertatanya Obyek Wisata	Rp 80,000,000	APBD
		5. Air Terjun Desa Kalama	1 paket	Kec. Tabang	Tertatanya Obyek Wisata	Rp 100,000,000	APBD
		6. Pembuatan Peta Berdiri Kawasan Objek Wisata	7 Paket	Lokasi Objek Wisata	Dikelahuinya letak dan jarak sejumlah objek wisata	Rp 35,000,000	APBD
		- Rehab Gedung Penyimpanan Duplikat Alat Perjanjian Situs To'Yao	1 paket	Kec. Mamasa	Tertatanya Obyek Wisata	Rp 150,000,000	APBD
		- Sosialisasi Sadar Wisata	1 Kegiatan	Tentatif	- Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata	Rp 60,000,000	APBD
		- Monitoring dan Evaluasi Program Destinasi	1 Kegiatan	Se Kab. Mamasa	- Terlaksananya Monev Program Destinasi	Rp 50,000,000	APBD
Jumlah						Rp 3,115,000,000	
TOTAL ( I + II + III + IV + V )						Rp 5,135,000,000	

Kepala Dinas,



**Drs. ARRIUAN PASAU**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19630620 199002 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Kantor Gabungan Dinas Jl. Demmatande no. 1, Mamasa 91362

**REGISTER**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**  
 Tahun 2013

Target PAD 18.000.000

Tanggal		No. STS	Uraian	Jumlah Setoran
Terima dari Kolektor	Setoran ke Kasda			
3-Jan-13	3-Jan-13	12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Desember 2012	440.000
6-Feb-13	16-Feb-13	1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Januari 2013	764.000
5-Mar-13	6-Mar-13	2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Februari 2013	314.000
3-Apr-13	4-Apr-13	3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Maret 2013	461.000
7-May-13	8-May-13	4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan April 2013	88.000
5-Jun-13	11-Jun-13	5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Mei 2013	422.000
3-Jul-13	7-Jul-13	6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Juni 2013	143.000
14-Aug-13	16-Aug-13	7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Juli 2013	275.000
6-Sep-13	6-Sep-13	8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Agustus 2013	416.000
5-Sep-13	6-Sep-13	8	PAD Lain-lain (Permandian Air Panas Rante-Rante)	100.000
5-Oct-13	24-Oct-13	9	PAD Lain-lain (Permandian Air Panas Rante-Rante)	127.000
9-Oct-13	24-Oct-13	9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan September 2013	100.000
8-Nov-13	19 Nov 2013	10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Oktober 2013	377.000
15-Dec-13	20-Dec-13	13	PAD Lain-lain (Permandian Air Panas Rante-Rante)	300.000
20-Dec-13	20-Dec-13	13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan November 2013	57.000
<b>JUMLAH</b>				<b>4.384.000</b>

Sisa Target Yang Belum Dicapai 13.616.000

Pencapaian Target (%) 24,36%

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Kantor Gabungan Dinas Jl. Demmatande no. 1, Mamasa 91362

**REGISTER**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**  
Tahun 2014

Target PAD 18.000.000

Tanggal		No. STS	Uraian	Jumlah Setoran
Terima dari Kolektor	Setoran ke Kasda			
1	2	3	4	5
10-Jan-14	10-Jan-14	14/2013	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Desember 2013	329.000
12-Feb-14	12-Feb-14	1/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Januari 2014	93.000
15-Apr-14	16-Apr-14	2/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Maret 2014	356.000
8-May-14	9-May-14	3/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan April 2014	310.000
2-Jul-14	3-Jul-14	4/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Mei 2014	306.000
2-Jul-14	3-Jul-14	4/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Juni 2014	290.000
5-Aug-14	6-Aug-14	5/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Juli 2014	417.000
5-Aug-14	6-Aug-14	5/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Juni 2014	400.000
5-Aug-14	6-Aug-14	5/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Juli 2014	605.000
	19-Aug-14		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) Tahun 2013	492.000
5-Sep-14	8-Sep-14	6/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Agustus 2014	205.000
6-Oct-14	15-Oct-14	7/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Agustus 2014	170.000
6-Oct-14	15-Oct-14	7/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan September 2014	180.000
10-Oct-14	15-Oct-14	7/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan September 2014	245.000
11-Nov-14	13-Nov-14	8/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Oktober 2014	150.000
18-Dec-14	19-Dec-14	10/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Oktober 2014	288.000
18-Dec-14	19-Dec-14	10/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan November 2014	201.000
29-Dec-14	30-Dec-14	11/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan November 2014	200.000
<b>JUMLAH</b>				<b>5.237.000</b>

Sisa Target Yang Belum Dicapai 12.763.000

Pencapaian Target (%) 29,09%

# DIKAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kantor Gabungan Dinas Ji. Dummatende no. 1, Mamasa 91362

## REGISTER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Tahun 2015

Tanggal		No. SSPD	No. STS	Uraian	Jumlah Setoran
Terima dari Kolektor	Setoran ke Kasda				
1	2	3	4	5	6
26-Jan-15	27-Jan-15	12/2014	12/2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Desember 2014	339.000
11-Feb-15	17-Feb-15	1/SSPD/DPEK/II/2015	1/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Januari 2015	316.000
12-Mar-15	16-Mar-15	2/SSPD/DPEK/III/2015	2/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Februari 2015	258.000
24-Apr-15	27-Apr-15	3/SSPD/DPEK/IV/2015	3/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Desember 2014	200.000
24-Apr-15	27-Apr-15	3/SSPD/DPEK/IV/2015	3/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Januari 2015	205.000
24-Apr-15	27-Apr-15	3/SSPD/DPEK/IV/2015	3/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Februari 2015	150.000
5-May-15	7-May-15	4.2/SSPD/DPEK/V/2015	4/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Rante-Rante) untuk bulan April 2015	200.000
6-May-15	7-May-15	4.1/SSPD/DPEK/V/2015	4/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Maret 2015	234.000
6-May-15	7-May-15	4.1/SSPD/DPEK/V/2015	4/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan April 2015	308.000
19-Jun-15	22-Jun-15	5/SSPD/DPEK/VI/2015	5/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Rante-Rante)	500.000
13-Jul-15	14-Jul-15	6.1/SSPD/DPEK/VII/2015	6/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Mei 2015	154.000
13-Jul-15	14-Jul-15	6.1/SSPD/DPEK/VII/2015	6/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Juni 2015	217.000
13-Jul-15	14-Jul-15	6.2/SSPD/DPEK/VII/2015	6/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Rante-Rante)	500.000
19-Aug-15	21-Aug-15	7.1/SSPD/DPEK/VIII/2015	7/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Rante-Rante)	1.000.000
20-Aug-15	21-Aug-15	7.2/SSPD/DPEK/VIII/2015	7/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Juli 2015	599.000
20-Aug-15	21-Aug-15	7.3/SSPD/DPEK/VIII/2015	7/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Mei 2015	160.000
20-Aug-15	21-Aug-15	7.3/SSPD/DPEK/VIII/2015	7/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Juni 2015	220.000
20-Aug-15	21-Aug-15	7.3/SSPD/DPEK/VIII/2015	7/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Juli 2015	132.000
24-Aug-15	24-Aug-15	8/SSPD/DPEK/IX/2015	8/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Rante-Rante)	1.000.000
20-Oct-15	21-Oct-15	9/SSPD/DPEK/X/2015	9/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Agustus 2015	333.000
20-Oct-15	21-Oct-15	9/SSPD/DPEK/X/2015	9/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan September 2015	367.000
17-Nov-15	18-Nov-15	10/SSPD/DPEK/XI/2015	10/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Oktober 2015	360.000
18-Dec-15	29-Dec-15	11/SSPD/DPEK/XII/2015	11/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan November 2015	420.000
29-Dec-15	29-Dec-15	12/SSPD/DPEK/XII/2015	12/2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Rante-Rante)	2.500.000
JUMLAH					11.172.000

Target PAD 10.000.000  
Target Lebih 1.172.000  
Bersisaan Target 10% 111.72%

REGISTER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
Tahun 2016

Tanggal		No. SSPD	No. STS	Uraian	Jumlah Setoran
Terima dari Kolektor	Setoran ke Kanda				
18-Jan-16	19-Jan-16	1/SSPD/DPEK/I/2016	1/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Desember 2015	555.000
15-Feb-16	16-Feb-16	2/SSPD/DPEK/II/2016	2/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Januari 2016	1.415.000
12-Feb-16	16-Feb-16	2.1/SSPD/DPEK/II/2016	2/2016	PAD Lain - Lain (Hasil Penjualan Kasat)	5.000.000
23-Feb-16	25-Feb-16	3/SSPD/DPEK/II/2016	3/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Agustus 2015	110.000
23-Feb-16	25-Feb-16	3/SSPD/DPEK/II/2016	3/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan September 2015	100.000
23-Feb-16	25-Feb-16	3/SSPD/DPEK/II/2016	3/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Oktober 2015	95.000
24-Mar-16	28-Mar-16	4/SSPD/DPEK/III/2016	4/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Februari 2016	915.000
3-Apr-16	7-Apr-16	5/SSPD/DPEK/IV/2016	5/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Maret 2016	1.450.000
9-May-16	12-May-16	6/SSPD/DPEK/V/2016	6/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan April 2016	302.000
24-Jun-16	27-Jul-16	7/SSPD/DPEK/VI/2016	7/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Mei 2016	700.000
21-Jul-16	27-Jul-16	8/SSPD/DPEK/VII/2016	8/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Juni 2016	621.000
25-Jul-16	27-Jul-16	8.1/SSPD/DPEK/VII/2016	8/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Maret 2016	150.000
25-Jul-16	27-Jul-16	8.1/SSPD/DPEK/VII/2016	8/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan April 2016	300.000
25-Jul-16	27-Jul-16	8.1/SSPD/DPEK/VII/2016	8/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Mei 2016	210.000
25-Jul-16	27-Jul-16	8.1/SSPD/DPEK/VII/2016	8/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Juni 2016	140.000
19-Aug-16	23-Aug-16	9/SSPD/DPEK/VIII/2016	9/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Juli 2016	1.134.000
14-Oct-16	14-Oct-16	11/SSPD/DPEK/X/2016	11/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Agustus 2016	196.000
14-Oct-16	14-Oct-16	11/SSPD/DPEK/X/2016	11/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan September 2016	833.000
9-Nov-16	10-Nov-16	12/SSPD/DPEK/XI/2016	12/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Oktober 2016	1.463.000
15-Dec-16	19-Dec-16	13.1/SSPD/DPEK/XII/2016	13/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Liawan) untuk bulan Nopember 2016	710.000
16-Dec-16	19-Dec-16	13.2/SSPD/DPEK/XII/2016	13/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Juli 2016	200.000
16-Dec-16	19-Dec-16	13.2/SSPD/DPEK/XII/2016	13/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Agustus 2016	95.000
16-Dec-16	19-Dec-16	13.2/SSPD/DPEK/XII/2016	13/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan September 2016	155.000
16-Dec-16	19-Dec-16	13.2/SSPD/DPEK/XII/2016	13/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Oktober 2016	60.000
16-Dec-16	19-Dec-16	13.2/SSPD/DPEK/XII/2016	13/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Malimbong) untuk bulan Nopember 2016	190.000
23-Dec-16	23-Dec-16	14/SSPD/DPEK/XII/2016	14/2016	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Retribusi Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante) untuk bulan Januari s/d April 2016	2.000.000
JUMLAH					19.099.000
Target PAD					14.500.000
Kelebihan Target					4.599.000
Pencapaian Target (%)					131,72%

### Hasil Identifikasi Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamasa tahun 2015

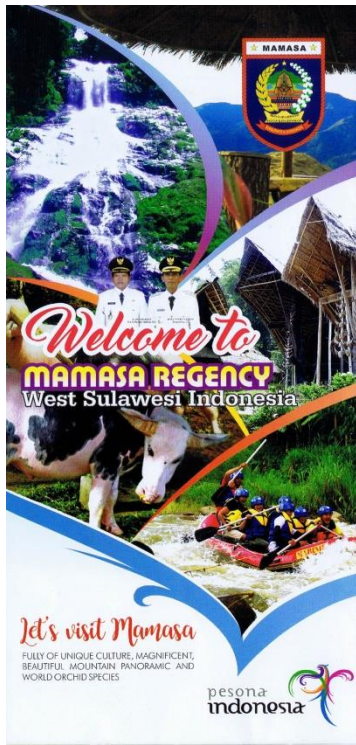
No.	Kecamatan	Daya Tarik Wisata Berdasarkan Budaya & Peninggalan Sejarah	Daya Tarik Wisata Berdasarkan Gejala Alam
1	Mamasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monumen To'pao</li> <li>2. Rumah Adat Rambusaratu'</li> <li>3. Rumah Adat Buntu Kasisi</li> <li>4. Perkampungan Tradisional Loko</li> <li>5. Perkampungan Tradisional Taupe</li> <li>6. Perkampungan Tondok Bakarui</li> <li>7. Kuburan Tua Batutu</li> <li>8. Meriam Belanda</li> <li>9. Upacara Rambu Solo' &amp; Rambu Tuka'</li> <li>10. Pasar Mamasa</li> <li>11. Gereja Tua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunung Mambulilling</li> <li>2. Air Terjun Mambulilling</li> <li>3. Air Terjun Tetean</li> <li>4. Air Terjun Rantepongko</li> <li>5. Pemandian Air Panas Kole</li> <li>6. Pemandian Air Panas Mesakada</li> <li>7. Pemandian Air Panas Rante Katoan</li> <li>8. Pemandian Air Panas Nusantara</li> <li>9. Mata Air Panas Desa Osango</li> <li>10. Situs Batu Kumila'</li> <li>11. Bukit Pa'to'longan</li> <li>12. Sungai Mamasa</li> </ol>
2	Tawalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gereja Kristen Pertama di Mamasa</li> <li>2. Rumah Tradisional Tondok Sirenden</li> <li>3. Kuburan Tua Nenek Pattoni</li> <li>4. Kuburan Liang Dusun Tanete</li> <li>5. Upacara Rambu Solo' &amp; Rambu Tuka'</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air Terjun Parak</li> <li>2. Mata Air Panas Rantekamiri</li> </ol>
3	Sesenapadang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Adat Parengnge' orobua</li> <li>2. Perkampungan Tradisional Orobua</li> <li>3. Perkampungan Tradisional Orobua Timur</li> <li>4. Perkampungan Tradisional Sepang</li> <li>5. Kuburan Pahlawan Demmatande dan Benteng</li> <li>6. Salubanga</li> <li>7. Upacara Rambu Solo' &amp; Rambu Tuka'</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air Terjun Minanga</li> <li>2. Bukit Marudinding</li> <li>3. Panorama Alam Lisuan Ada'</li> </ol>
4	Balla	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuburan Tua Tedong-tedong</li> <li>2. Perkampungan Tradisional Balla Peu'</li> <li>3. Perkampungan Tradisional Ranteballa Kalua'</li> <li>4. Perkampungan Tradisional Batarirak</li> <li>5. Perkampungan Tenun Rante Sepang</li> <li>6. Rumah Adat Balla Sataneetan</li> <li>7. Rumah Adat Tumangke</li> <li>8. Goa Maria Bukit Pena'</li> <li>9. Upacara Rambu Solo' &amp; Rambu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukit Buntu Mussa</li> <li>2. Air Terjun Tambuk Manuk</li> <li>3. Air Terjun Allo Dio</li> <li>4. Air Terjun Sareayo</li> <li>5. Situs Batu Sikoba</li> </ol>

		Tuka'	
5	Tandukalua'	1. Perkampungan Tradisional Mala'bo	1. Air Terjun Sakunan 2. Air Terjun Ba'ba Rapa' 3. Air Terjun Bunu' 4. Mata Air Panas Tamalanti' 5. Tebing Mataurang
6	Sumarorong	1. Upacara Rambu Solo' & Rambu tuka'	1. Air terjun liawan 2. air terjun laloeng 3. Air Terjun Bakkele 4. Agrowisata Kopi & Kakao
7	Messawa	1. Rumah Adat Tomakaka Makuang 2. Rumah Adat Dadeko Malimbong 3. Rumah Adat Tappang 4. Upacara Rambu Solo' & Rambu Tuka'	1. Air Terjun Sollokan 2. Pemandian Air Panas Malimbong 3. Gua Lo'ko Ledo
8	Rantebulahan Timur		Air Terjun Salulemo Gua Alam
9	Mehalaan		Bentang Alam Persawahan
10	Mambi	1. Kuburan To Salama' dan Al-Qur'an Tua 2. Pasar Mambi	1. Air Terjun Salu Allo 2. Air Terjun Limba Lepong 3. Gua Leang Ledo 4. Mata Air Panas Indo'banua Sungai Mambi
11	Bambang	1. Perkampungan Tradisional Minanga 2. Perkampungan Tradisional Saludengen 3. Perkampungan Tradisional Ulumambi 4. Perkampungan Kuno Kora' 5. Perkampungan Kuno Tappaom 6. Rumah Tradisional Lentong 7. Rumah Tradisional Lateompom 8. To dipandan, Kuburan dalam Gua 9. Upacara Ritual Ada' Mappurondo	1. Air Terjun Sambabo 2. Bumi Perkemahan Rantepeni 3. Bukit Takkatio 4. Gunung Pasapa
12	Aralle		1. Permandian Air Panas Uhailanu 2. Mata Air Panas Salutambun 3. Air Terjun Pipping
13	Buntumalangka	1. Rumah Adat Banua Kasalle 2. Perkampungan Tradisional Rante Berang 3. Tugu Perjuangan Taora 4. Upacara Ritual Ada' Mappurondo	1. Air Terjun Lomba' Tera 2. Air Terjun Maksaruran 3. Batu Lea Memoro 4. Air Panas Rante Berang 5. Agrowisata Kopi
14	Tabulahan	1. Padaling Nenek Pongka Padang 2. Kampung Tua Buntu Bulu 3. Rumah Adat Saluleang 4. Upacara Ritual Ada'	1. Gunung GandaDewata 2. Air terjun Podiba

		Mappurondo	
15	Tabang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Tradisional Patotong</li> <li>2. Upacara Rambu Solo' &amp; Rambu Tuka'</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukit Tado Kalua</li> <li>2. Sungai Masuppu</li> </ol>
16	Pana'	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Tiang Lombok</li> <li>2. Perkampungan Tradisional Mamullu</li> <li>3. Upacara Rambusolo' dan rambutuka'</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Laledong</li> </ol>
17.	Nosu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upacara Mangngaro</li> <li>2. Rumah Adat Batu Papan</li> <li>3. Rumah Adat Banua Sondong Sura'</li> <li>4. Upacara Rambu Solo' &amp; Rambu Tuka'</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agrowisata Padi Hitam</li> <li>2. Air Terjun Rimbe</li> <li>3. Air Terjun Lekkang</li> <li>4. Air Terjun Parinding</li> <li>5. Bukit Rangri'</li> </ol>

**Sumber : Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Mamasa**



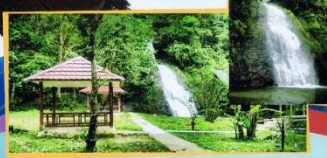


**Welcome to**  
**MAMASA REGENCY**  
West Sulawesi Indonesia

*Let's visit Mamasa*  
FULLY OF UNIQUE CULTURE, MAGNIFICENT,  
BEAUTIFUL MOUNTAIN PANORAMIC AND  
WORLD ORCHID SPECIES

pesona  
indonesia

### Natural Tourism



Entering Mamasa regency the first vision is virgin natural beauty with green hills and cool mountain weather, including tourism objects and the beautiful culture of Mamasa. Natural tourism of Mamasa regency among others, we can meet at natural panorama of mount Mambulilling, natural panorama and wetland area in Pana' distric, waterfal (sarambu) scattered everywhere, such as the waterfalls of Solioikan in Messawa, Sambabo in Bambang, Salulemo in East Rantebulahan, Liawan in Sumarorong, Rimbe in Nosu, Tetean in Tondok Bakaru, Parak in Tawalian and the natural thermal baths wich are very much in different districts, such as the Hots Springs of Rante-Rante, Kole and Rantekatoan in Mamasa urban areas, Uhaliano in Aralle district, and Malimbong in Messawa district.



One of the most famous tourist attractions in the regency is mount Gandang Dewata wich has become a tourist resort for hikers and nature lovers. The mountain is known for misterious and challenging nature. Although some mountain climbers have been victims of malignancy of Gandang Dewata, but more curiosity motivates hikers and nature lovers to visit the mountain.

### Cultural Tourism



Mamasa Culture *Diversity* is an attraction for tourists. It ranges from traditional house with a *variety of types*, traditional villages, Funeral Ceremony. Mamasa funeral has specific *and* characters. Ceremony is adjusted to social status/level. You can visit mamasa to see dead body processing of sitting and change cloths, killing many pigs and buffaloes to sacrifice, drooping the dead body to the graves in every year. Please visit our Government website [www.mamasakab.go.id](http://www.mamasakab.go.id) and email [letsvisitmamasa@gmail.com](mailto:letsvisitmamasa@gmail.com)

### 22 Accomodations in Mamasa

Contact : +62 81 342 973 008 / +62 85242 040478  
Web : [www.mamasatours.com](http://www.mamasatours.com)

RAMAYANA INN & Restaurant

SAJOJO Hotel

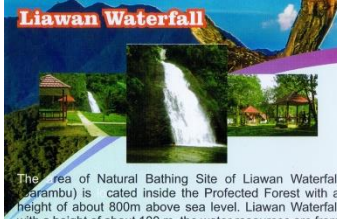
DIAN SATRIA Hotel & Restaurant

PONDOK WISATA INN

Traditional houses of Mamasa were built with the best local wood called "uru" or pioneer local wood. Most of typical houses in Mamasa more then 250 years old. Their house contruction without nail and easy to move if they want to move to another place. The four colors carving with about 24 motives derives from flora and fauna are put in the front and two sides of the house. The carvings are the symbolic of the civilization of Mamasa society. Each carving motive has a special name.



### Liawan Waterfall



The area of Natural Bathing Site of Liawan Waterfall (Rambu) is located inside the Protected Forest with a height of about 800m above sea level. Liawan Waterfall with a height of about 100 m, the water resources are from the area of Protected Forests of mount sareong where the

### Sambabo Waterfall



Sambabo Waterfall with a height of about 100 m. located in Ulumambi Village of Bambang District of Mamasa Regency is the highest waterfall Sulawesi Island. Based on the admission of tourists who have ever been there, Sambabo Waterfall is the

### Hot Water Bath Kole



Kole Hot Bathing Site is a natural hot bathing site in the bank of Mamasa River, located in Rambu Saratu Village of Mamasa District, with a distance of about 2 Km from the capital city of the Regency. Most of Hot Bathing Sites like this can be found in the region of Mamasa Regency in achievable distance, however the places have not been well developed/managed.

### Traditional Village Balla Feu



Balla Feu Traditional Village, there are more than 100 traditional houses each with Rice Barn placed in front of the house. The Traditional Village was built in lined above the hill with altitude of 1.400 m above sea level, located in Balla Tumuka Village of Balla District. Because of the uniqueness and variety of cultural/tourism objects owned, Balla Tumuka Village has been designated as Tourism Village.

### Ceremony Grief / Death (Rambu Solo')

One of a series of ceremonies of sorrowfulness/death (Rambu Solo') called "dipatadongkon" is subjecting the corpse on the floor or on a chair in a certain period of time by wearing traditional clothes. The Ceremony is only valid for the late that is given specific ritual called To diallan



### Paladan Graves

Paladan, There are graves of buffalo in a combination form of the house belonging to Demarantang Heroes. located on top of a hill with a beautiful view, there is also



traditional manufacture of stoneware clay Mamasa Paladan can only be reached by trekking after a car ride and drop of from Mamasa City to Tawallian. Seen from far away, fort of salubanga as the last battle fought dutch in Mamasa. Buffalo grave was built on Demmarantang Demmatande, Deppalanna were build the graves for their selves. They are Mamasa Heroes. Those porg graves fully of carvings in wood material with 425 Cm diameter, 5.5 m length, 1 m high and wood horse carpent in north side and buffalo wood carpent in south side.

### Ritual Manggaro



Manggaro Ritual is a cultural traditions of taking outside corpses of ancestors from the grave to be re-cremated. The ritual is a ceremonial death ritual complement (Rambu Solo') for the late with a special ritual (dipandan). The cultural tradition is only known in the areas of Nosu and Pana' of Mamasa Regency, and is not found in other places throughout Indonesia even probably in the world.

### Tedong-Tedong Graves

Minanga Tedong-Tedong Tomb complex located in Buntu Balla District. The uniqueness of these tombs is there are dozens of dead storage container (Erong) in the form of Buffalo (Tedong) and boat. Erong diameter is between 70-120 Cm, length 2 to 3 m and height of 1 to 2 m, made from local first class wood or so-called as Uru wood. Tedong-Tedong Tomb is one of the oldest graves belongs the nobles which is already hundreds of year old. One whole of Tedong usually is occupied until



### Water Tourism Rafting

Supportive of Tourism in Mamasa. Mamasa River flowing cut. Mamasa District into parts, in addition as main water supplier to the Power Plant of Bakaru. It also ideal as a location for Water Tourism Tirta.





Dua jenis rumah adat di Perkampungan Rambusaratu



Ritual Manggaro di Kecamatan Nosu





**Kuburan Tua tedong-tedong di Kecamatan Balla**



**Pegunungan yang membentuk bentang alam Kabupaten Mamasa**



**Air Terjun Sambabo di Kecamatan Bambang**



**Pemandian air panas Uhailanu di Kecamatan Aralle**





**. Air Terjun Tetea dan Air Terjun Mambulilling di Kecamatan Mamasa**



**Kompleks Perumahan Tradisional Tondok Sirenden**

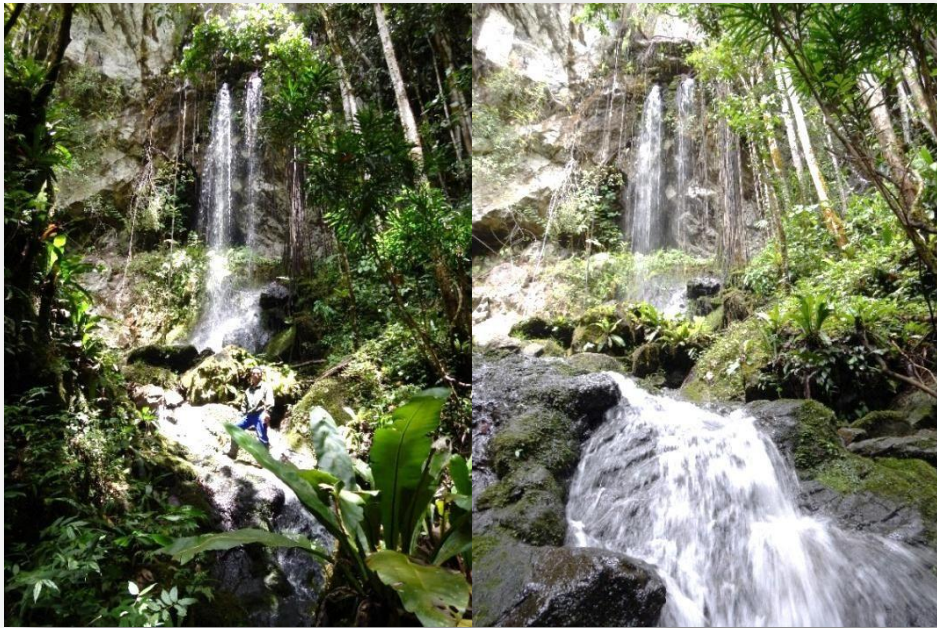


. Panorama Pesawahan di Orobua Timur

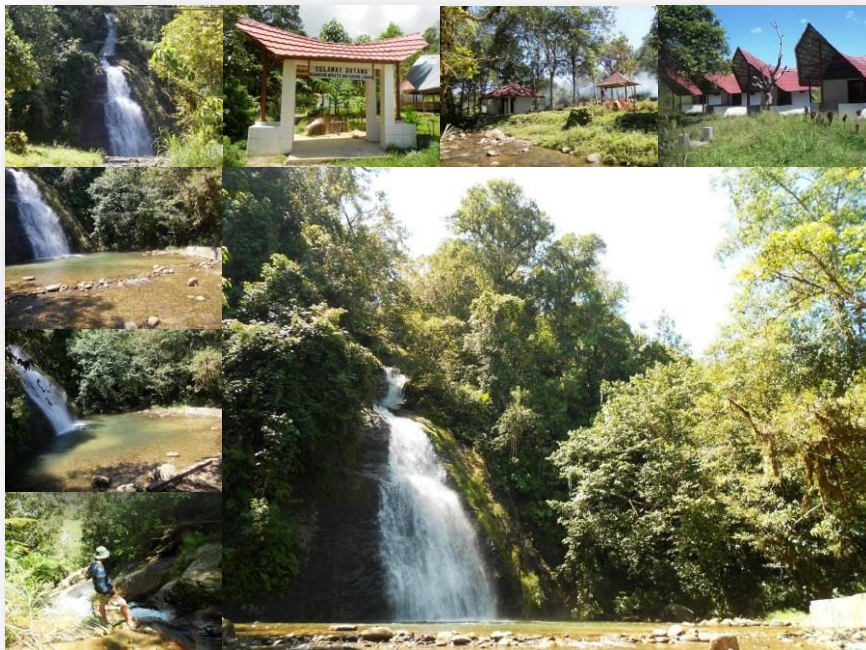




**Balla Peu', Perkampungan Tradisional Terpanjang di Mamasa**



**Air Terjun Ba'ba Rapa'**



**Air Terjun Liawan Kecamatan Sumarorong**

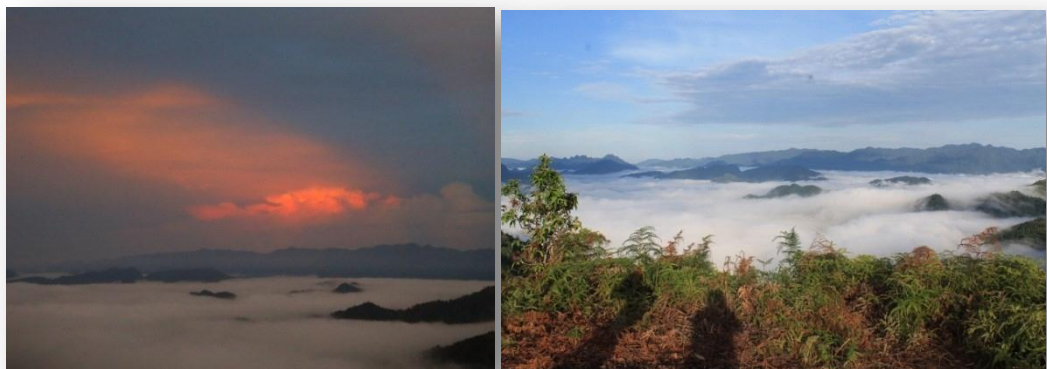




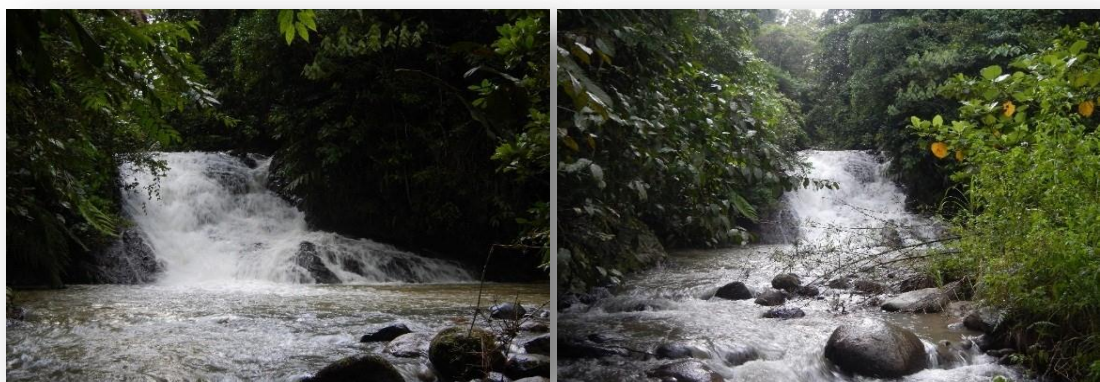
**Pemandian Air Panas Malimbong Kecamatan Messawa**



**Al Qur'an tua yang terdapat di Desa Indo'banua , Mambi**



**Panorama dari Puncak Gunung Pasapa'**



**Air Terjun Pipping**





**Air Terjun Podiba**



**Panorama Sungai Masuppu**



**Panorama Persawahan di Kecamatan Pana**



**Bersama Bupati Mamasa, Bapak Drs. H. Ramlan Badawi, MH**





**Bersama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamasa,  
Bapak David Bambalayuk, ST., M.Si**



**Bersama PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa,  
Ibu Agustina Toding, S.Pd, M.Pd**



**Bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten  
Mamasa, Bapak Sugiono, S.Pd**



**Bersama Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata dan Staf Dinas Pariwisata  
Kabupaten Mamasa**



**Pengambilan data sekunder di bagian Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten  
Mamasa**



**Bersama Bapak  
Demianus, Tourist  
Guide Kabupaten  
Mamasa**





**Bersama Staf Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, Pengelola Air Terjun Liawan**



**Bersama para  
tokoh Masyarakat  
sekitar Tempat  
Wisata di  
Kecamatan  
Sumarorong**

**Bersama masyarakat yang tinggal di  
sekitar tempat wisata**



**Bersama Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten  
Mamasa, Bapak Arvin Ival Putera, S.Sos**

**Bersama Wisatawan Asing, Alice  
Deutreuil**





**Bersama Ketua Sanggar Seni Kondosapata' Jaya, Bapak Hendrik Thomas**



**Bersama Pengunjung Air Terjun Liawan dan Pengelola Objek Wisata**



**Bersama Pelaku Usaha Wisata, Ibu Yosephine, Pengelola Air Panas Rante-Rante  
dan Pondok Mamasa Indah Kecamatan Mamasa**